

KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL DAN DUKUNGAN DOMESTIK: STRATEGI TIKA DAN TICA SEBAGAI EMERGING DONORS

Poppy S. Winanti

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gadjah Mada
Email: poppysw@ugm.ac.id

Accepted: 29 Juni 2023; Revised: 30 Desember 2024; Approved: 30 Desember 2024

Abstract

For the last two decades, countries from the Global South have actively engaged in international development, particularly in foreign aid. The emerging Global South donors encounter significant challenges that may differ from the Global North as traditional donors. As emerging donors, the most substantial challenge is securing domestic support. This article aims to discuss the strategies taken by the Global South in managing its new role as an emerging donor while still retaining developing countries' status. This article also intends to comprehend how emerging donors reconcile their needs to acquire domestic support and their desires to play a more substantial role in global politics. For this purpose, this article observes the experience of the Turkish Cooperation International Agency (TIKA) and Thailand International Cooperation Agency (TICA) as the Global South in accomplishing their international development objectives. By employing the approach that emphasizes the interplay between material interests and domestic political contestation, this article argues that in exercising its role as an emerging donor, the Global South must adjust its international development program to the interest of dominant domestic political actors to gain domestic support.

Keywords: *Global South, South-South Cooperation, emerging Donors, TICA, TIKA*

Abstrak

Negara-negara dari *Global South* dalam dua dekade terakhir menunjukkan keaktifan yang cukup signifikan dalam kerja sama pembangunan internasional terutama melalui pemberian bantuan asing. Sebagai pendonor baru atau yang kerap disebut sebagai *emerging donors*, negara dari *Global South* menghadapi tantangan yang berbeda dengan negara-negara Utara yang merupakan pendonor tradisional. Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh *emerging donors* adalah memastikan dukungan domestik dalam menjalankan fungsinya sebagai pendonor. Artikel ini bertujuan mendiskusikan strategi apa yang dikembangkan negara pendonor dari *Global South* dalam mengelola peran sebagai negara donor yang pada saat bersamaan juga masih tergolong negara berkembang. Artikel ini juga ingin memahami bagaimana *emerging donor* merekonsiliasi kebutuhan memperoleh dukungan domestik dengan kepentingan untuk memainkan peran yang krusial dalam politik global dalam mengelola bantuan luar negerinya. Untuk itu, artikel ini mencermati pengalaman *Turkish Cooperation International Agency* (TIKA) dan *Thailand International Cooperation Agency* (TICA) sebagai contoh praktik pembangunan internasional oleh *Global South*. Dengan memanfaatkan pendekatan yang menekankan pada *interplay* antara kepentingan material dan kontestasi aktor politik domestik, artikel ini beragumen bahwa untuk mendapatkan dukungan domestik, *emerging donors* perlu menyesuaikan program bantuan internasionalnya agar selaras dengan kepentingan aktor politik domestik yang dominan.

Kata Kunci: *Global South, Kerja Sama Selatan-Selatan, emerging donors, TICA, TIKA*

Pendahuluan

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, negara-negara yang berasal dari *Global South* menunjukkan keterlibatan yang cukup signifikan dalam program pembangunan internasional. Keterlibatan tersebut terutama berwujud pemberian bantuan asing (IBON Foundation, Inc., 2010). Sebagai negara dengan status pendonor baru (*emerging donors*), negara yang berasal dari *Global South* tersebut menghadapi tantangan tersendiri yang berbeda dengan negara-negara yang tergolong pendonor tradisional. Di satu sisi, mereka masih digolongkan sebagai negara sedang berkembang, namun di sisi lain juga telah menjadi negara pemberi bantuan. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan negara pendonor tradisional yang sebagian besar berasal dari *Global North* yang pada dasarnya telah menjadi negara maju pada saat mereka telah aktif sebagai negara donor. Dengan masih menyandang status sebagai negara sedang berkembang, pertanyaan yang kerap muncul adalah mengapa perlu memberi bantuan kepada negara lain sementara kondisi domestik masih menghadapi sejumlah persoalan (Apresian, 2016). Oleh karena itu, tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh *emerging donors* tersebut salah satunya adalah bagaimana memastikan dukungan domestik dalam menjalankan fungsi sebagai negara donor (Winanti & Alvian, 2019a; Winanti & Alvian, 2019b).

Istilah *emerging donors* sendiri masih menjadi perdebatan. Sebagian besar literatur menyebutnya sekedar untuk membedakan dengan negara-negara pendonor yang tergabung dalam *Development Assistance Committee* (DAC), komite yang beranggotakan negara maju untuk mengelola bantuan internasionalnya di bawah naungan *Organization for Economic and Cooperation and Development* (OECD). *Emerging donors* karenanya, merujuk pada negara-negara yang bergerak di bidang pembangunan internasional tetapi tidak berafiliasi ke dalam DAC atau *non-DAC donor* (Woods, 2008). Meski perlu dipahami, kategorisasi semacam ini mengundang pertanyaan, menimbang negara seperti Turki misalnya, merupakan negara berkembang dan

tergolong *emerging donors*, namun menjadi bagian dari DAC di bawah naungan OECD (Cihangir-Tetik & Müftüler-Baç, 2021).

Berbagai literatur mengenai *emerging donors*, lebih banyak difokuskan pada alasan di belakang atau motivasi yang mendorong *Global South* menjalankan program bantuan internasionalnya, terutama dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS). Selain itu, kajian yang ada juga lebih banyak mendiskusikan tentang implikasi dari transformasi *Global South* dari negara penerima menjadi negara pemberi donor terhadap tata kelola pembangunan internasional maupun relasi Utara dan Selatan (Gray & Gills, 2016; Six, 2009; Dreher, et.al., 2013; Dreher & Fuchs, 2011). Sejumlah literatur juga mendiskusikan sejauh mana keterlibatan *Global South* dapat memberi tawaran alternatif baru atau wacana tandingan bagi pengelolaan pembangunan internasional yang berlangsung (Altınbas, 2013; Muhr, 2016; Quadir, 2013).

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana negara yang berasal dari *Global South* yang telah muncul sebagai negara donor baru, dengan segala keterbatasannya, mengembangkan strategi pembangunan internasionalnya. Lebih jauh, artikel ini juga dimaksudkan untuk memahami bagaimana *emerging donor* merekonsiliasi kebutuhan untuk memperoleh dukungan domestik dengan kepentingan untuk memainkan peran yang signifikan dalam politik global dalam mengelola bantuan luar negeri yang mereka jalankan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dengan mencermati pengalaman Turki melalui *Turkish Cooperation International Agency* (TIKA) dan Thailand dengan *Thailand International Cooperation Agency* (TICA) sebagai contoh praktik pembangunan internasional oleh *Global South*. Kedua negara tersebut dipilih setidaknya karena dua alasan utama. *Pertama*, keduanya tergolong negara sedang berkembang yang memiliki sejarah yang cukup panjang dalam mengelola bantuan dan kerja sama internasionalnya. *Kedua*, Thailand dapat menjadi contoh menarik pengalaman negara sedang berkembang yang mencoba menjalankan kerja sama pembangunannya

mengikuti gaya dan model negara maju. Meskipun Turki dikategorikan sebagai *emerging donors*, namun berbeda dengan *emerging donors* yang lain, Turki merupakan anggota OECD dan menjadi bagian dari DAC (Cihangir-Tetik & Müftüler-Baç, 2021). Namun demikian, Turki dapat menjadi contoh negara sedang berkembang yang pada awalnya mengikuti langgam negara maju, namun dalam perkembangannya dapat menunjukkan karakteristik yang lebih menonjolkan karakter *Global South* dalam kerja sama pembangunan internasionalnya.

Oleh karena itu, tulisan ini secara khusus mengkaji alasan di balik transformasi, pengelolaan kelembagaan, dan juga praktik nyata dari kerja sama pembangunan internasional yang dikembangkan TIKa dan TICA. Dengan membandingkan pengalaman kedua lembaga tersebut, karenanya diharapkan dapat membantu memahami dilema yang dihadapi negara sedang berkembang yang bertransformasi dari negara penerima menjadi negara pendonor.

Kerangka Pemikiran: Perdebatan memahami *emerging donors*

Setidaknya dapat dipetakan tiga pendekatan untuk memahami motivasi dan alasan mengapa *Global South* mengembangkan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang berkontribusi pada munculnya *emerging donors*. Ketiga pendekatan tersebut adalah: *pertama*, pendekatan yang memfokuskan pada aspek normatif; *kedua*, pendekatan yang berbasiskan kepentingan material; *ketiga*, pendekatan yang menekankan pada dinamika politik domestik (Alvian, 2019). Meskipun ketiga pendekatan tersebut di beberapa kajian terutama dimaksudkan untuk memahami motivasi dan alasan di balik kemunculan aktivisme KSS, namun pendekatan-pendekatan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memahami strategi dan upaya *emerging donors* dalam merekonsiliasi kebutuhan untuk memastikan dukungan domestik dan tuntutan peran global.

Pendekatan normatif menggarisbawahi bahwa aktivisme *Global South* dalam KSS yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk

pemberian bantuan asing, merupakan refleksi dari solidaritas sesama negara Selatan yang terinspirasi dari ‘Semangat Bandung’ (Alvian, 2019). Motivasi dan alasan keterlibatan *Global South* dalam KSS mencerminkan kesadaran kolektif untuk membangun Selatan dengan daya dan upaya sendiri serta terbebas dari belenggu dominasi Utara. Selain itu, beberapa kajian juga menunjukkan bahwa KSS merupakan bentuk resistensi atas praktik dalam kerja sama pembangunan yang selama ini timpang antara Utara dan Selatan (Winanti & Alvian, 2019a).

Berangkat dari asumsi-asumsi tersebut, pendekatan normatif dapat digunakan untuk menjelaskan strategi apa yang dapat dikembangkan *Global South* dalam merekonsiliasi kepentingan melayani dukungan domestik dan memperteguh kiprah global mereka. Misalnya, melalui narasi pentingnya membangun solidaritas karena alasan kesamaan sejarah dengan negara tujuan penerima bantuan, dapat menjadi faktor krusial dalam memperoleh dukungan domestik.

Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki sejumlah kelemahan. Termasuk di antaranya kritik yang menyebutkan bahwa KSS ternyata menghadirkan dominasi dan ketergantungan baru di dalam Selatan-Selatan. Kondisi yang bertentangan dengan semangat solidaritas, prinsip emansipatoris dan kesetaraan yang disebut sebagai landasan normatif dalam KSS. Sejumlah keterbatasan negara Selatan sebagai *emerging donors* juga berkontribusi pada sulitnya mewujudkan praktik KSS yang ideal sebagaimana semula dibayangkan. Pendekatan normatif dibenturkan pada kenyataan bahwa dalam praktiknya, dorongan motivasi yang lebih mengedepankan kepentingan nasional dari *emerging donors* dalam KSS tidak terhindarkan.

Berbasis kritik terhadap pendekatan normatif yang dianggap tidak dapat memotret praktik KSS secara utuh, pendekatan berbasis material mencoba menawarkan pandangan yang lebih mencerminkan praktik yang berlangsung. Pendekatan ini berargumen bahwa KSS merupakan instrumen untuk mencapai kepentingan nasional dari para pelakunya (Alvian, 2019). Pendekatan ini menyebutkan

bahwa praktik KSS lebih banyak didorong oleh kepentingan nasional baik ekonomi maupun politik *Global South* terhadap sesama negara Selatan.

Melalui kaca mata kepentingan material tersebut, pendekatan ini berposisi bahwa agar dukungan domestik dapat diperoleh, KSS terutama dalam wujud bantuan asing, mestinya dapat diselaraskan dengan kepentingan ekonomi dan politik aktor domestik. Kepentingan ekonomi dapat tercermin dari KSS sebagai bagian dari upaya perluasan pasar, investasi, maupun mengamankan sumber daya yang merupakan kepentingan para pelaku bisnis domestik. Sedangkan kepentingan politik yang akan diraih dapat berupa pengaruh dan mendapatkan dukungan dalam pengambilan keputusan atau keanggotaan organisasi internasional tertentu, serta mengamankan kepentingan kedaulatan negara (Winanti et.al., 2023).

Seperti halnya pendekatan normatif, pendekatan yang berbasiskan kepentingan material juga memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya karena adanya kecenderungan dalam pendekatan ini yang melihat kepentingan nasional sebagai hal yang tunggal. Padahal kenyataannya, bagaimana mendefinisikan kepentingan nasional serta kepentingan siapa yang terwakili dalam kepentingan nasional tersebut dapat diperdebatkan.

Pendekatan yang ketiga berangkat dari pemahaman bahwa baik pendekatan normatif maupun pendekatan material tidak dapat memberikan penjelasan yang cukup komprehensif, terutama dalam menjawab strategi apa yang dapat dikembangkan *emerging donors* untuk merekonsiliasi kepentingan domestik dan peran globalnya. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa orientasi, motivasi, dan wujud KSS dapat ditelusuri dari kontestasi kepentingan berbagai aktor dalam politik domestik. Perubahan konstelasi politik domestik memengaruhi arah, tujuan atau target negara penerima bantuan, serta bagaimana bantuan dan kerja sama pembangunan dikelola (Tingley, 2010).

Studi yang dilakukan Leeds, Mattes dan Vogel (2009) juga menunjukkan secara lebih spesifik, pergantian kepemimpinan dalam suatu negara dapat memengaruhi orientasi dan komitmen internasional mereka. Pengalaman Turki menunjukkan bahwa perubahan kepemimpinan berimplikasi pada transformasi yang signifikan pada pengelolaan bantuan luar negerinya. Salah satu varian yang muncul dalam pendekatan yang menekankan politik domestik ini mencoba mengkombinasikan antara kepentingan nasional dari para aktor dominan (termasuk akses pasar) dan tataran ide (*value-based*) dalam konteks politik domestik di *emerging donor* (Baydag, 2024).

Tulisan ini memanfaatkan kombinasi antara pendekatan yang berbasis material atau kepentingan nasional dan pendekatan yang menekankan kontestasi aktor domestik dalam menjawab pertanyaan mengenai bagaimana *emerging donors* mengembangkan strateginya untuk mendapatkan dukungan domestik sekaligus menjalankan peran globalnya. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diperlukan terutama karena dua hal: *pertama*, keduanya saling berkaitan, menimbang bahwa kepentingan nasional sifatnya tidak monolitik, namun lebih mencerminkan kepentingan aktor atau kelompok yang paling dominan dalam konteks politik domestik. *Kedua*, kontestasi antaraktor domestik mencerminkan ragam kepentingan yang diusung oleh para aktor dan bagaimana kepentingan tersebut dapat muncul sebagai kepentingan yang dapat diklaim sebagai kepentingan nasional. Oleh karena itu, dengan mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana Thailand lewat TICA dan Turki melalui TIKTA merekonsiliasi kepentingan domestik dan peran global mereka.

Metode Riset

Artikel ini merupakan bagian dari riset dengan cakupan yang lebih luas yang difokuskan untuk merumuskan desain tata kelola Indonesian Aid bagi penguatan politik luar negeri Indonesia. Dalam menyusun rancangan tata kelola Indonesian Aid yang merupakan lembaga

pembangunan internasional yang baru berdiri di tahun 2019, riset tersebut mengkaji pengalaman negara sedang berkembang maupun negara maju dalam mengelola agensi serupa. Sebagai bagian dari riset tersebut, TIKTA dan TIKTA dipilih sebagai model *emerging donors* dari *Global South*. Penulis adalah koordinator tim peneliti untuk kajian tersebut dan sekaligus secara khusus bertanggung jawab melakukan analisis atas TIKTA dan TIKTA.

Dengan menganalisis praktik bantuan asing yang dijalankan kedua negara tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran secara substantif maupun teknis dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, pada gilirannya diharapkan dapat menjadi pelajaran penting bagi pengelolaan IndonesianAid sebagai pemain baru dalam lanskap pembangunan internasional.

Sebagai bagian dari riset yang lebih luas, pengambilan data dari riset yang berbasis kualitatif ini menginduk pada pengumpulan data riset besar tersebut. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melalui studi pustaka dan penyusunan anotasi bibliografi, *in-depth interview*, dan juga pelaksanaan *focus group discussion* dan *expert meeting*. Di dalam *in-depth interview* dengan salah satu pejabat dari kementerian terkait di Thailand, membantu mendapatkan informasi mengenai bagaimana perkembangan dan implementasi program-program TIKTA yang mencerminkan upaya akomodasi pemerintah Thailand atas kepentingan politik domestik dan peran yang lebih aktif di tingkat internasional.

Strategi dan Pengelolaan Agensi Pembangunan dalam Memperoleh Dukungan Domestik: Komparasi TIKTA dan TIKTA

Bagian ini didedikasikan untuk menganalisis strategi dan pengelolaan agensi pembangunan untuk dua negara yang menjadi fokus dari kajian ini, yaitu Thailand dan Turki. Untuk kebutuhan itu, beberapa aspek yang didiskusikan meliputi latar belakang terbentuknya dan pengelolaan lembaga/agensi pembangunan internasional

di masing-masing negara, fokus program, implementasi dan praktik nyata, pilihan atas negara target, *public engagement* di dalam negerinya masing-masing, serta tujuan politik/ekonomi jangka panjang yang ingin dicapai melalui program yang dijalankan. Lebih jauh, analisis atas strategi apa yang dikembangkan dalam membangun legitimasi domestik negara berkembang dalam menjalankan peran sebagai pendonor tersebut, dapat memberi kontribusi bagi kajian mengenai *emerging donors*.

a. Thailand International Cooperation Agency (TIKTA): *Emerging donors* sebagai instrumen mengatasi persoalan trans-border issues

Sebagai salah satu negara sedang berkembang yang tergolong cukup awal dalam menjalankan kebijakan bantuan asing, aktivitas bantuan internasional yang dilakukan pemerintah Thailand dapat dilacak kemunculannya sejak tahun 1963. Pemerintah Thailand mengembangkan berbagai macam program bantuan internasional dalam bentuk kerja sama teknis dengan sesama negara sedang berkembang (Agarwal, 2017). Kebijakan bantuan internasional yang dikembangkan oleh pemerintah Thailand lebih banyak difokuskan pada kerja sama teknis dan dilandasi semangat kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak penerima bantuan dan pemerintah Thailand. Pada awal tahun 1970-an, pemerintah Thailand mulai mengembangkan kerja sama dan memberikan bantuan yang disebut sebagai '*beyond neighborhood*' ketika pemerintah Thailand mulai memberikan bantuan ke negara-negara Afrika (Santikajaya & Sato, 2019). Meskipun aktivitas bantuan internasionalnya dapat dilacak sejak tahun 1960-an, namun pemerintah Thailand baru pada tahun 2002 secara resmi menyatakan beralih dari negara penerima menjadi negara pemberi bantuan (United Nations Volunteers (UNV) Programme. 2020).

Deklarasi tersebut ditandai dengan pembentukan *Thailand International Cooperation Agency* (TIKTA) yang menggantikan *Department of Technical and Economic Cooperation* (DTEC). DTEC merupakan unit

di bawah Kantor Perdana Menteri yang tugas utamanya mengelola bantuan internasional yang diterima Thailand sejak tahun 1950. Pembentukan TICA menempuh proses yang cukup panjang yang memakan waktu sekitar sepuluh tahun. Pada tahun 1992, pemerintah Thailand mendirikan *Thailand International Cooperation Program* (TICP) yang merupakan cikal bakal TICA. Untuk menopang kerja sama di bidang finansial, pemerintah Thailand mendirikan *Neighboring Economies Cooperation Fund* (NECF) pada tahun 1996 dan pada tahun 2005 bertransformasi menjadi *Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency* (NEDA). Berdasarkan penilaian Santikajaya dan Sato (2019), pelembagaan tersebut menduplikasi dua lembaga yang dibentuk pemerintah Jepang untuk mengelola bantuan luar negerinya. Kedua lembaga tersebut yaitu *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) (sebelum kedua lembaga tersebut dilebur pada tahun 2008) dan menjadi lembaga pendonor terbesar bagi Thailand.

Beberapa alasan di balik terbentuknya TICA dan deklarasi Thailand sebagai negara donor, antara lain (Santikajaya & Sato, 2019; Kondoh, et.al., 2010; Wajjwalku, 2014): *pertama*, deklarasi tersebut bersamaan dengan keinginan pemerintah Thailand agar pada masa pemerintahan Thaksin, dapat terpilih Sekjen PBB yang berasal dari Thailand. Menteri Luar Negeri Thailand Srakiat Sathirathai pada saat itu (tahun 2003) tengah dipromosikan menjadi kandidat Sekjen PBB. Keinginan tersebut merupakan refleksi dari ambisi pemerintah Thailand tidak hanya menjadi pemimpin regional melalui berbagai kerja sama pembangunan infrastruktur namun juga dipengaruhi kepentingan bisnis pribadi Thaksin.

Kedua, kebijakan pemerintah Thailand yang bertujuan untuk melakukan ekspansi perdagangan terutama dengan negara-negara tetangganya. Sekaligus juga melalui kerja sama yang dikembangkan dapat memitigasi dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas lintas perbatasan yang semakin meningkat tersebut. Berbagai perbatasan dengan beberapa negara yang relatif lebih rendah tingkat ekonominya,

menyebabkan Thailand menghadapi sejumlah tantangan tersendiri seperti isu keamanan, pekerja migran ilegal hingga penyakit menular. Oleh karena itu, bantuan internasional pemerintah Thailand lebih banyak difokuskan isu kesehatan dan pendidikan bagi negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Thailand.

Ketiga, ketika pemerintahan Thaksin pada bulan November 2002 mendeklarasikan '*no more aid*', pernyataan tersebut tidak sekedar merefleksikan kenaikan status Thailand dari negara penerima menjadi negara donor. Akan tetapi, sekaligus juga memberi sinyal pentingnya perubahan arah bantuan internasional dari negara-negara maju agar lebih diprioritaskan bagi negara-negara di sekitar Thailand yang lebih membutuhkan.

Sejak terbentuknya TICA, pemerintah Thailand semakin memperkuat berbagai program yang diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional jangka panjang dan strategi politik luar negerinya (United Nations Volunteers (UNV) Programme, 2020). Dengan menempatkan TICA di bawah Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Thailand menegaskan pentingnya kerja sama internasional sebagai bagian dari kebijakan luar negeri dan merupakan upaya untuk mengembangkan hubungan diplomatik yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Dalam menjalankan kebijakan bantuan luar negerinya, pemerintah Thailand memfokuskan diri pada penguatan kerja sama Selatan-Selatan dan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Bentuk kerja sama yang dikembangkan antara lain: pemberian bantuan dan pinjaman keuangan, pembangunan infrastruktur, perdagangan dan investasi, serta pengentasan kemiskinan, pengurangan dampak sosial, persoalan lingkungan hingga bantuan darurat (Santos, 2016).

Lokus area yang menjadi prioritas pemerintah Thailand adalah negara-negara tetangga terutama di wilayah sekitar Mekong untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut maupun ASEAN secara lebih luas (TICA, n.d.). Disparitas antara capaian pembangunan ekonomi di Thailand dan di negara sekitarnya (GDP Thailand mencapai

10 kali lipat dari negara-negara tetangganya) menyebabkan timbulnya arus imigran ilegal, kriminalitas yang lintas batas negara, serta ancaman penyakit menular. Oleh karena itu, memperkuat bantuan internasional ke negara-negara tersebut dipandang oleh pemerintah Thailand untuk mengatasi persoalan-persoalan *trans-border* yang dihadapinya (Kondoh, et. al, 2010). Di samping negara-negara yang berbatasan langsung seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV), negara penerima yang menjadi fokus tujuan bantuan pemerintah Thailand berikutnya adalah negara-negara Asia Selatan, Amerika Latin dan Afrika. Tujuan utama membangun kerja sama dengan negara-negara tersebut, selain untuk berkontribusi pada keamanan internasional juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pemerintah Thailand dalam meraih kesempatan di bidang ekonomi.

Pada dokumen yang dikeluarkan TICA pertama kali di tahun 2007, pemerintah Thailand menyebutkan setidaknya tiga tujuan utama dari *Official Development Assistance* (ODA) Thailand (Kondoh, et. al, 2010): *pertama*, mempromosikan kerja sama ekonomi dan keamanan terutama dengan negara-negara tetangga. *Kedua*, memenuhi tanggung jawab internasional. *Ketiga*, mengembangkan jejaring komunitas internasional. Dalam konteks ini, pemerintah Thailand menerapkan kebijakan bantuan asingnya lebih mendekati pada model atau pola yang dikembangkan negara-negara maju ketimbang mengembangkan model atau pola alternatif dalam kerja sama pembangunan internasionalnya. Di samping itu, posisi tersebut juga diperkuat dengan cukup seringnya beberapa konsep seperti ‘*governance*’ dan akuntabilitas muncul sebagai referensi kebijakan ODA Thailand. Thailand juga menunjukkan minatnya untuk bergabung pada DAC. Meskipun demikian, kebijakan ODA Thailand sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga dipengaruhi oleh pertimbangan posisi geografis.

Seiring dengan semakin berkembang dan luasnya kerja sama internasional yang dibangun pemerintah Thailand, cakupan kerja sama juga semakin berkembang. Semula hanya sekedar

pelatihan dan beasiswa, menjadi kerja sama yang pembangunan yang lebih luas termasuk transfer teknologi, pengembangan wilayah, hingga pengiriman volunteer untuk berbagai macam proyek pembangunan (TICA, n.d.). Dari sisi skema kerja sama yang dikembangkan juga mengalami perubahan. Dari relasi yang sifatnya bilateral “donor-penerima” menjadi lebih luas, kerja sama di tingkat regional maupun dalam bentuk kerja sama triangular yang melibatkan negara maju maupun organisasi internasional. Menimbang TICA belum mempunyai kantor perwakilan di negara tujuan, penyelenggaraan program bantuan dijalankan oleh perwakilan pemerintah/konsulat Thailand di negara tujuan.

Bentuk bantuan berupa barang, sumber daya manusia dan bantuan teknis dalam kerja sama internasional pemerintah Thailand merefleksikan kebijakan yang diambil hampir semua negara sedang berkembang. Bentuk bantuan tersebut tentunya berbeda dengan bentuk bantuan dari negara maju yang lebih banyak berupa bantuan keuangan. Dalam hal ini, sebagai *emerging donor* pemerintah Thailand menekankan bahwa bantuan internasional dapat dibangun dari apa yang dimiliki negara sedang berkembang yaitu sumber daya manusia, ‘*know-how*’ dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan dan kepentingan sesama negara sedang berkembang (Santos, 2016). Selain itu, bantuan teknologi yang diberikan juga merupakan teknologi yang dapat diadaptasikan dengan situasi dan kondisi di negara tujuan bantuan (Kondoh, et. al, 2010).

Dalam mengembangkan program bantuan internasionalnya, Pemerintah Thailand menerapkan prinsip kesetaraan dan menghindari penggunaan istilah donor sebagaimana yang berlangsung dalam relasi antara negara Utara dan Selatan. Untuk itu, pemerintah Thailand menggunakan istilah mitra dan mempromosikan aspek kemitraan yang relatif lebih setara.¹

¹ Penggunaan istilah “mitra” yang diutamakan ketimbang istilah “penerima bantuan” dalam skema kerja sama pembangunan internasional pemerintah Thailand juga ditegaskan oleh perwakilan dari Kementerian Perindustrian Thailand dalam wawancara secara daring pada 29 Agustus 2021. Kementerian Perindustrian terutama melalui Kantor Kerja Sama Ekonomi merupakan salah satu agensi pelaksana kerja sama pembangunan internasional Thailand di bawah koordinasi TICA.

Pemerintah Thailand juga menempatkan kerja sama pembangunan internasionalnya dalam kerangka memperkuat Kerja Sama Selatan-Selatan. Salah satu nilai yang dikembangkan adalah *Sufficiency Economy Principle* (SEP) yang merupakan pandangan alternatif pembangunan yang lebih berkelanjutan dan memperhitungkan kondisi lanskap geo-sosial negara penerimanya (TICA, n.d.). Meskipun SEP sebagai prinsip pembangunan ekonomi di Thailand telah diinisiasi oleh Raja Bhumibol Adulyadej sejak tahun 1972, namun baru mendapatkan momentum pasca krisis finansial melanda Asia di tahun 1997 – 1998 ketika SEP dianggap memberikan panduan dalam mengembangkan strategi bisnis baru yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks kerja sama pembangunan internasional, SEP menekankan tidak hanya pada pertumbuhan dan keuntungan ekonomi semata, namun juga pada pengembangan manusia dan pembangunan yang lebih berkelanjutan (United Nations Office for South-South Cooperation, 2017). Dalam implementasinya, pemerintah Thailand mengembangkan kerja sama pembangunan internasional berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya termasuk misalnya bagaimana menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan.

Di dalam menjalankan kebijakan kerja sama pembangunan internasionalnya, pemerintah Thailand juga menghadapi sejumlah tantangan secara internal. Sebagai negara berkembang, Thailand masih menghadapi sejumlah persoalan internal yang dapat menghambat optimalisasi kebijakan kerja sama pembangunan internasionalnya. Beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi, antara lain ((Kondoh, et. al, 2010): *pertama*, dengan meninggalkan statusnya sebagai negara penerima bantuan, pemerintah Thailand menyadari menyusutnya bantuan asing yang selama ini diperolehnya dari negara-negara maju, terutama dari Jepang. Berkurangnya bantuan asing tentu saja memengaruhi situasi perekonomian domestik di Thailand. *Kedua*, program-program bantuan asing masih terbatas pada inisiatif di tingkat pemerintah, terutama didominasi oleh tiga lembaga pemerintah yaitu

National Economic and Social Development Board (NESDB), Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Perluasan dukungan agar program bantuan internasional yang dijalankan tidak bersifat elitis masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Thailand.

Terlepas dari tantangan yang masih perlu ditangani pemerintah Thailand, dukungan domestik tidak terlalu menjadi persoalan bagi Thailand yang beralih dari penerima bantuan menjadi negara pendonor. Dilandasi oleh tujuan untuk mengatasi persoalan yang hadir akibat ketimpangan capaian pembangunan ekonomi antara Thailand dan negara-negara sekitarnya, model pembangunan kerja sama internasional yang dikembangkan pemerintah Thailand selaras dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Persoalan yang dihadapi oleh Thailand terkait dengan isu kemiskinan, kesehatan dan upaya untuk memitigasi masalah trans-border seperti imigran ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, dan penyakit menular, menjadi alasan utama pemerintah Thailand untuk mendeklarasikan dirinya sebagai negara donor dan melepas status sebagai negara penerima bantuan. Thailand menjadi salah satu negara sedang berkembang yang lebih awal melembagakan bantuan internasionalnya dalam mekanisme kelembagaan yang solid.

Dari kaca mata tujuan politik, penguatan kerja sama pembangunan internasional mencerminkan keinginan Thailand menjadi pemimpin regional dan memperkuat peran politik luar negerinya. Dari sisi kepentingan ekonomi, pemberian bantuan kepada negara-negara sekitarnya diharapkan dapat mengatasi persoalan kemiskinan dan pada gilirannya mengurangi risiko yang harus dihadapi pemerintah Thailand sendiri. Meskipun dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan internasionalnya, pemerintah Thailand cenderung mengadopsi mekanisme yang diterapkan negara maju, pemerintah Thailand juga memperkenalkan prinsip yang merefleksikan situasinya yang masih tergolong negara sedang berkembang dan pengalamannya yang pernah berstatus sebagai negara penerima bantuan. Melalui penerapan prinsip berkelanjutan dan *self-help*, pemerintah Thailand juga mengakui adanya kesetaraan

dalam relasi dengan negara penerima dan lebih terbuka atas kebutuhan dan kondisi negara penerima bantuan. Pada titik ini, kerja sama pembangunan internasional yang dikembangkan Thailand memiliki potensi yang besar bagi penguatan kerja sama Selatan-Selatan.

b. *Turkish Cooperation International Agency (TIKA): Signifikansi Politik Domestik bagi Penguatan Peran Emerging Donor*

Sebagaimana pengalaman Thailand, Turki dikategorikan sebagai negara sedang berkembang yang memiliki sejarah panjang dalam menerapkan kebijakan kerja sama internasionalnya. Seperti halnya Thailand, Turki juga pada derajat tertentu mengadopsi kerja sama pembangunan internasionalnya sejalan dengan pendekatan yang dikembangkan negara-negara maju yang tergabung dalam DAC. Kondisi ini dapat dipahami, menimbang bahwa Turki adalah salah satu negara yang secara reguler mengikuti pertemuan-pertemuan DAC. Meskipun demikian, dibandingkan dengan Thailand, Turki lebih kuat dalam menonjolkan narasi '*the Global South*' terutama sejak tahun 2000-an.

Narasi kerja sama Selatan-Selatan dalam skema bantuan internasional Turki tercermin dari gagasan untuk mengembangkan kerja sama berdasarkan alasan sejarah dan kedekatan kultural terutama yang terkait dengan *Ottoman Empire* (Baydag, 2021). Gagasan tersebut diwujudkan dalam fokus utama dari bantuan internasional Turki yang berupa program humanitarian terutama ditujukan untuk negara-negara tetangganya. Dengan mengedepankan prinsip '*zero problem with the neighbors*', pemerintah Turki mencanangkan diplomasi perdamaian secara proaktif dan keterlibatan aktif di dalam berbagai persoalan global serta organisasi internasional (Kulaklikaya & Nurdun, 2010).

Berakhirnya Perang Dingin berimplikasi pada perubahan mendasar orientasi politik luar negeri Turki yang semula lebih menekankan pada isu keamanan tradisional, mulai beralih pada isu yang lebih berorientasi pada aspek ekonomi dan perdagangan (Donelli & Levaggi, 2016). Kebijakan luar negeri Turki dengan kata

lain mulai bertransformasi dari yang semula lebih menekankan pada "respons atas ancaman keamanan" menjadi lebih menekankan pada keterlibatan yang aktif di kawasan baik berupa kerja sama ekonomi maupun bantuan kemanusiaan.

Salah satu implikasi dari berakhirnya Perang Dingin bagi Turki adalah kemunculan negara-negara baru yang merupakan '*Turkic state*' di Caucasus dan Asia Tengah setelah runtuhnya Uni Soviet. Sambil mempromosikan model pembangunan ala Turki (atau kerap disebut *Turkish Model*) yang menekankan pada demokratisasi dan pembangunan sosial ekonomi, Turki mulai mengembangkan bantuan internasionalnya di kawasan tersebut (Özkan & Demirtepe, 2012). Negara tujuan utama bantuan internasional Turki adalah Afghanistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, dan Pakistan yang menerima sekitar 40% dari total dana bantuan Turki. Bantuan internasional Turki yang terkonsentrasi pada negara-negara tersebut merefleksikan motivasi utama bantuan internasional yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan strategis Turki di wilayah Asia Barat (Kulaklikaya & Nurdun, 2010). Antara tahun 2006 hingga 2008 menunjukkan bahwa prioritas bantuan internasional Turki ke negara-negara tersebut tidak berubah. Dengan kata lain hal ini menunjukkan kepentingan luar negeri Turki di Kawasan tersebut yang juga tidak berubah.

Untuk melembagakan kerja sama pembangunan internasionalnya tersebut, pemerintah Turki mendirikan *Turkish International Cooperation and Development Agency* (TIKA) pada tahun 1992. Para pemimpin Turki pada waktu itu percaya bahwa efektivitas pelaksanaan kerja sama bantuan internasional hanya akan dapat tercapai melalui pembentukan lembaga resmi yang secara khusus menangani bantuan internasional (Kulaklikaya & Nurdun, 2010). TIKA dibentuk sebagai Direktorat Ekonomi, Budaya, Pendidikan, Kerja Sama Teknis di bawah Kementerian Luar Negeri. Tujuan utama dari TIKA adalah: *pertama*, memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara berbahasa Turki dan negara yang berbatasan langsung dengan Turki. *Kedua*,

untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tersebut melalui berbagai macam proyek dan program di bidang ekonomi, perdagangan, bantuan teknis, sosial, kultural dan Pendidikan (Özkan & Demirtepe, 2012).

Bagi elit politik Turki pada saat itu, ikatan sejarah menghadirkan kewajiban tersendiri bagi Turki untuk membantu negara-negara berbahasa Turki yang baru saja lepas dari Uni Soviet untuk memulai proses *nation-building* mereka. Program-program bantuan internasional yang dijalankan oleh pemerintah Turki lebih banyak didorong oleh kepentingan politik ketimbang berbasiskan kepentingan non-politik. Oleh karena itu, melalui TIKa diharapkan tujuan-tujuan politik luar negeri Turki di negara-negara tersebut dapat tercapai. Negara-negara Barat memberikan dukungan mereka atas inisiatif Turki untuk memberikan bantuan ke negara-negara berbahasa Turki di kawasan tersebut, karena '*Turkish Model*' dianggap lebih moderat ketimbang jika Iran yang menjalankan program-program *nation building* di sana (Özkan & Demirtepe, 2012; Guo, 2020).

Dalam perkembangannya, pencapaian tujuan-tujuan tersebut dinilai tidak efektif. Ketidakefektifan TIKa dalam menjalankan misinya tersebut bermuara pada ketidakstabilan politik dalam negeri Turki akibat dari terjadinya intervensi militer dan koalisi pemerintahan yang rapuh sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik (Özkan & Demirtepe, 2012). Sejak didirikan, dapat dikatakan bahwa TIKa tidak menjalankan fungsinya dengan optimal dan bahkan tidak menjadi pilar utama dari program bantuan internasional Turki sebagaimana dirancang pada saat pendiriannya (Guo, 2020). Perubahan pengelolaan TIKa yang lebih baik baru tampak pada awal tahun 2000-an sekitar hampir sepuluh tahun setelah TIKa berdiri.

Awal tahun 2000-an menandai terjadinya perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan TIKa. Setelah dilanda krisis ekonomi dan terpilihnya pemerintahan yang lebih solid di bawah kepemimpinan partai politik AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*), memberi peluang bagi pemerintah Turki melakukan beberapa pembenahan domestik termasuk pengelolaan

TIKA dan orientasi politik luar negeri yang lebih terarah (Özkan & Demirtepe, 2012; Guo, 2020; Kulaklıkaya & Nurdun, 2010). Sejak saat itu, Turki juga mulai memperluas jangkauan bantuan internasional dari negara tujuan tradisionalnya yaitu negara-negara di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, diperluas ke negara di kawasan sub-sahara Afrika, Kyrgyzstan, dan Haiti. Selain itu, tahun 2004 menandai diterapkannya '*Opening Up to Africa*' oleh pemerintah Turki (Kulaklıkaya & Nurdun, 2010). Perluasan negara tujuan bantuan internasional tersebut menandai peneguhan sikap Turki yang tengah membangun reputasi dalam kerja sama Selatan-Selatan (Özkan, 2018). Beberapa kategori bantuan pembangunan yang diselenggarakan TIKa termasuk proyek kerja sama teknis, investasi langsung, pinjaman, bantuan kemanusiaan, pembangunan perdamaian, dan kontribusi pada berbagai organisasi internasional untuk mendukung program-program bersama di tingkat internasional (Özkan, 2013).

Di samping perbaikan dalam tata kelola TIKa dan perluasan wilayah tujuan bantuan, perubahan mendasar lainnya juga ditunjukkan dengan pelibatan aktor yang lebih luas di luar pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan bantuan internasional. Keterlibatan organisasi non-pemerintah seperti misalnya *the Turkish Diyanet Foundation* (TDF) sebuah lembaga amal berbasis agama yang menyediakan perlengkapan rumah ibadah dan bekerja di bawah Direktorat Urusan Keagamaan (Guo, 2020). Sementara itu, sektor swasta yang baru pulih dari krisis juga mulai banyak terlibat dan berkepentingan untuk melakukan ekspansi pasar ke negara-negara berkembang lainnya (Kulaklıkaya & Nurdun, 2010).

Revitalisasi TIKa sejak awal tahun 2000-an juga ditandai dengan peningkatan signifikan dari dana yang digelontorkan pemerintah Turki untuk bantuan internasionalnya. Peningkatan dana bantuan ini juga menunjukkan adanya perbaikan pengumpulan data dan laporan terkait dengan dana bantuan internasionalnya (Kulaklıkaya & Nurdun, 2010). Lebih jauh, peningkatan dana bantuan sejak awal tahun

2000-an juga disebabkan karena meningkatnya kesadaran dan keterlibatan NGOs dalam program bantuan luar negeri. Pada tahun 2006, Turki menduduki ranking kedua di bawah Korea dalam hal jumlah dana bantuan internasionalnya.

Salah satu aspek menarik dari pelaksanaan kerja sama pembangunan internasional Turki adalah pilihan untuk memfokuskan pada bantuan kemanusiaan (Özkan, 2013). Pilihan tersebut didasarkan pada setidaknya tiga alasan utama (Guo, 2020). *Pertama*, dengan mengemas bantuan internasional sebagai aksi kemanusiaan lebih memudahkan untuk mendapatkan dukungan domestik. *Kedua*, bantuan kemanusiaan yang ditujukan terutama untuk negara-negara tetangganya yang tengah menghadapi masalah radikalisme dan terorisme berkontribusi untuk mencapai tujuan keamanan regional yang ingin dicapai Turki. *Ketiga*, meskipun tidak sekuat dorongan untuk mendapatkan dukungan domestik dan isu keamanan, tujuan ekonomi juga menjadi salah satu motivasi yang menjadikan bantuan kemanusiaan Turki sebagai fokus bantuan internasionalnya. Dalam konteks ini, negara-negara target bantuan kemanusiaan menjadi tujuan ekspansi ekonomi perusahaan-perusahaan nasional Turki.

Aktivisme Turki dalam menjalankan berbagai macam program bantuan internasional, tidak bisa dilepaskan dari keinginan pemerintah Turki untuk menjadi anggota DAC (Özkan, 2013). Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menjalankan program-program bantuan internasional dikelola berbasiskan agenda dan tata kelola pembangunan internasional yang berlaku di tingkat global. Namun demikian, dibandingkan dengan beberapa negara pendonor lain, Turki lebih berkonsentrasi pada isu pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, yang menunjukkan kebutuhan dasar. Pilihan atas isu-isu tersebut menunjukkan kepekaan Turki dalam menjalankan program bantuan internasionalnya yang lebih mengakomodasi kebutuhan negara penerima bantuan (*demand-driven aid policy*) (Kulaklikaya & Nurdun, 2010).

Pengalaman Turki menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan internasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik domestik yang berkembang (Kavakli, 2018). Situasi politik domestik yang lebih stabil berkontribusi pada penyelenggaraan bantuan internasional yang lebih solid dan terarah. Selain itu, strategi pemerintah Turki yang memfokuskan bantuan internasionalnya untuk menangani isu-isu kemanusiaan tampaknya berhasil untuk memperoleh dukungan domestik yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor non-negara yang semakin luas.

Pengalaman Turki juga merefleksikan upaya *emerging donor* untuk merekonsiliasi antara keinginan dan kebutuhan yang berbeda. Yaitu antara keinginan agar mendapat rekognisi dengan menerapkan mekanisme bantuan internasional yang sudah mapan. Sedangkan di sisi lain, pentingnya upaya untuk menegaskan jati diri dalam kerja sama internasionalnya yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan domestiknya. Seperti halnya Thailand, kerja sama pembangunan yang dikembangkan Turki juga memiliki potensi yang besar bagi penguatan kerja sama Selatan-Selatan.

Tabel: Perbandingan *Emerging Donors*: TICA dan TIKa

	Thailand International Cooperation Agency (TICA)	Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA)
Bentuk Bantuan Internasional	Berfokus pada pemberian bantuan dan pinjaman keuangan, pembangunan infrastruktur, penanganan isu-isu perbatasan	<i>Demand-driven aid policy</i> dan berfokus pada bantuan kemanusiaan

	Thailand International Cooperation Agency (TICA)	Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA)
Negara atau wilayah target	Negara tetangga (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam) lalu diperluas ke Asia Selatan, Amerika Latin dan Afrika	<i>Turkic state</i> , lalu diperluas ke sub-Sahara Afrika, Kyrgyzstan dan Afrika
Posisi kelembagaan	Di bawah Kementerian Luar Negeri	Di bawah Kementerian Luar Negeri
Model kerja sama	Cenderung menduplikasi model DAC	Tidak sepenuhnya duplikasi model DAC
Tujuan	Politik: keinginan menjadi pemimpin regional Ekonomi: Mengatasi persoalan <i>trans-border</i> and mitigasi risiko	Politik: mendapatkan dukungan domestik, mitigasi isu radikalisme dan terorisme Ekonomi: ekspansi ekonomi perusahaan nasional

Sumber: Winanti, P.S. (2021). Belajar dari Pengalaman *Emerging Donors*: TICA dan TIKA. IIS Policy Brief Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia, Issue 03/2021.

Kesimpulan

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana *emerging donors* yang berasal dari *Global South* merekonsiliasi kepentingan untuk mendapat dukungan domestik dengan tuntutan untuk semakin berkiprah dalam politik global. Pertanyaan ini muncul karena status negara sedang berkembang dengan berbagai karakteristik yang melekat padanya, menyebabkannya sebagai *emerging donors*

menghadapi tantangan yang berbeda dengan negara pendonor tradisional yang telah lebih dulu mapan. Salah satunya adalah memastikan dukungan domestik bagi kiprahnya yang baru tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini memanfaatkan kombinasi pendekatan yang menekankan pada kepentingan material dan pendekatan yang berfokus pada kontestasi aktor politik domestik.

Berdasarkan pengalaman Thailand melalui TICA dan Turki dengan TIKA, dukungan domestik dapat diperoleh ketika bantuan luar negeri yang diterapkan dapat memenuhi setidaknya beberapa kriteria berikut: *pertama*, berkontribusi langsung dalam menyelesaikan masalah domestik yang tengah dihadapi. Seperti misalnya, pemerintah Thailand menyadari sepenuhnya perubahan status dari negara penerima menjadi negara donor ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi negara-negara tetangganya. Pada gilirannya, bantuan tersebut diharapkan dapat meminimalisir munculnya *transborder issues* seperti persoalan kemiskinan, penyakit menular, imigran ilegal yang dapat merugikan Thailand. Dengan mendudukkan bantuan internasional sebagai bagian dari upaya memitigasi persoalan yang dapat dihadapi Thailand, dukungan domestik dapat diperoleh. Sedangkan pengalaman Turki menunjukkan arah dan orientasi bantuan internasionalnya dipengaruhi oleh kebutuhan untuk merespons persoalan domestik. Dari semula lebih berorientasi mencapai tujuan strategis politik keamanan, mulai bergeser ke kepentingan ekonomi dan kemanusiaan, seiring dengan perubahan dalam konstelasi politik domestiknya.

Kedua, bantuan internasional dirancang sejalan dengan kepentingan elit politik yang kemudian diklaim menjadi kepentingan nasional. Pengalaman Turki menunjukkan bahwa pada awal upayanya menjadi *emerging donors*, elit politik di Turki menggunakan solidaritas sebagai sesama negara berbahasa Turki untuk mendapatkan dukungan domestik dalam membantu sejumlah negara eks Uni Soviet. Demikian pula dengan Thailand, orientasi pembangunan internasional dan

perubahan kelembagaan yang mengiringinya, sejalan dengan kepentingan politik dan ekonomi elit politiknya.

Ketiga, dukungan domestik dapat diperoleh apabila program kerja sama bantuan internasional dapat berkontribusi pada pencapaian kepentingan ekonomi aktor politik domestik. Baik Thailand maupun Turki, menunjukkan keduanya dapat menyelaraskan program bantuan internasionalnya dengan kepentingan untuk membuka akses pasar untuk perdagangan dan investasi pebisnis nasional mereka.

Pengalaman kedua negara tersebut memberikan pelajaran yang penting bagi negara yang berasal dari *Global South* yang memiliki keinginan untuk berkiprah menjadi pendonor. Agar mendapatkan dukungan domestik yang luas, kebijakan bantuan luar negeri perlu diselaraskan dengan capaian kepentingan nasional dan melayani kepentingan aktor politik domestik. Selain itu, pengalaman kedua negara juga menunjukkan perubahan konstelasi politik domestik berpengaruh signifikan terhadap kebijakan luar negeri yang diadopsi, termasuk arah dan orientasi bantuan internasional.

Meskipun demikian, dorongan yang kuat untuk memastikan dukungan domestik dalam menjalankan kerja sama pembangunan internasionalnya terutama berupa pemberian bantuan asing, menghadirkan tantangan tersendiri bagi *emerging donors*. *Emerging donors* dapat terjebak untuk lebih berorientasi pada kepentingan domestiknya ketimbang mengimplementasikan program yang berbasis prinsip *recipient-driven*. Dalam situasi semacam itu, semangat untuk mengadvokasikan perubahan relasi di tingkat global yang lebih setara antara pemberi donor dan penerima donor, akan lebih sulit untuk diterapkan.

Oleh karena itu, ambisi *emerging donors* untuk mendorong perubahan mendasar dalam konstelasi pengembangan kerja sama pembangunan internasional yang lebih setara dan mengedepankan aspek partisipasi aktif dari *recipient* hanya dapat terwujud dengan syarat. Yakni, apabila *emerging donors* dapat

menyeimbangkan kebutuhan untuk melayani kepentingan aktor politik domestik yang dominan, dengan kebutuhan dan kepentingan negara penerima.

Daftar Pustaka

- Altinbas, D. (2013). South-South Cooperation: A Counter Hegemonic Movement? Dalam J. Dargin (Ed.), *The Rise of the Global South: Philosophical, Geopolitical, and Economic Trends of 21st Century* (hlm. pp. 29–65). World Scientific Publishing.
- Alvian, R. A. (2019). Menjelaskan Kerja Sama Selatan-Selatan: Sejumlah Perspektif. Dalam Winanti, P.S. dan Alvian, R.A. (Eds.), *Kebangkitan the Global South Strategi, Implementasi dan Implikasinya bagi Tata Kelola Ekonomi Politik Global*. Graha Ilmu.
- Agarwal, A. (2017). Thailand's International Development Cooperation. *Jindal Journal of Public Policy*, 3(1), 145–159.
- Apresian, S. R. (2016). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen Peningkatan Indonesia di Tingkat Global. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 12(2), 182–203.
- Baydag, R. M. (24 Nov 2024). Domestic Ideas and Interests in Development Cooperation of Emerging Donors: the Case of Mexican Development Policy. *Contemporary Politics*, DOI: 10.1080/13569775.2024.2428529.
- Baydag, R. M. (2021). Middle Powers in International Development Cooperation: Assessing the Roles of South Korea and Turkey. Dalam Chaturvedi, S. et. al (Eds.) *The Palgrave Handbook of Development Cooperation for Achieving the 2030 Agenda*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Cihangir-Tetik, D. and Müftüler-Baç, M. (2021). A Comparison of Development Assistance Policies: Turkey and the European Union in Sectoral and Humanitarian Aid. *Journal of European Integration*, 43(4), 439– 457.
- Donelli, F. & Levaggi, A. G. (2016). Becoming Global Actor: The Turkish Agenda for the Global South. *Rising Powers Quarterly*. 1(2), 93–115. <https://risingpowersproject.com/quarterly/becoming-global-actor-turkish-agenda-global-south/>

- Dreher, A., Fuchs, A, and Nunnenkamp, P. (2013). New Donors. *International Interactions*, 39(3), 402–415. DOI: 10.1080/03050629.2013.784076.
- Dreher, A., and Fuchs, A. (2011). Rogue Aid? The Determinants of China's Aid Allocation. Courant Research Centre, "Poverty, Equity and Growth". Discussion Paper 93. Göttingen, Germany: University of Göttingen. Tersedia di <https://core.ac.uk/download/pdf/207110796.pdf> (diakses tanggal 15 Maret 2021).
- Guo, X. (2020). Turkey's International Humanitarian Assistance during the AKP Era: Key Actors, Concepts and Motivations. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 14(1), 121–140. DOI: 10.1080/25765949.2020.1728974
- Gray, K., & Gills, B. K. (2016). South–South Cooperation and the Rise of the Global South. *Third World Quarterly*, 37(4), 557–574. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1128817>
- IBON Foundation, Inc. (2010). *South-South Cooperation: A Challenge to the Aid System? The Reality of Aid, Special Report on South-South Cooperation*. Quezon City: IBON Books.
- Kavakli, K. (2018). Domestic Politics and the Motives of Emerging Donors: Evidence from Turkish Foreign Aid. *Political Research Quarterly*, 71(3), 614–627 <https://www.jstor.org/stable/45106686>
- Kondoh, H., et. al. (2010). Diversity and Transformation of Aid Patterns in Asia's Emerging Donors. Dalam Kondoh, H., et. al. *Impact of Non-DAC Donors in Asia: A Recipient's Perspective* (hlm. 25-29). Tersedia di https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/workingpaper/jrft3q000000237u-att/JICA-RI_WP_No.21_2010.pdf (diakses tanggal 15 Februari 2020).
- Kulaklikaya, M., dan Nurdun, R. (2010). Turkey as a New Player in Development Cooperation. *Insight Turkey*, 12(4), 131–145. Tersedia di <http://www.jstor.org/stable/26331503> (diakses 3 May 2021).
- Leeds, B. A, Mattes, M. and Vogel, J. S. (2009). Interests, Institutions, and the Reliability of International Commitments. *American Journal of Political Science*. 53(2), 461–476. <https://www.jstor.org/stable/25548129>
- Muhr, T. (2016) 'Beyond "BRICS": Ten Theses on South-South Cooperation in the Twentieth-First Century', *Third World Quarterly*, 37(4), 630–648.
- Özkan, G. & Demirtepe, M. T. (2012). Transformation of a Development Aid Agency: TIKA in a Changing Domestic and International Setting. *Turkish Studies*, 13(4), 647–664. DOI: 10.1080/14683849.2012.746442.
- Özkan, M. (2018). Turkey in South-South Cooperation: New Foreign Policy Approach in Africa. *Prospects for South-South Cooperation: 40th Anniversary of the Buenos Aires Plan of Action*. 18(3), 565–578.
- Özkan, M. (2013). Does "Rising Power" Mean "Rising Donor"? Turkey's Development Aid in Africa. *Africa Review*, 5(2), 139–147. DOI: 10.1080/09744053.2013.855358.
- Quadir, F. (2013). Rising Donors and the New Narrative of "South–South" Cooperation: What Prospects for Changing the Landscape of Development Assistance Programmes? *Third World Quarterly*, 34(2), 321–338.
- Rowlands, D. (2008). *Emerging Donors in International Development Assistance: A synthesis Report*. Partnership & Business Development Division. Tersedia di <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/57509/IDL-57509.pdf?sequence=2&isAllowed=y> (diakses tanggal 1 Maret 2021).
- Santikajaya, A. dan Sato, J. (2019). Variety of Middle-Income Donors: Comparing Foreign Aid Approaches by Thailand and Indonesia. *Development Cooperation by Emerging Countries* 180. pp. 1-37. Tersedia di https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/workingpaper/wp_180.html (diakses tanggal 1 Maret 2021)
- Santander, G. dan Alonso, J.A. (2018) Perceptions, Identities and Interests in South-South Cooperation: the Cases of Chile, Venezuela, and Brazil. *Third World Quarterly*, 39(10), 1923–1940.
- Santos, L. A. (2016). South-South Cooperation at Work: Inside Thailand's Aid. Devex. Tersedia di <https://www.devex.com/news/south-south-cooperation-at-work-inside-thailand-s-aid-88813> (diakses tanggal 5 Maret 2021).

- Six C. (2009). The Rise of Postcolonial States as Donors: a Challenge to the Development Paradigm? *Third World Quarterly*, 30(6), 1103–1121.
- TICA. (n.d.). Development Cooperation Under TICA. Tersedia di <https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/page/40614-what-is-oda?menu=5f477688c43a3157b9539d2a> (diakses tanggal 10 Maret 2021).
- Tingley, D. (2010). Donors and Domestic Politics: Political Influences on Foreign Aid Effort. *The Quarterly Review of Economics and Finance* 50, 40–49. DOI: 10.1016/j.qref.2009.10.003.
- United Nations Office for South-South Cooperation. (2017). South-south cooperation and sustainability: Experiences from Thailand. *South-South in Action Sustainability in Thailand: Experiences from Thailand* (hlm. 25–39). New York: UNDP.
- United Nations Volunteers (UNV) Programme. (2020). Thailand: Friends from Thailand Programme – Volunteerism Policy and Strategy for Sharing a Home-grown Development Approach through South-South cooperation. Dalam *South-South in Action - South-South Volunteering as a Driving Force for Development: Experiences from Asia and the Pacific* (hlm. 25–32). United Nations Office for South-South Cooperation. Tersedia di <https://www.southsouth-galaxy.org/wp-content/uploads/2020/09/SSiA-UNV-FINAL-Web.pdf> (diakses tanggal 5 Maret 2021)
- Wajjwalku, S. (2014). Thailand's Development Cooperation with Neighbouring Countries: Cordial Relations and Economic Integration in the Mekong sub-region. Dalam Martinet, L. & Mulakala, A. *The Rise of Asian Emerging Providers: New Approaches to Development Cooperation in Asia?* (hlm. 53–73). Agence Française de Développement.
- Winanti, P.S., et.al (2023). *Dokumen Masukan Naskah Kebijakan Strategi Pemberian Hibah Jangka Menengah Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)*. Yogyakarta: Institute of International Studies.
- Winanti, P.S. (2021). Belajar dari Pengalaman *Emerging Donors: TICA dan TIKA. IIS Policy Brief* Issue 03/2021. Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia.
- Winanti, P. S., dan Alvian, R. A. (2019a). Indonesia's South–South Cooperation: When Normative and Material Interests Converged. *International Relations of the Asia-Pacific*, 21(2, May), 201–232, ISSN: 1470-482X. DOI: <https://doi.org/10.1093/irap/lcz021>
- Winanti, P. S & Alvian, R. A. eds. (2019b). *Kebangkitan the Global South Strategi, Implementasi dan Implikasinya bagi Tata Kelola Ekonomi Politik Global*. Graha Ilmu. ISBN: 978-623-228-238-4.
- Woods, N. (2008). Whose Aid? Whose Influence? China, Emerging Donors and the Silent Revolution in Development Assistance. *International Affairs*, 84(6), 1205–1221.

THE POTENTIAL OF SOCIAL VULNERABILITY IN THE IMPLEMENTATION OF THE 2024 ELECTIONS IN YOGYAKARTA CITY

Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, Anisya Ratna Komalasari, Anisa Nurwidia Akbari,
Salsabila Mufhidah

Universitas Gadjah Mada
Email: alfath.bagus.p@mail.ugm.ac.id

Accepted: 11 Desember 2024; Revised: 14 Desember 2024; Approved: 17 Desember 2024

Abstract

This article analyses the potential for social vulnerability caused by deep-rooted political conflicts involving two political parties with large mass bases in Yogyakarta. This research aims to describe the potential for social vulnerability conflicts during elections and conflict prevention strategies ahead of the 2024 elections in Yogyakarta based on a historical review of several previous elections. Mixed research methods were used through surveys and in-depth interviews. The results show that social vulnerability in implementing elections in Yogyakarta City comes from ideological differences and friction of economic interests. The election vulnerability mapping by researchers shows that the Notoprajan and Warungboto sub-districts have the highest level of vulnerability. Meanwhile, 43 other sub-districts are shown to have moderate social vulnerability. In addressing social vulnerability in the 2024 General Election, it is crucial to take a holistic and collaborative approach involving the government, election organisers, election participants, sympathizers, security apparatus and the community.

Keywords: Social vulnerability, 2024 Elections, Yogyakarta

Introduction

General elections are essential to democratic systems worldwide, including in Indonesia. The city of Yogyakarta, known as a city of education and culture, is a place for election events that cannot be separated from the potential for conflict that continues to overshadow the implementation of elections in Indonesia, including the 2024 elections. However, in every local and national election, social insecurities can always influence the smoothness of the democratic process and the quality of elections. Therefore, identifying and understanding the factors contributing to social vulnerability in elections in Yogyakarta is very important.

Various literature and critical notes on implementing elections in several periods in Indonesia, including Yogyakarta City, several strategic issues are still a significant problem in implementing elections, such as money politics, SARA (ethnicity, religion, race, and intergroup)

politicisation, social media campaigns, and ASN neutrality (Bawaslu, 2023; Kertati, 2020). The election organiser, in this case, the Election Supervisory Agency or Bawaslu, has compiled a vulnerability indicator to mitigate election problems.

The Bawaslu design is the Election Vulnerability Index (IKP), which has four dimensions: the socio-political context, election administration, contestation, and participation. The preparation of the IKP helps project and detect potential election infractions so that election prevention and supervision programmes can be prepared. As a multicultural region, DIY has a moderate IKP category and a score of 43.021. This value certainly affects the IKP value of Yogyakarta City. As the centre of Yogyakarta's government and economy, Yogyakarta City is the most influential barometer, even enhancing the potential for election vulnerability in Yogyakarta City in 2024.

High migration influences the social vulnerability of Yogyakarta City flows that increase the diversity of identities and cultures that grow in it. This situation encourages the diversity of views and political ideologies among the people of Yogyakarta. The heterogeneous characteristics of urban communities create a variety of gaps that place a community in a socially vulnerable situation so that the possibility of conflict in political contestation becomes even higher.

The most easily identified social vulnerability in the election was the friction involving various organizations PDI-P and PPP party sympathisers. The conflict initially stemmed from ideological differences between nationalist and religious groups. This friction has become a deep-rooted and historical problem. This has caused the social vulnerability map to be a red party in several relatively permanent locations such as Ngabean, Jogokariyan, or Warungboto.³ This situation of vulnerability makes people in these areas very vulnerable to various forms of electoral malpractice because they are the location of tangent points between groups.

Potential vulnerability in implementing elections can occur vertically and horizontally. To a certain degree, people's sensitivity to differences will increase in line with various electoral infractions. Election malpractice is an incident that has occurred for a long time and has not been appropriately resolved. Therefore, the potential for new conflicts is still likely to arise in the 2024 elections. Research activities on social vulnerability in the 2024 elections in Yogyakarta City are expected to increase stakeholders' understanding of the challenges faced and early mitigation steps to maintain the stability and integrity of elections and strengthen democracy in the region.

This paper aims to analyse and elaborate the mapping of potential conflicts of election vulnerability and conflict prevention strategies for the 2024 election vulnerability in Yogyakarta. The location of this research is 14 sub-districts in Yogyakarta City with the potential for election vulnerability.

The first local election in Yogyakarta City faced challenges in preparing for the first election, namely the high illiteracy rate and the low political awareness of the people. The regional election committee organised the election in stages or indirectly, even though Law No. 7/1950 and Government Regulation No. 36/1950 had made direct elections possible. Another obstacle was security issues, where the central government declared a "State of Danger" or *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) through Law No 6/1946 because of the Madiun Incident. Therefore, political parties were cautious about socialisation and campaigns during the elections.

However, the 1951 elections could run well and safely. The participation rate was relatively high at 52%, although in the shadow of a high illiteracy rate and low socialisation of parties taking part in the election. The conduciveness of the elections in DIY in 1951 was inseparable from the character of the Javanese people, who were "njawani" and gentle (Salim, 2018). This character will certainly affect subsequent elections, including the upcoming 2024 elections.

Implementing elections in Yogyakarta City in 2019 still needed to correct several problems. First, there was tension between the PDI-P and PPP parties, where conflicts between sympathisers still occurred from the campaign period to the voting. Second, there needed to be a higher voter turnout, around 600,000 of 2.7 million DIY citizens did not exercise their voting rights in the 2019 elections.

Third, fanaticism towards certain ideologies risks increasing the vulnerability of identity politics. The heterogeneous city of Yogyakarta is very vulnerable to identity politics issues that attack certain religions and races. Fourth, determining voter data in the Provisional Voter List or DPS Election defined by the KPU of Yogyakarta City has many problematic data findings. These various problems illustrate the social vulnerability in the 2019 elections in Yogyakarta City. Other forms of electoral malpractice will still colour the dynamics of the upcoming 2024 elections.

This paper uses a social mapping research design, which is a method of collecting data and information, both secondary and primary, to obtain information on geographical, sociocultural, economic, technical, and community institutional conditions and identify community characteristics in certain areas that will be used as target areas for planned programs.

The location of this research is Yogyakarta City, with a research focus on political vulnerability during the previous elections. The research output comprises social and political conflicts during the election period in Yogyakarta City, involving the voting public, election contestants, political parties, government institutions organising elections, and those related to security.

The method used in this research is mixed methods, combining two forms of research: qualitative and quantitative. Diverse research is used simultaneously to obtain more comprehensive, valid, reliable and objective data.

Qualitative data was obtained using an interview method with relevant OPDs, including Bhabinkamtibmas in Yogyakarta City, the National Unity and Political Agency of Yogyakarta City, the Election Supervisory Agency of Yogyakarta City, the General Election Commission of Yogyakarta City, and representatives of political parties contesting the 2019 elections in Yogyakarta City. Meanwhile, quantitative data sources are collected from historical data on legislative and regional election conflicts from various online media from 2004 to 2019. Secondary data sources were also collected from literature studies, books, journals, research, laws and regulations, and additional data from related parties.

The data analysis carried out in this research uses two approaches, namely qualitative and quantitative approaches. According to Miles and Huberman, qualitative data is obtained from data reduction, display, and conclusion drawing/verification. Data reduction is selecting, focusing on simplifying, abstracting

and transforming rough data that emerges from written notes in the field.

The reduction process is done continuously throughout the research before the data collection, as contained in the research framework, problem formulation and data collection stages. Data reduction is done with strict selection by summarising and parsing data and classifying it in a broader pattern. The next stage is to analyse the data and test the validity of qualitative data by triangulation, namely comparing data from one source with other sources.

Social vulnerability Approach

a. Social and Politic

Elections are a vital element and rise to social for certain groups of people. Social vulnerability is defined as a situation that can affect the capacity of a person or group to expect, solve, survive and recover from the impact of disaster or conflict. Communities are in a state of vulnerability when faced with events that have the potential to harm them, including conditions of vulnerability caused by conflict during elections.

Social vulnerability is a higher risk and is influenced by certain environmental conditions, social characteristics and demographics. This is like the social character of Yogyakarta City. As an urban area, Yogyakarta City has an environmental character with high mobility, heterogeneous community conditions, and high population density, creating conditions of vulnerability that are relatively higher than in other regions. Conflict or systems that make conditions urgent can cause social vulnerability.

The conditions of vulnerability that people face in electoral situations can influence their political decisions. So that people are limited, independent and intelligent in their choices. Inequalities in society in various ways can lead to increased vulnerability, causing divisions that are easily exploited. Such disparities can result from socio-economic, ethnic, racial or religious differences and a lack of social cohesion and political gaps. As a result, individual

participation and freedom in elections are limited or even lost.

b. Laws and Regulation

The section on considering Law No. 7/2012 on Social Conflict Management explains that feuds or clashes between community groups can lead to social conflicts that can disrupt national stability and hamper national development. Elections as a means of popular sovereignty to elect representatives or leaders of the nation have the highest potential for social vulnerability in Indonesia. Therefore, law enforcement on every election crime is a fundamental need to ensure elections with substance and integrity.

Law No. 7/2012 should safeguard democracy during elections to be sportive, orderly, and safe, to create elections with integrity and to fulfil the basic requirements of democracy. Honest and fair elections can be achieved if legal instruments regulate conducting elections and protect the parties related to elections, including organisers, candidates, voters, observers, and the voting public.

Election infractions committed by election-related parties could violate the distortion of people's sovereignty and injure the integrity of elections. Therefore, law enforcement is needed to maintain people's sovereignty and align with the status of a state of law. For law enforcement to run effectively and ideally, a legal framework and legal compliance are needed; the legal framework cannot run well without legal compliance, which is why the two instruments, both the legal framework and legal compliance, must be in harmony to run in balance to create democratic elections.

Regulations regarding elections are regulated starting from the Constitution, Bawaslu Law, KPU and DKPP as election organisers, and the Law on implementing both legislative elections, presidential elections and regional heads. Several things that have the potential to become problems in the electoral legal framework are related to the definition of the campaign, which has led to multiple

interpretations of enforcement between election management institutions, election administration infractions and disputes between election participants that are not detailed, as well as certainty and compliance with written laws and regulations.

c. Public Policy

The primary function of public policy in a state society is to facilitate the realisation of general welfare, peace and security. Public policy relates to regulations made and implemented by the government, with a broad scope covering various sectors and fields, namely education, health, economy, and so on. In the structural scope, public policy can be regional, national and local.

Public policy includes government policies that aim to intervene in a problem. In a negative perspective, the government can take public policy not to be involved or willing to intervene in a problem. Thus, public policy comprises alternative activities taken, plans made, actions to be changed, goals to be achieved, whether for change or maintaining conditions, and actors or parties involved either planning, providing support, or rejecting.

Result and Discussion

Based on research using field observation methods and media analysis from 2004 to 2022, some facts show that social vulnerability has occurred over a long period, causing widespread impacts and involving actors not only from Yogyakarta City. The increasingly vital use of social media has complicated the conditions of vulnerability, causing the community to be divided due to political bias, disinformation and false news.

A. Potential Voters of 2024 Elections

In the 2024 elections, the results of upgrading the Yogyakarta City voter data stated that there were 321,645 eligible voters spread across 1,298 polling stations. This number increased

by 21,765 voters, or 7.26%, from the 2019 elections. The highest number of voters is in Kemantren Umbulharjo, which reaches 18% of all voters in Yogyakarta City, while the highest density is in Kemantren Gedongtengen, which has over 15,700 voters per km².

B. Analysis of Socio-Political Conflict During the Election

The density of the number of voters in Yogyakarta City might increase social vulnerability, especially with the strategic location of Yogyakarta City as the centre of the economy and government, so the level of mobilisation in and out is relatively high. In addition, the condition of ethnic, religious, and cultural diversity creates its own fanaticism and ideological sentiments in the community. These differences in social identity dominate the causes of security disturbances because of conflicts between community groups of political party sympathisers.

Security is an essential aspect of realising quality elections. However, the threat of security problems continues to cover the implementation of elections in Yogyakarta City. This occurs because elections have been seen as a place for contestation of community power that impacts acts of violence. Socio-political conflicts in the Yogyakarta City area happen in the following forms of tension.

a. Social vulnerability Between Political Parties

1. Campaign Props Conflict

Campaign props conflicts occurred long ago, before the campaign period, and became the highest trigger of tension and violence in Yogyakarta City. Flags and billboards were installed to show identity and claim an area. This triggered friction between supporters of opposition parties as destruction, forced removal, rejection, and violence.

The conflict over props as the identity of political parties raises community concerns because it directly impacts the

security and comfort of the community. Some communities try to prevent this condition by prohibiting all forms of installation of party identity props in their area, as the Kotagede community does.

2. Black Campaign

A black campaign is a political practice that triggers an opponent's reputation by spreading fake news or hate speech through social media, primarily through the WhatsApp group application. This condition creates digital vulnerability because of misinformation and tension in the community.

3. Provocation

Mass crowds during the campaign period are potentially risky because provocation easily influenced crowds such as convoys and are prone to triggering security disturbances. This is because convoys take the form of crowds involving many people who are easily ridden by particular political interests. Street convoys are also prone to acts of provocation because of the use of "blombongan" exhausts aimed at attracting public attention and even mocking other groups, often carrying sharp weapons, thus disturbing comfort and disturbing the community. Convoy actions on the road also violate traffic rules that endanger other road users.

Other forms of provocation have occurred on polling day, as was the case in Lempuyangan and Kraton during the 2017 local elections. Physical clashes involving supporters of candidates occurred during the recapitulation in the Kemantren Kraton area, as well as supporter conflicts in the Lempuyangan area in the 2009 elections involving PPP and PDIP supporters.

4. Politics of Identity

Street props and convoys are one of the means of building party-based identity politics, which has proven to be influential in reproducing violence and social vulnerability in Yogyakarta City. Politics is intertwined with interest groups, such as

gangs and parking management groups that are members of community organisations or political party wings.

These groups were massively organised long before the campaign period. In certain moments, such as political figures or the organisation's anniversary, they appear and take action to show their existence and provoke attacks. With a long-term process, the existence of these groups causes the emergence of the Red Party and Green Party bases scattered in Yogyakarta City.

Noor Harsya Aryo Samudro, Bawaslu Commissioner, said, "Political momentum is used to mobilise the masses to build their identity politics through convoys on the streets. The convoy action involves groups of masculine men to carry out attacks. They think that groups with different identities may be intimidated, resulting in violence and criminality."

Violence because of politics of identity seems to be a routine action that accompanies elections with shifting conflict characteristics and has impacted specific political interests, especially since the 2004 elections. Vulnerability occurs in every election. The locations of vulnerability are sporadic, with the most vulnerable locations around the Ngabean car park.

The struggle for territory influences the level of vulnerability, maintaining existence and mobility density. Besides existentialism, people's fanaticism towards a political identity also increases the number of conflicts. The practice of black campaigns covers the electoral process and provocations with narratives that lead to particular identities and make people vulnerable to polarization. The character of voters who have yet to be educated about innovative campaigns causes the public to minimally respond to positive campaign efforts.

b. Social vulnerability of Election Institutions and The State Authorities

The actions of the election organising authority and the state containing authority, caused by unilateral authority without considering wisdom and responsibility, also cause social vulnerability during elections. Infractions during elections can be committed by election institutions, namely the KPU and Bawaslu, as well as by state administrators, namely ASN, TNI and POLRI. Infractions committed by the organising authority are categorised as follows:

1. Procedural Infractions

Procedural infractions are unseen because of difficulties in proving infractions. Political parties anticipate by tricking the rules and placing the parties in the election organising body. Election committees at the KPPS level were recruited behind closed doors, making getting evidence and taking action following the provisions difficult. *"Infractions related to KPPS recruitment are not by procedures. Officers are only offered behind closed doors."* (RA, Gondokusuman community)

2. Administrative Infractions

Procedural infractions also occur at the lowest level of election organisers, such as the incompatibility of the KPPS recruitment process according to KPU procedures, where the KPU regulates that the recruitment of election committees is carried out openly and meets the principles of equality and justice. However, the recruitment process is carried out in a closed manner, while the administrative process of registrants is only a formality for reporting. The community considers that the infractions that occur have yet to be resolved by the election organising committee overseeing election infractions, namely Bawaslu. *"Many administrative infractions occur but can be resolved according to their respective levels such as at TPS, PPK, KPU. So far, no reports have been followed up at the Bawaslu level"*. (RA, Gondokusuman community).

3. Criminal Offences

The actions of the election committee or the state that uses other people outside political actors cause the difficulty in proving reports and findings related to criminal offences to carry out their political interests. Criminal offences that have been proven to have committed infractions and imposed penalties following the KPU code are related to cases of sexual harassment in the 2019 Elections. Here, the perpetrator of the infraction received a dishonourable dismissal.

Other forms of election criminal offences are related to the neutrality of ASN and other state administrators. In terms of ASN neutrality, there were cases of criminal acts as ASN involvement in covert campaigns at an anniversary of a political party event in Mantrijeron, as well as the actions of an ASN who produced black campaigns and was not neutral in social media activities.

Meanwhile, regarding state officials, there are cases of political money and involvement as a candidate's success team by village officials or lurah. *"The vulnerability will increase in the 2024 elections because the proposed presidential candidate is an alumnus of the state university, there are lecturers with certain positions who become shadow success teams and party commissioners"*. (Noor K Aryo Samudro, Bawaslu Commissioner).

The non-neutrality of ASN and apparatus in the form of disguised campaigns creates discomfort due to the use of power in the area of their position for political interests. This can exacerbate or trigger tensions in the state process, ultimately weakening the legitimacy of the democratic system.

C. Analysis of Election Management System

Vulnerability in implementing elections happens at all stages because each dimension

contributes to various conflicts and infractions. So, that vulnerability is found before, during, and after the election. Bawaslu divides potential vulnerability into five (5) sub-dimensions, that are:

a. The Right to Vote

Freedom of choice is the right of every citizen in a democracy and involvement in collectively determining policy direction. However, with many migrants, it becomes a limitation in fulfilling the right to vote. The number of residents who leave Yogyakarta City for study and work is unbalanced compared to the number of students from outside the region who come to Yogyakarta. This will undoubtedly be a significant obstacle.

The results of interviews with related parties show that students' low understanding of voting procedures, mainly carrying out moving voters, causes the everyday use of voting rights by students with KTPs from outside Yogyakarta City. Some districts in Yogyakarta City, known as areas where students from outside the region live, will need help with the low use of voting rights, such as Gondokusuman and Umbulharjo.

Highly complicated procedures trigger the vulnerability of student voting rights for students without-of-region ID cards. The KPU and Bawaslu have attempted to increase voter participation among students but are constrained by the student voters not continuing the administrative process to the Yogyakarta KPU. In the 2019 elections, the KPU took anticipatory steps by organising A5 Corner activities with BEM and student dormitories on 20 campuses. The KPU claims to have facilitated more than 10,000 moving requests.

Another obstacle to increasing student participation is the involvement of universities and schools in facilitating the implementation of unique polling stations in the educational environment. There were only seven (7) proposals that were realised, namely two polling stations on the AKPRIND campus and one polling station each on the LPP Perkebunan campus, UKDW, Ponpes Nurul Ummah and Madrasah Mualimin Muhammadiyah.

Besides student participation, obstacles to the right to vote are related to updating the Permanent Voters List or DPT. Cases include voters who have passed away but are still listed in the DPT in the 2017 regional elections and voters moving domiciles who are still listed in the DPT for the 2019 presidential election.

b. The Campaign Stages

Physical clashes, security disturbances and infractions of the installation of campaign props often characterised the campaigns leading up to. Over the past few years, the campaign period has always been synonymous with motorised convoys with blaring exhausts. The blaring exhaust also provokes groups of sympathisers from opposing political parties. The provocation then led to physical clashes. Physical clashes that are identical to acts of violence and destruction will ultimately cause losses to the surrounding community, both morally and materially. The community does not welcome the election period with joy but is overwhelmed with anxiety about physical conflicts that may occur during the campaign period.

To expect implementing the 2024 General Election campaign, the General Election Commission of the Republic of Indonesia has compiled the latest regulations as General Election Commission Regulation No. 15/2023, which regulates the General Election Campaign. The regulation, especially in Chapter I Article 5, explains that "Election campaigns are public political education carried out responsibly and intended to increase voter participation in elections".

This means that if the election campaign carried out by a political party is contrary to the principle of education, causing security disturbances and making people more reluctant to take part in elections, then such forms of campaign must be avoided.

The campaign methods suggested by the KPU, as stated in CHAPTER IV Article 26, are through methods: limited meetings; face-to-face meetings; distribution of election campaign materials to the public; installation of election campaign props in public places; social

media; advertisements in printed mass media, electronic mass media, and online media; public meetings; candidate pair debates on candidate pair election campaign materials; and other activities that do not violate the prohibition of election campaigns and laws and regulations.

Regarding the installation of campaign props, people in several places in Yogyakarta City refused to have their areas fitted with political party banners and flags. This was due to fear, anxiety and trauma from the riots that had occurred during the previous elections. In addition, the rejection results from a resident's agreement to maintain the security of the village order and prevent conflicts between residents. They hope the hot election situation on social media will not spread to the real world.

In the 2004 General Election, several political parties in Yogyakarta filed protests against the Panwaslu because people in several places in Yogyakarta refused to have their areas fitted with political party banners and flags. Some areas in question were Ngampilan, Serangan, and Gayam. The residents refused because the 1999 legislative elections traumatised them. In that year's election, there were riots in several places, and the incident traumatised residents. The rejection was done by installing a banner in RW 1 Serangan that read, "The agreement of Serangan residents in our area is free from political party attributes".

During the 2019 Election campaign, APK installation was rejected in Patehan Village, Kemantren Kraton. There is a banner that reads 'Appeal RW 03 Kel. RW 03 Patehan Village residents signed Patehan Free from Party Attributes. The appeal had been made in the 2014 legislative elections, but it needed to be written as a banner. The aim was to maintain the security of village order and prevent conflicts between residents.

Although the installation of political party attributes is prohibited, abstention is also banned in the village. Residents are encouraged to vote according to their conscience. This shows that the spirit of community participation in Yogyakarta City during the election period is quite good; they want to be united by the

political interests of certain groups that do not directly impact their lives.

In response to the APK installation conflict above, the KPU needs to facilitate the decision on the APK installation location. KPU facilitation related to the determination of the APK installation location has been regulated by KPU Regulation No. 15/2023 CHAPTER IV Article 36, which states that the installation location of the Election APK must be installed in a location that is not prohibited by this Commission Regulation and related laws and regulations.

After the regulation on the determination of APK installation locations, it is also necessary to take action against firm infractions and without favouritism from the relevant authorities so as not to cause other problems in the future. In 2023, a draft Mayor's Regulation of Yogyakarta City is being formulated to regulate the control and installation of APKs in Yogyakarta. This regulation is expected to reduce the potential for conflict in the community and provide space for campaigns by installing APKs.

Campaigns are the most conflict-prone stages of elections. As a crucial stage and the primary momentum to gain the most significant support, it is natural that political contestation and friction reach the highest escalation point. The relatively short open campaign period amid intense competition for seats and the need for parties to maintain their existence. Naturally, the campaign period often triggers conflicts over the mass of voters. Both candidates and parties use various methods to gain sympathy and support, even though these methods should violate the rules, commit malpractice, and manipulate the rules and campaign process. The forms of infractions found during the campaign period are:

1. Props Infractions

The installation of props is still the dominant infraction during the campaign in Yogyakarta City. The dominance of props influences this as campaign media by almost all political parties and candidates. During the 2019 election campaign, up to 15,000 infractions were recorded, mainly

as flags and banners. The existence of these props violated Perwal No. 55/2018 concerning the Installation of Campaign Props and the Distribution of 2019 General Election Campaign Materials.

Infractions during this stage are that political parties participating in the election do not have permission or exceed the installation time limit. Ahead of the 2024 General Election, where candidates still need to be determined, political parties and candidates install attributes in advertisements that violate campaign regulations. Bawaslu considers that the absence of a legal umbrella as KPU Regulations governing the installation of attributes makes this action not yet an infraction. Meanwhile, the KPU considers installing characteristics as socialisation to increase public political participation. So, the supervising and enforcement attributes can only be carried out by Satpol PP based on local billboard regulations.

2. Money Politic

The practice of money politics has been found, but proving the offence is challenging. Kesbangpol said that the findings of money politics cases had been reported in the 2019 elections. Still, Bawaslu assessed this as not a campaign infraction because the perpetrators were identified as not political actors.

Proving money politics is relatively tricky, although the parties' sources taking part in the election confirmed this. Political parties or candidates use networks or communities of female voters so that it runs smoothly in the voting community. This is done to avoid reports of election infractions that could damage the image of the party or candidate concerned.

3. Open Campaigns

The open campaign is a stage that is very vulnerable to election security. Frequent infractions of campaign rules include vehicle convoys that disrupt road users and trigger chaos in the community through mass actions.

The subsequent risk of vulnerability during the open campaign period is the use of alcohol, which leads to aggressive behaviour and party fanaticism. Another open campaign problem is that there are still minors who take part in campaign activities; the involvement of children in open campaign activities adds to the precarious conflict in implementing honest campaigns.

4. The limited (close-door) meetings

The limited (close-door) meeting is another strategy for political parties to steal the start of the campaign. The practice is an infraction because it involves black campaigns and contains provocations such as image politics and the use of religious issues or identity politics. For political parties, limited meetings are part of regenerating voters and increasing internal party resilience through closed and confidential meetings.

c. The Stage of Collecting Vote

There was relatively no precariousness at the voting stage, before, during or after voting. Allegations of money politics or dawn attacks during the calm period are difficult to prove, so they can be charged with criminal articles because the perpetrators are not election subjects with minimal evidence.

Mutual suspicion is a standard colour of vulnerability in the vote-counting process, so witnesses from political parties are often dissatisfied and protest the results of vote counting. Bhabinkamtibmas Ngampilan Police said, *"Many witnesses feel dissatisfied, so they look for tactics (profitable)."* This caused the counting process to be longer and more energy-intensive.

d. Adjudication and Objections

Social vulnerability as adjudication often occurs in elections, caused by claims of dissatisfaction with the results of vote counting. Objections from witnesses of election participants colour the attitude of adjudication so that they are not willing to sign the election results.

Adjudication and objections always occur in every election and at all levels of calculation, including TPS, PPS, and PPK. The most fierce election dispute happened in the regional election in the mayoral election in 2017, where the dispute resolution took place up to the Constitutional Court level; Frenky Argitawan Mahendra, KPU Yogyakarta City, conveyed this.

e. The Surveillance of Election Conflict

The vulnerability in the supervision of elections in Yogyakarta City is related to the administrative procedures for implementing elections and tensions between political groups. Changes in election rules from time to time, causing officers and voters to continue to adjust, especially with the number of contestants who are always many with valid votes that change, become a source of difficulty in organising elections and create new vulnerability.

The limitation of human resources for supervision is a further problem amidst the growing complexity of election vulnerability. The use of digital technology is proper as a monitoring tool and a potential vulnerability with the use of gadgets to produce hate speech, black campaigns and identity politics; for political elites who have power, digital media and social media make it easier to build a self-image while bringing down political opponents by utilising buzzers and other powerful elements.

As for political parties, supervision in the digital era is getting weaker because political interests are easier to control and control. The election management body, which should be neutral and impartial, can cause the principle of fairness in elections to fail. In terms of community involvement, the complicated reporting process makes it difficult for people to take part actively in the election monitoring process.

f. Root Causes of Electoral Vulnerability

The problem of conflict and electoral vulnerability in the city of Yogyakarta is unique and permanent. The tension that arises stems from the long-standing conflict between the

red and green bases, which persists in every election. During the New Order, thugs in Yogyakarta collaborated and worked together with political forces. Political forces that employ thugs are known for their ability to use violence to suppress political opponents and to garner votes during elections. PPP and PDI use their party troops to secure and deal with the violence they face, which originates from wild youth organizations that existed after the Petrus incident, namely Joxzin and Qizruh (Ibrahim, 2024). This conflict, a legacy of the New Order, has become latent and difficult to resolve. Consciously, pro-violence masculine groups continue to reproduce this conflict through the cadreship of new children to produce a narrative of identity politics that culminates in red versus green hostility.

The main root of the problem stems from ideological differences and friction over economic interests, especially control of parking lots, terminals and others. These informal communities and groups are affiliated and sheltered under political parties to get an umbrella of protection to guarantee the existence of economic activities. Therefore, they are militant in providing defence, especially during the election period, with the interest of controlling territory and excessive fanaticism during the election (*Sumaryanto, Wirobrajan Police, July 31, 2023*).

Party elites have made efforts to resolve vulnerability because of friction between sympathisers. They coordinate each laskar to be disciplined with the party organisations (*PDIP-P and PPP elites, August 2, 2023*). Conflict resolution is generally achieved through peaceful means and communication between elites. However, this method is unable to reduce and eliminate conflicts. Conflicts of friction between sympathisers will continue to recur due to hidden grudges.

Over the conflict, election organisers have a different view. Bawaslu considers the need to include the conflict as a criminal offence with punitive consequences, not just mediation (*N.H.A. Samudro, Bawaslu Commissioner, July 23, 2023*). On the other hand, the KPU believes in the positive impact of fanaticism that leads to sympathiser strife, a form of expression that

can increase voter participation and attention. Conflict is considered a competition that can encourage voters to exercise their right to vote (*F.A. Mahendra, KPU Commissioner of Yogyakarta City, July 31, 2023*).

D. Analysis of Election Contestation

Vulnerability in the contestation dimension relates to the right of candidates to be elected and campaign, which involves vertical and horizontal competition. Although known as a region that has diverse backgrounds and social identities, with potential communities, groups and community organisations, this has yet to become a lever for conflict during elections. Voters are relatively open to differences in gender, ethnicity, tribe, religion or race. The people of Yogyakarta City are mid-minded, making candidate performance a benchmark for choice in election contestation.

With the development of social media, the potential for contestation vulnerability is increasing. Friction and conflict between voters become more vulnerable with the uptake of information on campaign materials that disrupt order and with the highest level of social media vulnerability compared to other periods of security and even violate campaign regulations. The election period is the period with the highest level of social media vulnerability compared to periods other than the election period. The ease of production and freedom in disseminating campaign materials has made the practice of black campaigns, hoaxes and identity politics easier to find as attack against political opponents.

When the election is over, the elites are not responsible for building reconciliation at the grassroots, so the election conflict continues until the election is over. Meanwhile, official party accounts registered with the KPU and candidates are passive in making wise campaigns. As a result, manipulating campaign materials as misinformation, hoaxes, and hate speech becomes an unbroken cycle.

An example of the vulnerability of contestation through social media is the hoax news in the 2019 elections about non-ID card

voters of Yogyakarta City who were allowed to vote without moving voters. This led to the decision to re-vote in 4 kemantren and five polling stations (Karim, 2019).

In responding to social media vulnerability, law enforcement officials have made various conflict mitigation efforts because conflicts that originate from social media continue to occur repeatedly. The protection of perpetrators by political elites makes efforts to break the conflict even more difficult. Public awareness and understanding are the keywords so that people are not easily provoked and are more selective in receiving provocative information. In areas prone to conflict and friction, a ban on the installation of props is compelling enough to prevent disputes because of differences in identity and ideology (Hadi, 2019).

E. Analysis of Electoral Participation

Public participation is the most critical part of democracy. Without exception, every citizen, including vulnerable groups who have met the requirements, may participate freely and relatively in elections. Despite high vulnerability in several dimensions, voter turnout remained the same. In the 2019 elections, the turnout rate reached 81-83%, higher than the target of 77%. This figure places Yogyakarta City as the region with the highest participation rate in DIY.

The KPU and Bawaslu assessed that this was inseparable from efforts to strengthen the electoral capacity of vulnerable groups through active socialisation as face-to-face and social media. KPU Regulation No. 9/2019 on Voter Participation defines vulnerable groups into 8 (eight) groups: beginner voters, young voters, women voters, voters with disabilities, marginalised groups, communities, religious groups, internet citizens or netizens.

In implementing the 2019 elections, the DIY disability participation rate reached 53% of 1,600 voters with disabilities. People with physical disabilities became the disability group with the highest participation, reaching 20%. The organising committee tried to use various methods to increase voter participation.

Regarding socialisation to voters, Bawaslu formed a democratic disability community to assist and facilitate people with disabilities, especially hearing disabilities, to be more actively involved in elections. Election organisers at polling stations also provide ball pick-up facilities, assistants, and special queues to help people with disabilities exercise their voting rights comfortably and reasonably.

However, disability participation has not been maximised due to limited access to information and disability-friendly facilities. Election organisers have not provided sign language explanations for people who are hard of hearing, let alone details in the form of audio for the visually impaired, nor has the dissemination of information through social media been massive. So, the participation rate of blind and visually impaired people is the lowest disability compared to other disabilities, which is 10%.

Women's participation and representation are other aspects of participation vulnerability that affect the quality of democracy in every election. The election records show that each electoral district reaches 30-60% regarding women's representation. KPU seeks to increase women's attention and understanding of elections with the Democracy Volunteer programmes. Another breakthrough is the KPU's effort to socialise elections for female sex workers routinely.

Another marginal group that has to be a concern to election committees is voters restricted in their mobility in hospitals or detention centres. Under these conditions, the organisers try to provide unique polling stations to accommodate the use of voting rights for residents of Wirogunan Prison and various hospitals in Yogyakarta City.

F. Social Conflict in the 2004-2022 Elections

a. Inventory of Election Vulnerability in the Media

Social vulnerability during elections, whether legislative, presidential or regional, is also

recorded through mass media coverage that is openly accessible to the public. The results of mass media documentation of conflicts in the 2004 elections show two incidents in March 2004 or one month before the voting stage. Both conflicts showed the same pattern. Red or green sympathisers carried out the disputes after mass gathering activities or open campaigns. They caused people who were not involved in available campaigns to become victims of violence.

Vulnerability in the 2006 elections was caused by the devastating earthquake of 26 May 2006 that devastated Yogyakarta, forcing both organisers and contestants to postpone the local elections. In the 2009 elections, the vulnerability recorded by the mass media was related to the control and destruction of props involving party sympathisers and money politics by candidates. These conflicts occurred from 2008 to 2009. In August 2008, conflicts occurred during the curbing of campaign props by Satpol PP, which party sympathisers resisted.

The vulnerability in the 2014 elections was many and varied. There were conflicts caused by infractions of the campaign schedule and vote counting. In terms of campaign schedule infractions, there was an infraction of the campaign schedule and money politics by a candidate from the Hanura party, Yudi Irawanto, who distributed instant noodle packages along with the candidate's identity at a gymnastics event. The activity was outside the Hanura campaign schedule set by the KPU.

A new form of conflict in the 2014 elections occurred during the vote count where party witnesses found differences in the number of DPT, valid and invalid votes by 118 votes, as well as differences in the calculation results on the C1 form, C1 plano and DA-1 form at polling stations in Rejowinangun. Meanwhile, at several polling stations in Umbulharjo, one was unwilling to open and display the C1-Plano, thus violating the KPU Regulation No. 27/2013 provisions and limiting the opportunity to correct the C1-Plano.

Social vulnerability in the 2017 regional elections differed from conflicts in other

legislative, presidential, and regional elections. The internal strife of the PPP party that broke out at the central leadership level, which affected the provincial leadership caused the conflict, including Yogyakarta City (Kamil, 2017).

Conflicts in the 2019 elections were more coloured by violent conflicts or clashes of sympathisers between one party, sympathisers of one party with other parties, and party sympathisers with the community and the authorities. Besides sympathiser violence, conflicts over election administration became more prominent. In the 2019 elections, the Yogyakarta City Panwaslu found 1,251 DPS or temporary voter data determined by the KPU to be problematic, thus asking the KPU to make improvements (Ratna, 2018). Double voter data became the most challenging, up to 1,019 or 81%. Other complex data include 103 deceased voters (8%), 65 ineligible voters (5%), and 49 unidentified voters (3%).

No.	The Type of Elections	Year	Frequencies'
1	Legislative Elections and Presidential Elections	2004	2
2	Regional Elections	2006	2
3	Legislative Elections and Presidential Elections	2008-2009	4
4	Legislative Elections and Presidential Elections	2014	9
5	Regional Elections	2016-2017	2
6	General Elections	2018-2019	7

Recapitulation of Vulnerability Data Per Election from Mass Media

In the last election, namely the 2019 election, Bawaslu said that internal and external factors influenced conflicts during implementing the election. In terms of internal factors, the limited human resources of the Panwas are not proportional to the number of voters and the number of scheduled campaigns that are the

object of supervision, besides obstacles related to understanding the regulations of election organisers, especially TPS supervisors and Kelurahan Panwas.

The external challenge of the 2019 elections is the increasingly massive use of social media in the community, which still needs to be resolved; during the campaign period, social media was used more widely to disseminate hoaxes, but it was challenging to prosecute as a campaign infraction.

b. Identification of IKP Dimensions

Regarding mapping IKP with socio-politics dimensions, election administration, contestation and participation compiled by Bawaslu, media analysis can identify IKP in Yogyakarta City during the 2004-2022 elections.

The results of the socio-political dimension show that clashes between sympathisers are still the most dominant form of conflict and even increase and expand, involving the community and even the authorities, resulting in injuries to community members and destruction of party facilities and community property. Destruction by sympathisers also occurred on props belonging to other candidates.

These forms of socio-political conflict place several locations in Yogyakarta City as conflict-prone areas, especially the Ngabean parking terminal intersection. Three districts with high vulnerability are Gedongtengen, Jetis, and Wirobrajan. Horizontal conflicts are conflicts triggered by fanatical voters, not rational voters. Conflicts in the electoral administration dimension include postponed regional elections due to the earthquake in 2006. Other conflicts in the administration of elections include election disputes triggered by DPT problems in the 2014 and 2019 elections, invalid votes in the 2014 and 2017 regional elections, and voting fraud that resulted in repetition of the voting and vote counting stages. In the contestation dimension, the conflict that arises is the postponement of regional elections caused by the lack of candidate pairs registering, namely, only 1 (one) pair.

Other conflicts that almost always occur in every election are infractions of props by parties and candidates, including unauthorised installation and installation that does not comply with regulations. Money politics was also a type of conflict recorded by the mass media in the 2004 and 2009 elections, although it is likely that the practices not publicised through the mass media were more covert. Another form of conflict relates to infractions of the campaign schedule, where candidates campaign in community activities before the campaign schedule begins. PPP's internal conflict also affected the dimension of contestation. Some PPP sympathisers shifted their votes to other parties, thus reducing the amount of support for the PPP. The conflict caused PPP's political wings to make different choices or be passive to the political policies of PPP's central leadership.

NO.	DIMENSIONS OF IKP	THE TYPE OF SOCIAL CONFLICT
1	Socio-political context	a. Clashes with sympathisers, the community, or even authorities b. Destructions of props c. Destruction of public facilities, communities, and other parties d. Conflict-prone areas in several regions
2	The elections implementation	a. Postponement of election due to earthquake b. DPT dispute c. Invalid vote dispute d. Re-voting or recount e. Delay or exceed the collection deadline
3	Contestation	a. local election postponement due to single candidate b. Money Politics c. Infractions of Props d. Internal party conflict lowering the vote e. Claims of support between regional election candidates f. Infractions of campaign schedule
4	Participation	-

Table Identification of IKP Election Dimensions of Yogyakarta City

G. Conflict Mapping for the 2019 Elections

a. Indicators of Social vulnerability Mapping

The mapping of the level of social vulnerability in the 2004-2022 Yogyakarta City Elections

refers to the data processing results of Bawaslu's IKP dimensions. Each dimension has a different weight according to its influence on the level of election vulnerability. The dimension of the socio-political context weights 40%, election administration weights 25%, contestation weights 20%, and participation weights 15%.

No.	Dimension	Weight	Score
1	Socio-political context	40%	4.8
2	The elections implementation	25%	3.0
3	Contestation	20%	2.4
4	Participation	15%	1.8

Table of Election Vulnerability Assessment Scale

b. The Mapping of Election Vulnerability

The tabulation results of the final vulnerability mapping scores for each kelurahan show that the villages with high vulnerability classifications in the 2004-2009 elections were Notoprajan and Warungboto, while the other 43 villages had moderate levels of social vulnerability. These two wards' increased vulnerability classification status was mainly because of the high frequency of clashes between sympathisers at classic points within the two wards. The Ngabean intersection, which has become a tangent point for clashes between PDIP and PPP sympathisers on every occasion of open campaigns, makes it the conflict area with the highest frequency in Yogyakarta City. This places Notoprajan as the most vulnerable urban village in Yogyakarta City, with a score of 5.7. Meanwhile, Warungboto received a high score of 5.1 through the presence of Jl Veteran as another location for classic clashes between PDIP and PPP sympathisers.

H. The Mapping of Vulnerability Based on Election Stages

Social vulnerability occurs at all stages of the election. Elections are held in 3 (three) stages: before, on voting day, and after voting. Each stage has the potential for conflict that can disrupt the democratic process. Based on the history of conflicts in the 2004-2019 elections,

several conflicts coloured the election stages as follows

Pre-Voting	The Elections Day	Post-Voting
1. Open election campaign with convoy 2. Provocation 3. Identity politics 4. APK infractions 5. Anonymity and buzzers on social media 6. Dueling debates on social media 7. Black campaign 8. Procedural and administrative infractions from committee 9. Implementation of ASN neutrality 10. Money politic 11. Campaign refusal and election participants	1. The issue of moving to vote 2. Spreading of hoax information 3. Objections to vote results by witnesses 4. Intimacy of witnesses 5. "Serangan Fajar" (vote buying) 6. Lack of human resources on management and surveillance 7. The participation of marginalized group	1. Election success lawsuit 2. Vote-buying at subdistricts level 3. Street clashes over election result objections 4. Lack of woman representatives in government institutions 5. Provocations of vote results 6. Vote results error and sabotage

The Table of Social vulnerability Potential in the 2024 Election Stages

The potential vulnerability caused by electoral social conflict is most prevalent at the stage before polling day. This stage being used as a campaign period to gain constituents causes this situation. Candidates and political parties compete for the number of votes. This makes them find more ways to secure support.

The vulnerability situation in the next stage decreases. This is because fewer activities involve many people after the campaign period. Large mass mobilisations in open spaces are prone to engage in political expression, leading to conflict. Thus, conflict handling on and after polling days is more easily conditioned.

CONCLUSION

Based on the results of the discussion in the previous chapter, the following conclusions can be drawn:

1. The potential voters of Yogyakarta City were 321,645, an increase of 7.26% from the 2019 Election, spread over 1,298 polling stations. The highest number of voters in Kemantren Umbulharjo is 18%, and the highest density of Kemantren Gedongtengen is 15,700 voters per km² political parties can cause.
 2. In terms of the dimension of socio-political vulnerability or by state administrators.
 - a. vulnerability between political parties includes conflicts over the destruction of props, acts of violence against sympathisers of other parties, black campaigns through social media, and acts of provocation leading to clashes between sympathisers and identity politics as red and green political bases.
 - b. Election vulnerability by the election management authority and the state includes the placement of party resources in election management institutions such as the recruitment of KPPS, which is closed with a mere formality registration system, as well as the involvement of ASN in covert campaign actions and the production of black campaigns.
 3. In terms of the dimensions of the election organiser about:
 - a. Voting rights vulnerability is influenced by the use of voting rights by migrants, especially students, which is low because of complicated voter transfer provisions.
 - b. Vulnerability in the campaign stage includes infractions and competition in the installation of props, money politics that are difficult to prove, convoys of vehicles leading to clashes between sympathisers during the open campaign period, as well as the use of limited meetings to steal the start and identity politics.
 - c. Vulnerability in the voting stage relates to the repetition of voting or voting counting.
 - d. Adjudication and objection vulnerability related to claims of dissatisfaction with the vote count results so that party witnesses are unwilling to sign the election results.
 - e. Election supervision vulnerability include the ever-changing election administration procedures that become a significant obstacle to elections and cause new vulnerability.
 - f. The primary source of electoral vulnerability in Yogyakarta City comes from ideological differences and friction over economic interests, especially control of parking lots where the group is affiliated and under a political party, so the group is militant and excessive during the election.
4. Regarding electoral contestation, vulnerability in prohibitions on the installation and destruction of props, veiled provocation on religious grounds from religious leaders, and friction of campaign materials on social media. Public awareness and understanding are the keywords so that people are not easily provoked and are more selective in receiving provocative information.
 5. Regarding voter participation, the turnout rate in the 2019 elections reached 81-83%, higher than the target of 77%.
 - a. The participation rate of vulnerable groups is still low, such as the participation of groups with disabilities, which only reached 53%, with the lowest participation rate coming from people with visual disabilities, which only got 11%.
 - b. The election organiser's efforts to increase participation with a ball pick-up policy for the physically disabled, the formation of Democracy

- Volunteers to increase women's representation and unique polling stations in hospitals and Wirogunan prison.
6. Inventory of mass media election vulnerability
 - a. Coloured by conflicts in the form of violence between sympathisers, which is the highest type of vulnerability, conflicts over props, money politics, conflicts over props, internal party conflicts, DPT conflicts and other election fraud.
 - b. Based on the geographical distribution of conflicts, most were in Notoprajan and Rejowinangun villages, with 12 incidents, and the average number of incidents per village was 9.
 7. The identification of the dimensions of IKP Kota Yogyakarta comprises the following forms:
 - a. The socio-political dimension includes clashes between sympathisers and the community and authorities; destruction of props; destruction of public facilities, communities, and other parties; and conflict-prone areas in several regions.
 - b. The electoral administration dimension included postponed elections because of earthquakes, DPT disputes and invalid votes, disputes over re-voting or vote counting, and voting delays or exceeding time limits.
 - c. The dimension of electoral contestation includes postponing regional elections because of only one pair of candidates, infractions of props and campaign schedules, money politics, internal party conflicts to reduce votes, and claims of support between regional candidates.
 8. The election vulnerability mapping shows the following data:
 - a. Notoprajan and Warungboto are the two most vulnerable neighbourhoods, with scores of 5.7 and 5.1, respectively.

The high scores of Notoprajan and Warungboto are influenced by the clashes of sympathisers at the intersection of Ngabean and Jl Veteran.

- b. The other 43 neighbourhoods scored moderate levels of social vulnerability.

In overcoming social vulnerability in elections, especially in the face of the 2024 elections, a holistic and collaborative approach is needed by involving various parties, where each party has a role to play:

1. The Government of Yogyakarta City
 - a. The Legal Section of the Yogyakarta City Secretariat needs to immediately issue a Mayor's Regulation on Guidelines for the Installation of Campaign Props.
 - b. The National Unity and Political Affairs Agency of Yogyakarta City should intensify socialisation among the people of Yogyakarta City regarding implementing the 2024 General Election.
 - c. The Satpol PP Office encourages community participation in vulnerability identification efforts through the Jaga Warga forum formed in every RW in Yogyakarta City.
2. Elections Committee
 - a. KPU and Bawaslu socialise the stages of election implementation and campaigning for safe and peaceful elections on a massive scale, especially in community forums.
 - b. KPU and Bawaslu routinely organise discussions involving existing political stakeholders to expect vulnerability in each election stage.
 - c. KPU and Bawaslu need to increase information and complaint service channels and respond to any information and complaints submitted by the community.

3. Security Apparatus
 - a. Prepare sufficient security personnel to expect social vulnerability involving security elements in the community.
 - b. Conducting routine socialisation related to potential security disturbances in each stage of the elections, especially in areas identified as potentially vulnerable.
 - c. Prioritise humanistic, preventive, and persuasive approaches and take a firm stance in handling social disturbances and conflicts.

BIBLIOGRAPHY

Legislation

- Law No. 4 of 2011 on Geospatial Information.
- Government Regulation No. 9/2019 on the Implementation of Law No. 4/2011 on Geospatial Information
- Government Regulation No 45 of 2021 on the Implementation of Geospatial Information

Books and Article

- Abhan dkk. 2020. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020., diakses melalui <https://sipekapilu.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2021/11/5.-BUKULAPORAN-IKPPILKADA-2020-UPDATE-NOVEMBER.pdf>
- Bafdal, Nurpilihan dkk. 2011. Buku Ajar Sistem Informasi Geografis Edisi 1. Bandung: Jurusan Teknik Manajemen Industri Pertanian FTIP Universitas Padjadjaran.
- Bawaslu. 2023. Visualisasi Data IKP Terupdate: IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024., diakses melalui <https://sipekapilu.bawaslu.go.id/>
- Hadi, Usman. 2019. Polresta Yogya Petakan Daerah Rawan Konflik Pemilu, Ini Hasilnya. DetikNews, diakses melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d/4454263/polresta-yogya-petakan-daerah-rawan-konflik-pemilu-ini-hasilnya>
- Cairney, P. C. (2019). Understanding public policy: theories and issues. Bloomsbury Publishing
- Creswell, John W. 2013. Research Design Qualitative, Quantitative, Mixed Methods Approaches Third Edition, Terjemah, Achmad Fawaid, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dye, T. R. (1978). Understanding Public Policy. Englewood Cliffs N.J.: Prentice-Hall, Inc
- Hadi, Usman. 2019. Yogya Rawan Konflik Politik Identitas, Pemkot Harap Tak Ada Provokasi., diakses melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4454173/yogya-rawan-konflik-politik-identitas-pemkot-harap-tak-ada-provokasi>
- Holland, Ivar S., et al. 2011. Social vulnerability assessment for Norway: A quantitative approach. *Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography*, Vol. 65, No. 1, pp: 1–17, doi: 10.1080/00291951.2010.550167
- Ibrahim, J. (2024). KRIMINALITAS, HEGEMONI, DAN POLITIK: PREMANISME DI YOGYAKARTA PADA MASA ORDE BARU. *Jurnal Kawistara*, 14(1), 18–37.
- Kamil, Ihsan Kamil. 2017. Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Upaya Meminimalisasi Konflik Horizontal Antar Sesama Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Aceh Singkil (Pendekatan Siyasa Syar'iyah). Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Karim, Abdul Gaffar et al. 2019. Peta Kerawanan Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta: Pengalaman Pemilu Serentak 2019. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
- Kay, A. (2006). *The dynamic of public policy: Theory and evidence*. Edward Elgar Publishing
- Kertati, Indra. 2020. Kerawanan Sosial dalam Perspektif Inklusi. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, Vol. 1, No. 21
- Rohmawati, Yuli. 2016. Perubahan Elektabilitas Partai Peserta Pemilu Di Yogyakarta Tahun 1971 1999. *Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 4, No. 2 data
- Rusqiyati, Eka Arifa Rusqiyati dan Heppy Ratna Sari (ed.). 2018. Panwaslu Yogyakarta temukan 1.251 bermasalah di DPS Pemilu 2019., diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/724721/>

- panwaslu-yogyakarta-temukan-1251 data-bermasalah-di-dps-pemilu-2019
- Salim, M Nazir. 2018. Pemilihan Umum 1951 di Yogyakarta: Dari Yogyakarta Membangun Demokrasi - Jogja Memilih. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Santoso, Topo. 2016. Kajian Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Pemilu.
- Setyawan, Dedi et all. 2018. Analisis Potensi Desa Berbasis Sistem Informasi Geografis. Jurnal Geodesi Universitas Diponegoro, Vol. 7, No. 4
- Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2011
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho. 2015. Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi, dan Kasus. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI
- Tika, M. Pabundu. 2005. Metodologi Penelitian Geografi. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2019. Mahfud MD Sebut Politik Identitas Ancam Keutuhan Bangsa., diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190209014050-32-367654/mahfud-md-sebut-politik-identitas-ancam-keutuhan-bangsa>
- _____. 2023. Dinamika Sistem Pemerintahan di Kota Yogyakarta (Seri 2 Selesai)., diakses melalui <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/27568>
- _____. Penanganan Konflik Sosial., diakses melalui <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/267>

TANTANGAN RENCANA PENERAPAN KEBIJAKAN TARIF TRANSPORTASI UMUM BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN AWAL

Pandu Yuhsina Adaba, Atika Nur Kusumaningtyas, Dian Aulia

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gd. Widya Graha Lt.8 Jl. Jend. Gatot Subroto No.10 Jakarta Selatan DKI Jakarta – Indonesia
Email: pandu.yuhsina81@gmail.com

Accepted: 28 November 2024; Revised: 18 Desember 2024; Approved: 28 Desember 2024

Abstrak

Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan harga tiket KRL berbasis NIK menuai pro dan kontra di masyarakat. Kebijakan ini dikhawatirkan sulit mencapai rasa keadilan dalam akses transportasi publik dan berisiko menurunkan minat masyarakat menggunakan KRL sebagai moda transportasi massal. Padahal, kebijakan transportasi publik seharusnya dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan, perubahan iklim, dan politik lingkungan global. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana kendala yang mungkin dihadapi terkait rencana penerapan sistem tarif transportasi umum berbasis NIK? dan (2) Seperti apa potensi dampak yang akan ditimbulkan akibat rencana penerapan sistem tarif transportasi umum, terutama dalam hal ini tarif KRL, berbasis NIK? Studi ini menemukan bahwa sebelum menerapkan kebijakan ini, pemerintah perlu mengatasi sejumlah tantangan, termasuk persoalan validitas data kependudukan berbasis NIK, integrasi sistem NIK dengan transportasi, dan koordinasi lintas sektor terkait kewenangan pengelolaan data NIK. Kajian tentang kebijakan tarif KRL berbasis NIK ini merupakan wacana baru yang dicanangkan pemerintah sehingga kajian tentangnya masih minim dilakukan. Tulisan ini menawarkan kebaruan dengan mencoba melakukan kajian awal sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik untuk merespons rencana kebijakan tarif KRL berbasis NIK, sekaligus menyoroti dampaknya pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kesadaran politik lingkungan dimasyarakat.

Kata kunci: kebijakan transportasi publik, tarif KRL, emisi gas rumah kaca, politik lingkungan

Abstract

The government's plan to implement a commuter rail (KRL) ticket pricing policy based on National Identification Numbers (NIK) has sparked mixed reactions within the community. While some view it as a step toward more targeted public service, others express concerns about its ability to ensure fairness in public transportation access. Additionally, the policy risks reducing public interest in KRL as a mass transportation option, contradicting the broader goal of shifting public behaviours from private vehicles to public transport. Such a shift is crucial for addressing environmental issues and demonstrating the government's commitment to mitigating climate change. This study adopts a qualitative approach through a literature review to explore two key questions: (1) What challenges might arise from implementing a public transportation tariff system based on NIK? and (2) What potential impacts could result from such a system, particularly regarding KRL ticket pricing? The findings reveal several critical challenges that the government must address before implementing the policy. These include ensuring the validity of NIK-based population data, integrating the NIK system with transportation. Infrastructure, and coordinating across sectors to manage NIK data effectively. As the concept of an NIK-based KRL pricing policy is a relatively new government initiative, research on this subject remains limited. This paper seeks to fill the gap by providing an initial analysis, offering a fresh academic perspective on the proposed policy.

Keywords: public transportation policy, KRL fares, greenhouse gas emissions, environmental politics

Pendahuluan

Masalah transportasi di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) sangat kompleks, akibat tingginya tingkat urbanisasi dan pertumbuhan populasi yang pesat. Jabodetabek merupakan satu kesatuan wilayah megapolitan yang terintegrasi satu sama lain. Wilayah ini adalah sebuah konsep tata ruang yang menempatkan Jakarta secara terpadu sebagai pusat pergerakan sosial dan ekonomi dari wilayah-wilayah di sekitarnya (Cahyadi & Surtiarti, 2009). Kemacetan lalu lintas di Jabodetabek sudah menjadi fenomena umum. Volume kendaraan yang melintas di jalan sangat tinggi dibandingkan dengan kapasitas jalan. Data BPS (2023) menunjukkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya sejak 2016 hingga 2022. Kenaikan jumlah ini terjadi pada semua jenis kendaraan bermotor, mencakup mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor. Kenaikan jumlah kendaraan di kota-kota satelit DKI Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi belum masuk dalam perhitungan tersebut, padahal volume kendaraan di DKI Jakarta juga disebabkan pergerakan manusia dari kota-kota tersebut.

Kemacetan lalu lintas masih didominasi kendaraan pribadi berbahan bakar fosil dan penggunaan kendaraan tua yang tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan kualitas udara di wilayah Jabodetabek menjadi buruk. Berdasarkan data dari IQAir dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta sering kali tercatat sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, terutama pada jam sibuk ketika aktivitas transportasi berada di puncaknya. Polusi udara yang terjadi bahkan jauh di atas ambang batas aman yang ditetapkan dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kualitas udara di Jakarta kerap berada pada level yang dianggap tidak sehat bagi semua kelompok masyarakat, bukan hanya bagi mereka yang rentan (Arif, 2022).

Seiring peningkatan polusi udara, Kurious dari Katadata Insight Center (KIC) mengadakan

studi mengenai persepsi masyarakat terhadap kualitas udara di Indonesia yang dilakukan pada periode 21–22 Agustus 2023 dengan melibatkan 512 responden. Menurut studi ini, emisi transportasi dinilai oleh 82,2% responden sebagai sumber utama pencemaran udara. Sebanyak 55,5% responden juga berpendapat bahwa salah satu kendala untuk mengurangi polusi udara adalah adanya peningkatan taraf hidup masyarakat yang berbanding lurus dengan peningkatan emisi. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi. Banyak responden (50,6%) yang menyadari bahwa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Sebanyak 60,5% responden berpendapat bahwa penggunaan transportasi berbasis listrik perlu dilakukan pemerintah. Menariknya, kesadaran tersebut tidak membuat mereka beralih ke moda transportasi umum untuk menunjang aktivitasnya. Sebanyak 69,1% responden mengakui bahwa mereka memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju tempat kerjanya (Kurious- KIC, 2023).

Menurut Wahyudi & Alterkawi (2023), kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi publik disebabkan beberapa faktor. Transportasi umum seringkali padat terutama di jam sibuk, dengan waktu tunggu yang lama dan kondisi yang tidak nyaman. Jangkauan transportasi publik belum mencakup seluruh wilayah Jabodetabek secara merata, sehingga sulit bagi banyak warga di daerah pinggiran untuk menggunakannya. Sistem transportasi publik belum terintegrasi dengan baik, sehingga perpindahan antar moda dianggap memakan waktu dan merepotkan. Masyarakat merasa lebih fleksibel dan nyaman menggunakan kendaraan pribadi, meskipun menghadapi kemacetan.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jabodetabek akan menyebabkan terjadinya penurunan kecepatan optimum berkendara yang berdampak pada meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) secara signifikan (Karim, Priharyaningsih, & Veronika, 2018). Banyaknya karbon dioksida (CO²) yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, berkontribusi terhadap pemanasan global dan

perubahan iklim (Zainuddin, 2010). Perubahan iklim dan kebijakan politik terkait transportasi memiliki hubungan yang sangat erat. Kebijakan politik yang tidak mendukung transportasi publik efisien dan berkelanjutan, cenderung memperbesar ketergantungan pada kendaraan pribadi dan bahan bakar fosil. Kesepakatan internasional seperti Perjanjian Paris mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk menurunkan emisi GRK. Ini memaksa negara-negara untuk merancang kebijakan transportasi yang lebih bersih dan ramah lingkungan (Huang & Zhai, 2021).

Diplomasi iklim digunakan Pemerintah Indonesia untuk membangun identitas sebagai aktor lingkungan yang sah. Sebagai salah satu penghasil emisi terbesar, Indonesia menghadapi berbagai isu kelestarian lingkungan yang memerlukan kolaborasi internasional dalam pendanaan dan teknologi. Peralihan dari pendekatan realis ke konstruktivis menunjukkan bahwa pengurangan emisi gas rumah kaca tidak hanya menyelesaikan masalah domestik, tetapi juga dapat memperkuat posisi Indonesia di komunitas global dalam isu-isu menyangkut lingkungan hidup (Alfarlianda, 2024).

Salah satu solusi menekan polusi kendaraan bermotor adalah dengan mendorong penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan. Diantara berbagai moda transportasi publik yang ada di Jabodetabek, Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi salah satu moda transportasi paling penting karena beberapa alasan. Faktor pertama adalah efisiensi waktu dan menghindari kemacetan. Jalanan di wilayah Jabodetabek terkenal dengan kemacetan lalu lintas yang parah, terutama pada jam-jam sibuk. KRL menjadi alternatif karena dapat menempuh jarak jauh lebih cepat tanpa terganggu oleh kemacetan jalan raya. Dengan jalur rel khusus, KRL lebih konsisten dalam hal waktu tempuh. Di sisi lain, tarif tiket KRL relatif terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Harga yang murah membuat KRL menjadi pilihan utama bagi pekerja, pelajar, dan masyarakat umum. Saat ini moda transportasi publik berbasis rel di Jabodetabek sudah bertambah dengan adanya Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT). Namun demikian, daya jangkauan

dan daya tampung KRL masih lebih unggul dibandingkan dengan LRT dan MRT.

Alih-alih fokus pada kebijakan yang mendorong penggunaan transportasi publik, pada pertengahan tahun 2024, pemerintah justru mewacanakan penerapan harga tiket KRL berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan alasan untuk menciptakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Wacana ini terungkap melalui munculnya dokumen Nota Keuangan APBN 2025. Pemerintah beralasan subsidi tiket KRL saat ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk golongan yang mampu. Melalui penerapan harga tiket berbasis NIK, pemerintah dapat mengidentifikasi pengguna yang berhak menerima subsidi, seperti masyarakat berpenghasilan rendah. Penggunaan NIK juga diharapkan dapat mengurangi beban subsidi pemerintah yang terus meningkat seiring dengan tingginya penggunaan KRL. Subsidi yang lebih tepat sasaran memungkinkan efisiensi penggunaan anggaran negara dalam kondisi ekonomi yang memerlukan penghematan di berbagai sektor.

Kebijakan tarif tiket KRL berbasis NIK, meskipun bertujuan untuk menekan subsidi yang tidak tepat sasaran, berpotensi menurunkan minat masyarakat dalam menggunakan KRL, terutama di kalangan pengguna yang selama ini terbantu oleh subsidi umum. Padahal, sejak revolusi KRL pada tahun 2013 yang menghapus variasi kelas dan menerapkan tarif seragam, jumlah penumpang KRL Jabodetabek mengalami lonjakan signifikan (Badan Pusat Statistik, 2016; 2018; 2023). Penyeragaman tarif ini berhasil menghilangkan kesan “kasta” dalam layanan KRL dan mendorong lebih banyak orang untuk beralih ke transportasi publik.

Wacana kebijakan tarif KRL berbasis NIK menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama pengguna setia KRL. Menurut Deddy Herlambang, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN), transportasi massal di berbagai negara umumnya menerapkan tarif yang sama bagi semua penumpang karena layanan yang diberikan tidak berbeda (BBC News Indonesia, 2024). Analisis kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan, berpandangan bahwa semua pengguna KRL

berhak mendapat subsidi karena telah memilih moda transportasi yang membantu mengurangi kemacetan (Kompas.com, 2024). Sebuah survei terhadap para penumpang KRL dari stasiun keberangkatan Bekasi menunjukkan bahwa meskipun memiliki kendaraan pribadi, sebanyak 71% dari pengguna komuter memilih menggunakan KRL karena alasan jarak tempuh dan biaya (Quinta & Prakoso, 2016). Banyak keberatan yang kemudian muncul di media sosial. Mayoritas komentar yang muncul menyatakan ketidaksetujuan terhadap wacana perbedaan tarif karena transportasi publik dipandang masyarakat sebagai moda transportasi yang seharusnya terbuka bagi siapapun, serta mudah diakses oleh masyarakat luas tanpa memandang kelas ekonomi (BBC News Indonesia, 2024).

Banyaknya respons keras dari masyarakat tersebut menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan rencana tarif KRL berdasar NIK pada tahun 2025 dan mematangkan kembali sebelum diterapkan (Aprilia, 2024). Diperlukan adanya suatu kajian awal terkait efektivitas penggunaan NIK sebagai basis dalam penentuan tarif transportasi umum. Oleh karenanya, tulisan ini membahas mengenai bagaimana kendala yang mungkin dihadapi terkait rencana penerapan sistem tarif transportasi umum berbasis NIK? Apa dampak yang akan ditimbulkan akibat rencana penerapan sistem tarif transportasi umum, terutama tarif KRL berbasis NIK?

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif melalui metode studi pustaka. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel media, maupun berbagai dokumen yang relevan. Tujuan utama dari studi pustaka untuk memahami perspektif teoretis yang ada, menemukan celah penelitian, dan menyusun kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Peneliti kemudian menginterpretasikan data yang diperoleh secara kritis dan komprehensif untuk menjawab pertanyaan penelitian (Widiarsa, 2019). Analisis terhadap penggunaan NIK sebagai basis penentuan tarif transportasi penting dilakukan agar rencana kebijakan yang dibuat memiliki

dasar kajian akademik, sehingga dalam implementasinya kelak dapat terpecahkan.

Transformasi Kebijakan Transportasi Publik di Perkotaan Indonesia

Selain berkaitan dengan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, transportasi umum juga merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. Menurut Silver et al (2023), segregasi sosial di perkotaan dan kurangnya akses transportasi perkotaan yang memadai seringkali menjadi hambatan bagi kelompok yang kurang beruntung untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait untuk membuat suatu regulasi dan kebijakan guna memastikan efektivitas transportasi umum.

Untuk mengintegrasikan transportasi publik di daerah aglomerasi Jabodetabek, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengkoordinasikannya melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sementara itu, rencana penanganan transportasi terpadu perkotaan untuk daerah aglomerasi di wilayah Jabodetabek diatur melalui Perpres No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Selain itu, berbagai aturan hukum yang eksis, seperti UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, telah menekankan bahwa setiap transportasi harus dapat melayani perpindahan antarmoda.

Pembaharuan kebijakan transportasi publik secara luas maupun khusus di wilayah aglomerasi Jabodetabek pada akhirnya akan memengaruhi bagaimana isu lingkungan menjadi konsep penting dalam proses mewujudkan integrasi sistem transportasi di

Jabodetabek. Roe (1991) menilai bahwa proses-proses semacam ini menjadi dasar bagi narasi pembangunan yang mengaitkan asumsi-asumsi tentang masalah lingkungan dengan kebijakan dan tindakan. Perubahan iklim dan kebijakan sektor transportasi memiliki keterkaitan erat dalam upaya mencapai netralitas karbon. Menurut (Huang & Zhai, 2021), dekarbonisasi transportasi menjadi elemen kunci dalam menurunkan emisi dan mencapai tujuan pembatasan pemanasan global di bawah 1,5°C. Hal ini perlu diupayakan pemerintah sebagai bagian dari komitmen terhadap Paris Agreement yang telah diratifikasi Indonesia.

Upaya dekarbonisasi sektor transportasi menghadapi berbagai hambatan, diantaranya kebijakan yang tidak memadai, investasi rendah, dan resistensi dari masyarakat. Teknologi seperti kendaraan listrik dan biofuel dapat membantu mengurangi emisi. Namun demikian, tanpa dukungan kebijakan yang kuat, seperti subsidi dan regulasi emisi ketat, dampaknya akan terbatas. Di tengah isu perubahan iklim yang mendesak pentingnya dekarbonisasi transportasi, pemerintah justru membuat dan bahkan terus memperpanjang kebijakan yang mempermudah kredit pembelian kendaraan bermotor melalui skema uang muka 0% (Kontan.co.id, 2024). Hal ini turut memengaruhi tingginya angka pertumbuhan sepeda motor di wilayah Pulau Jawa (Krestanto, 2019).

Kebijakan transportasi yang terpadu dengan kebijakan urbanisasi juga menjadi faktor kunci. Konsep transportasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral upaya mengatasi masalah transportasi di kota-kota besar di Indonesia. Kota-kota metropolitan yang memiliki populasi lebih dari dua juta orang mengalami peningkatan kebutuhan mobilitas akibat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang signifikan sepanjang hari. Dalam penelitian yang dilakukannya, Sutandi (2015) berpendapat bahwa untuk mencapai transportasi berkelanjutan dibutuhkan regulasi yang mendukung dan manajemen tata ruang kota yang baik. Penyusunan kebijakan kota harus diarahkan untuk mendukung pengurangan kemacetan dan memastikan operasi transportasi

umum yang lebih efisien. Penggunaan lahan kota harus dioptimalkan untuk mendukung infrastruktur transportasi umum yang berkelanjutan, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat.

Guna memperbaiki sistem transportasi menjadi terpadu, berkelanjutan, dan lebih ramah lingkungan, perubahan tidak hanya harus datang dari teknologi, melainkan juga melalui perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat terhadap transportasi. Hal ini misalnya seperti preferensi untuk menggunakan transportasi umum dan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi (F. Creutzig, et al., 2015). Terdapat beberapa motivasi yang mendorong individu, terutama di Pulau Jawa, untuk memiliki kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor. Salah satu motivasi utama adalah peningkatan daya beli masyarakat seiring pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB per kapita. Ketika ekonomi tumbuh, masyarakat memiliki pendapatan lebih tinggi yang memungkinkan mereka bergeser dari pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder menjadi kebutuhan tersier, seperti membeli kendaraan pribadi. Terdapat kecenderungan pada budaya dan gaya hidup masyarakat, terutama di perkotaan, yang melihat kepemilikan kendaraan pribadi sebagai salah satu simbol status sosial. Selain itu, kemudahan transportasi dengan sepeda motor juga menjadi faktor penting. Sepeda motor dianggap lebih efisien dalam menghadapi kemacetan lalu lintas dan memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan transportasi umum. Kondisi transportasi publik di kota-kota besar masih menghadapi berbagai tantangan. Di Jakarta misalnya, meskipun ada upaya untuk meningkatkan sistem transportasi, seperti pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), LRT, MRT dan Jaklingko, tetapi hingga saat ini masalah seperti kemacetan, kurangnya integrasi antarmoda, dan kualitas layanan yang belum optimal masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kondisi transportasi publik di Jakarta belum sepenuhnya baik dan masih memerlukan perbaikan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini

menyebabkan banyak warga masih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Pentingnya peran sektor transportasi mendorong sejumlah akademisi untuk melakukan kajian seputar isu ini. Penelitian yang dilakukan Pramesi et al (2024) misalnya, yang mengkaji transportasi publik berkelanjutan dalam perspektif lingkungan. Menurutnya, pemilihan jalur layanan transportasi publik sangat berkaitan dengan efektivitas dan minat penumpang terhadap penggunaan kendaraan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, Sinaga et al (2019) melihat BRT sebagai contoh transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam implementasi kebijakan transportasi publik untuk memastikan aksesibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan layanan transportasi di wilayah perkotaan seperti Jakarta.

Strategi integrasi transportasi publik di daerah aglomerasi dapat dilakukan diantaranya dengan integrasi tarif tiket sehingga integrasi sistem pembayaran (*cashless transaction*) melalui pelayanan yang multiguna dapat diterapkan. Dalam menjalankan strategi tersebut, BPTJ di bawah Kementerian Perhubungan berpegang pada sembilan konsep RITJ, yang salah satunya mencakup transportasi ramah lingkungan. Konsep transportasi ramah lingkungan mencakup beberapa kriteria seperti, transportasi dan rencana pembangunan yang terintegrasi, tereduksinya polusi udara akibat perubahan perilaku masyarakat yang beralih dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan transportasi publik, hingga terkendalinya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang kian meningkat akibat pertumbuhan kendaraan bermotor (Sitorus, Hidayat, & Prasetya, 2014; BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023). Integrasi tarif tiket bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan berbagai moda transportasi publik dengan biaya yang lebih efisien dan terjangkau. Strategi integrasi tarif pernah diterapkan oleh PT JakLingko Indonesia. Survei yang dilakukan Forino dan Putranto (2023) terhadap 150 pengguna transportasi publik di Jakarta menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung kebijakan integrasi

tarif, dengan harapan akan semakin banyak orang yang beralih ke transportasi umum dan dapat menekan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi. Namun, integrasi tarif ini harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan layanan transportasi publik agar benar-benar dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi.

Penelitian terkait tarif transportasi umum yang melihat pengaruh kebijakan tarif terhadap besaran subsidi juga telah dilakukan. Hasil penelitian Ignatius *et al.* (2020) menunjukkan bahwa untuk tarif KRL lintas Tanah Abang–Rangkasbitung, kemampuan membayar masyarakat terhadap tarif KRL lebih besar daripada tarif eksisting. Selain itu, menurutnya tarif yang berlaku sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima. Kajian serupa oleh Hafizha & Utomo (2021) juga memperlihatkan bahwa skema penerapan tarif yang eksisting pada lintas Yogyakarta–Solo Balapan, sudah sesuai dengan kemampuan dan kesediaan masyarakat yang menjadi responden, termasuk jika diberlakukan tarif progresif. Walaupun kajian mengenai tarif transportasi umum telah banyak dilakukan, akan tetapi rencana penentuan tarif tiket transportasi umum, seperti KRL, berbasis NIK merupakan suatu hal yang baru, khususnya di Indonesia, sehingga kajian yang membahas hal ini pun masih jarang dilakukan. Melihat kebutuhan yang ada, tulisan ini mencoba melakukan kajian awal sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik untuk merespons terkait rencana kebijakan tarif KRL berbasis NIK.

KEBIJAKAN TARIF TRANSPORTASI UMUM DI BEBERAPA NEGARA

Salah satu isu utama pengembangan sistem transportasi umum adalah penentuan tarif. Perencanaan tarif sistem transportasi umum harus mempertimbangkan berbagai tujuan yang ingin dicapai (Vuchic, 2005). Beberapa tujuan dasar dari sistem tarif adalah menarik jumlah penumpang yang maksimal, menghasilkan pendapatan optimal bagi operator angkutan umum, serta mencapai tujuan yang lebih spesifik, seperti meningkatkan mobilitas pekerja, siswa, atau orang tua, meningkatkan akses

pada area-area tertentu, dan mempromosikan penggunaan moda angkutan umum yang lebih efisien. Dengan demikian, dalam menetapkan tarif, perlu digunakan prinsip keadilan serta melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu penyedia jasa transportasi, pengguna jasa angkutan, dan pemerintah (Tamin *et al*, 1999).

Terdapat beberapa sistem tarif transportasi umum yang digunakan di berbagai negara, seperti tarif seragam, tarif berdasar zona, tarif berdasar jarak, dan tarif berdasar waktu. Pada *tarif seragam*, tarif yang dibayarkan tetap sama tanpa mempertimbangkan jarak maupun waktu tempuh. Contoh negara yang menerapkan sistem tarif ini, yaitu Amerika Serikat, terutama di kota New York untuk layanan subway dan bus. Pada *tarif berdasar zona*, suatu wilayah dibagi menjadi beberapa zona. Tarif dihitung berdasar jumlah zona yang dilintasi oleh penumpang. Semakin banyak zona yang dilintasi, maka semakin tinggi tarif yang dibebankan (Hariani *et al*, 2020). Belanda, terutama di kota Amsterdam, dan Hongkong merupakan contoh yang menggunakan sistem tarif zona. Meskipun hampir serupa dengan tarif berdasar zona, tetapi pada *tarif berdasar jarak*, suatu wilayah tidak dibagi menjadi beberapa zona. Tarif transportasi umum ditentukan menurut jauh dekatnya jarak yang ditempuh penumpang. Semakin jauh perjalanan, maka semakin tinggi tarifnya. Beberapa negara yang menerapkan sistem tarif berdasar jarak, antara lain Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu, pada *tarif berdasar waktu*, tarif dapat bervariasi tergantung pada waktu saat perjalanan dilakukan. Tarif lebih tinggi diberlakukan pada jam sibuk dan lebih rendah saat diluar jam sibuk. Dalam menentukan sistem tarif yang digunakan, suatu negara dapat saja tidak hanya menggunakan satu sistem saja, tetapi mengkombinasikan beberapa sistem penentuan tarif, seperti misalnya Singapura yang menggabungkan sistem tarif berdasar jarak dan waktu. Contoh lainnya yaitu Inggris, terutama di kota London, yang menentukan besaran tarif berdasar waktu dan zona. Jika Singapura dan Inggris mengkombinasikan dua sistem tarif, China bahkan menggunakan tiga sistem tarif sekaligus. Di beberapa kota besar seperti Beijing dan Shanghai, penentuan tarif dilakukan berdasar kombinasi jarak, zona, dan

waktu.

Dalam upaya memenuhi prinsip keadilan terkait kesejahteraan, terutama bagi kelompok berkemampuan ekonomi menengah ke bawah, sejumlah negara mempertimbangkan faktor ekonomi dalam penentuan tarif transportasi umum. Negara-negara seperti Inggris, Perancis, dan India memberikan tarif subsidi kepada kelompok-kelompok tertentu seperti lansia, pensiunan, pelajar maupun mahasiswa. Selain itu, terdapat pula sejumlah negara yang menerapkan tarif diskon atau tarif subsidi bagi masyarakat dengan penghasilan rendah, seperti di Amerika Serikat, Australia, Perancis, dan Brazil. Melalui kebijakan ini, transportasi umum diupayakan agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Agar kebijakan pemberian tarif khusus berdasar faktor ekonomi ini dapat tepat sasaran, diperlukan adanya basis data yang akurat untuk menentukan siapa saja yang memang berhak memperoleh tarif khusus transportasi umum. Amerika Serikat dan Perancis misalnya, mempunyai sistem statistik yang kuat, termasuk sensus penduduk dan survei ekonomi, yang memungkinkan identifikasi kelompok tertentu untuk mendukung kebijakan sosial dan ekonomi. Sistem pendataan yang komprehensif juga dimiliki oleh Australia. Di negara ini terdapat berbagai program untuk mendukung kelompok rentan, termasuk pemantauan status ekonomi. Sebagai salah satu negara yang juga memberikan tarif subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Brazil memiliki sistem *Cadastro Unico* yang mendaftarkan keluarga berpenghasilan rendah untuk membantu dalam program bantuan sosial.

Pada sistem tarif transportasi umum di Indonesia, terutama fokus dalam tulisan ini yaitu sistem tarif tiket KRL, penentuan tarif menggunakan sistem progresif berbasis jarak tempuh. Sistem tarif progresif ini tetap berlaku sampai batas maksimum jarak perjalanan pada jaringan KRL. Terdapat tarif khusus atau diskon untuk lansia, disabilitas, dan program tarif khusus pada jam-jam tertentu di beberapa kesempatan. Sayangnya, hingga saat ini tarif khusus ini tidak bersifat reguler. Berkaca pada sejumlah negara yang menerapkan tarif khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, umumnya

memiliki sistem pendataan, khususnya mengenai status ekonomi warganya, yang telah terbangun kuat, terstruktur dan terintegrasi. Oleh karenanya, apabila pemerintah menghendaki adanya suatu kebijakan berbasis data kependudukan agar tarif khusus yang diberikan dapat benar-benar tepat sasaran pada kelompok yang membutuhkan, maka perlu terlebih dahulu dilihat seperti apa sistem integrasi pendataan di Indonesia saat ini.

Persoalan Integrasi Data di Indonesia

Wacana kebijakan penentuan tarif KRL berdasar NIK menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna akan adanya kenaikan biaya. Juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, menuturkan bahwa tujuan dari rencana penerapan skema tersebut agar subsidi yang diberikan lebih tepat sasaran (BBC News Indonesia, 2024). Menurut Miming Raharja, pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung, meskipun penggunaan NIK dalam penentuan tarif berdasarkan kemampuan ekonomi secara konsep dapat dianggap adil, penerapannya bisa menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama yang dikhawatirkan adalah terkait dengan validitas data NIK yang digunakan sebagai basis penentuan tarif. Jika data NIK tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, bisa saja tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi penumpang, yang pada akhirnya dapat merugikan sebagian besar masyarakat, terutama kelompok yang seharusnya mendapatkan subsidi (Siswadi, 2024).

Di Indonesia, terdapat beberapa data yang biasa digunakan untuk keperluan layanan publik, khususnya yang terkait status ekonomi masyarakat. *Pertama*, data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Seperti yang tertuang dalam Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib memiliki NIK yang berlaku seumur hidup dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, termasuk pada kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). NIK digunakan sebagai basis pada penerapan KTP secara nasional, sebagaimana yang tertuang

pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009.

Program e-KTP merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Pada dasarnya, SIAK adalah data kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia dalam suatu sistem jaringan integral yang di dalamnya semua data kependudukan dari berbagai daerah saling terkoneksi. SIAK dimaksudkan untuk terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; bersifat permanen, wajib, dan berkelanjutan; terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional; serta tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses. Dengan demikian, SIAK dapat dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya (Santhi & Junaidi, 2024).

Sebagai instansi pelaksana SIAK, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri, merupakan instansi yang dapat mengeluarkan dan mengelola NIK. NIK menjadi nomor identitas tunggal sebagai kunci akses setiap penduduk untuk mendapatkan berbagai pelayanan publik. Keberadaan NIK, data kependudukan, dan e-KTP menjadi satu kesatuan yang utama dalam penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. Secara umum, data NIK dianggap cukup akurat dan *up-to-date* karena merupakan informasi yang wajib diperbarui secara berkala. Namun, terdapat tantangan dalam hal validitas data, seperti data penduduk ganda atau ketidakcocokan data yang mungkin memerlukan perbaikan.

Kedua, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data Susenas merupakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang sangat penting di Indonesia. Susenas menyediakan data berbagai aspek sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesempatan kerja. Secara umum, tujuan

mengumpulkan data melalui Susenas adalah tersedianya data mengenai kesejahteraan rakyat yang dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Ketiga, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah (Kemensos, 2021). Meskipun dalam UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, DTKS dinyatakan diperbaharui setiap 2 tahun, tetapi Kemensos sejak tahun 2023 menyatakan bahwa data tersebut diperbarui setiapbulan.

Berbagai instansi pemerintah kerap kali mengeluarkan data mengenai hal yang sebenarnya hampir sama atau saling berkaitan. Hal ini kerap menimbulkan kebingungan bagi masyarakat atau pun para pengguna data terkait data mana yang paling akurat untuk dirujuk. Sehubungan dengan hal tersebut, Deputy bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan pentingnya dibangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau proses bisnis yang terintegrasi agar data dan layanan antarsatu instansi pemerintah dengan instansi lainnya dapat saling terhubung dan terintegrasi. Diakuinya bahwa saat ini, sifat berbagai layanan di instansi pemerintah masih terpisah atau tidak terintegrasi satu sama lain. Setiap instansi pemerintah berlomba-lomba melakukan perbaikan layanan, tetapi tidak dilakukan secara terpadu dan terhubung antarinstansi terkait (Menpan RB, 2021).

Untuk memberikan pelayanan publik yang terpadu, penerapan sistem integrasi menjadi hal mendasar yang penting pemerintah lakukan. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan perlu diperhatikan serius oleh pemerintah ketika akan menerapkan sistem integrasi (Ishak, 2022). *Pertama*, kompleksitas. Lingkup sektor publik sangatlah besar dan kompleks mengingat sektor ini mengurus data

penting yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya memerlukan kehati-hatian karena apabila terjadi kesalahan dalam penerapan teknologinya akan berpengaruh pada masyarakat luas. Oleh karena itu, implementasi sistem integrasi tentu akan memerlukan waktu yang tidak instan dan tenaga yang besar karena kompleksitasnya.

Kedua, pemilihan *software* yang tepat. Penggunaan perangkat lunak yang tepat akan berpengaruh pada alur kerja sektor publik. Sistem integrasi perlu menggabungkan beberapa instansi pemerintah sekaligus agar penyatuan data lebih efektif.

Ketiga, belum adanya integrasi regulasi terkait akses data. Menurut Kemenkominfo, saat ini setiap instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi secara baik. Namun, beberapa instansi mengalami kesulitan untuk meminta dan berbagi data karena ada regulasi yang menahannya. Selain itu, pengelolaan data pun masih bersifat terpisah sehingga tidak jarang terjadi duplikasi data maupun perbedaan data. Misalnya saja terkait data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kemendagri yang bisa saja terdapat perbedaan dengan data kependudukan dari BPS, maupun data lainnya terkait layanan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, untuk mempercepat penerapan sistem integrasi, terlebih dahulu diperlukan adanya integrasi regulasi guna menjawab persoalan mengenai aksesdata.

Keempat, manajemen perubahan. Mengganti sistem yang telah berjalanbertahun-tahun dengan suatu sistem baru tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan sistem itu sendiri, melainkan juga kesiapan para petugas pelaksana. Oleh karenanya, pemerintah juga perlu mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada para petugas pelaksana untuk mempercepat proses integrasi. Tidak hanya berhenti disitu, proses tersebut kemudian juga perlu diteruskan pada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Manajemen perubahan menjadi salah satu hal krusial dalam menghadapi tantangan yang besar seperti ini.

Bappenas menekankan pentingnya melakukan perbaikan basis data kependudukan, terutama terkait status ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Bappenas meluncurkan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) guna melengkapi target dan sasaran pembangunan yang mampu membawa kesejahteraan masyarakat. Sistem Satu Data Regsosek ini menekankan pentingnya integrasi data sosial dan ekonomi berbasis NIK untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memastikan ketepatan target. Integrasi dan pembaruan data kolaboratif dan berkala antarinstansi pemerintah sangat penting untuk menghasilkan data Regsosek yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan (Bappenas, 2024). Namun demikian, mengingat data Regsosek ini masih sangat baru diluncurkan, saat ini hanya beberapa pemerintah daerah serta beberapa perwakilan Lembaga dan Kementerian saja yang telah memiliki hak ases data Regsosek (Berita Gorontalo, 2024). Selain itu, bagaimana keefektifan implementasi dari sistem data Regsosek ini pun masih perlu untuk diuji dan dilihat lebih lanjut.

Melihat adanya persoalan integrasi data di Indonesia, maka adanya wacana penerapan kebijakan tarif tiket transportasi berbasis NIK berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam implementasinya. Kondisi sistem pendataan di Indonesia saat ini memunculkan kekhawatiran terkait akurasi dan keterbaruan data apabila tarif tiket KRL berdasarkan NIK jadi diterapkan ke depannya. Data kependudukan yang digunakan pemerintah bisa saja tidak sepenuhnya *up-to-date* atau kurang lengkap, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi dari pemilik NIK yang sesungguhnya.

Tantangan dan Peluang Menuju Transportasi Publik yang Adil dan Ramah Lingkungan

Dalam ranah konseptual, rencana skema penentuan tarif KRL menggunakan NIK agar subsidi yang diberikan dapat tepat sasaran sesuai kemampuan ekonomi merupakan suatu langkah

yang adil. Hal ini sejalan dengan pandangan Rawls (1971) yang memahami keadilan sebagai perlakuan yang adil terhadap kelompok yang kurang beruntung guna mengurangi ketidaksetaraan dengan memberikan perlakuan yang berbeda tetapi dilakukan secara adil. Martens *et al* (2019) mendefinisikan keadilan sebagai suatu pendistribusian manfaat dan beban secara adil. Berdasarkan definisi tersebut, keadilan dibagi menjadi tiga komponen utama: *pertama*, manfaat dan biaya yang terdistribusi; *kedua*, populasi yang terdampak pendistribusian tersebut; *dan ketiga*, pengukuran atau prinsip yang digunakan untuk menilai apakah pendistribusian tersebut telah adil secara etis, serta memperhatikan kesejahteraan dan hak individu. Cara terbaik untuk mengatasi persoalan keadilan dalam transportasi adalah dengan memprioritaskan kebutuhan kelompok yang kurang beruntung atau terabaikan (Pereira & Karner, 2021).

Sementara itu, dalam ranah implementasi, sejumlah kendala terkait sistem pendataan di Indonesia berpotensi menyebabkan rencana kebijakan penentuan tarif KRL berdasar NIK menjadi salah sasaran dan bahkan menciptakan sistem dua tingkat (*dual-tier system*) yang memisahkan pengguna berdasarkan status ekonomi. Hal ini jelas membuka peluang ketidakadilan di masyarakat karena bertentangan dengan prinsip keadilan akses terhadap transportasi publik, yang seharusnya melayani semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Martens (2017) menetapkan konsep akses sebagai fokus utama kebijakan transportasi yang adil. Menurutnya, dibutuhkan seperangkat norma tersendiri untuk membangun distribusi yang adil. Aturan-aturan untuk proses pengambilan keputusan kebijakan transportasi yang adil dirancang untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang tidak memiliki akses yang memadai. Selain itu, aturan-aturan tersebut juga digunakan sebagai panduan proses dalam upaya meningkatkan keadilan akses bagi kelompok-kelompok yang selama ini masih tidak cukup mempunyai akses yang memadai terhadap sarana transportasi.

Masyarakat yang tidak tergolong miskin menurut data NIK pada dasarnya tetap

membutuhkan akses dan tarif KRL yang terjangkau. Rawls (1999) menekankan bahwa keadilan tidak hanya berfokus pada individu saja, tetapi juga pada struktur sosial yang lebih luas yang memengaruhi kesejahteraan semua anggota masyarakat. Menurut survei yang dilakukan lembaga Kedai KOPI terhadap 1.100 responden di Jabodetabek, sebanyak 78,5% dari responden menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana kenaikan tarif KRL berbasis NIK. Alasan utama penolakan ini mencakup kekhawatiran akan peningkatan beban ekonomi masyarakat serta ketidakpercayaan bahwa sistem berbasis NIK akan tepat sasaran dan efektif dalam menyalurkan subsidi secara akurat. Selain itu, pengguna KRL juga khawatir kebijakan ini akan memperumit proses di stasiun, meningkatkan antrian, dan berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi mereka. Hanya sekitar 20,6% responden yang merasa kebijakan tarif berbasis NIK ini akan berhasil (indopos.co.id, 2024). Banyak masyarakat yang menganggap sistem saat ini sudah cukup efisien dan merasa bahwa kenaikan tarif bisa memberatkan pengguna KRL yang sudah mengandalkan transportasi umum ini untuk kebutuhan sehari-hari (Janati & Maullana, 2024).

Sejalan dengan hasil survei tersebut, Institut Studi Transportasi (INSTRAN) memberikan tanggapan kritis terkait rencana penerapan tarif KRL berbasis NIK. Menurut INSTRAN, skema ini dianggap berisiko meningkatkan beban pada penumpang kelas menengah, yang bisa mengurangi minat mereka menggunakan transportasi publik. Penggunaan NIK untuk menentukan tarif bersubsidi menimbulkan kekhawatiran akan ketepatan sasaran subsidi mengingat pengguna KRL berasal dari berbagai latar belakang ekonomi dan banyak dari mereka bergantung pada tarif yang terjangkau untuk kegiatan harian. Pengamat dari berbagai institusi juga mengkhawatirkan bahwa pembatasan subsidi berdasarkan NIK akan mempersulit akses bagi pengguna yang tidak termasuk dalam kategori penerima subsidi, meskipun mungkin masih membutuhkan bantuan tarif murah (okefinance, 2024).

Sejumlah kajian terkait simulasi kenaikan tarif KRL Jabodetabek mengindikasikan bahwa

penyesuaian harga tiket bisa berdampak pada minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi publik ini, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Menurut Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mayoritas pengguna KRL adalah penumpang tetap dengan perjalanan harian yang sifatnya tidak elastis. Artinya, perubahan tarif cenderung tidak memengaruhi volume pengguna secara signifikan, terutama di kalangan penumpang berpenghasilan menengah keatas yang tetap mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama. Namun, bagi pengguna yang lebih sensitif terhadap biaya, terutama dari kelompok ekonomi bawah, kenaikan tarif dapat menjadi disinsentif.

Yusuf Wibisono dari Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) berpendapat bahwa menaikkan tarif KRL, yang melayani kebutuhan transportasi massal masyarakat, tidak sejalan dengan upaya pengurangan kemacetan dan emisi karbon di perkotaan. Ia menilai sebaiknya subsidi KRL diperbesar agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah (Putri, 2024). Kritik serupa disampaikan analis kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan, yang khawatir bahwa subsidi berdasarkan NIK akan mendorong masyarakat yang tidak mendapat subsidi beralih ke kendaraan pribadi. Menurutnya, kebijakan ini justru bertentangan dengan misi pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan polusi dengan meningkatkan penggunaan transportasi publik (Kompas.com, 2024).

Jika kebijakan ini diberlakukan, artinya ada kemungkinan penurunan jumlah penumpang KRL, sehingga kapasitas kereta tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ini berpotensi mengurangi efisiensi operasional sistem transportasi. KRL adalah moda transportasi berbasis listrik yang relatif rendah emisi per penumpang. Jika penumpangnya berkurang, keuntungan lingkungan dari operasional KRL juga menurun. Jika kebijakan ini mengurangi daya tarik transportasi publik, insentif untuk pengembangan dan perbaikan sistem KRL juga berpotensi menjadi berkurang. Fokus investasi mungkin bergeser ke infrastruktur transportasi

pribadi seperti jalan tol, yang mendorong penggunaan kendaraan pribadi dan juga berarti meningkatkan emisi GRK sehingga berbahaya bagi lingkungan.

Berkaitan dengan kebijakan transportasi publik dan isu lingkungan di Jabodetabek, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk memengaruhi, memperbaiki, atau pun merekayasa perilaku masyarakat (*a tool of social engineering*) (Lathif, 2017; Matnuh, 2018; Rahardjo, 2006). Dalam konteks Indonesia, Kusumaatmadja (2006) memandang hukum sebagai sarana pembaruan regulasi, termasuk dalam kebijakan transportasi publik di Jabodetabek. Kebijakan ini tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan akses terhadap layanan publik, tetapi juga untuk mendorong perubahan nilai-nilai sosial masyarakat terkait transportasi dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Pound (1940) dan Roe (1991) yang menyatakan bahwa kebijakan transportasi adalah sarana untuk merekayasa perilaku manusia terhadap transportasi dan pelestarian lingkungan.

Studi Litman (2013) menunjukkan bahwa kebijakan transportasi dan perencanaan transportasi publik memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat, termasuk udara bebas polusi, merupakan hak warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, simpul transportasi yang terintegrasi dan udara yang bersih harus dipenuhi berdasarkan prinsip keadilan sosial yang distributif, menjadikannya kewajiban negara untuk memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga.

Kendaraan pribadi dan angkutan barang merupakan kontributor utama emisi GRK (Aminzadegan, Shahriari, Mehranfar, & Abramovic, 2022; Kemenhub RI, 2024). Sebagai salah satu penyumbang terbesar GRK, sektor transportasi memainkan peran penting dalam pemanasan global dan perubahan iklim (Mubarak, 2024). Oleh karena itu, keberlanjutan sektor ini harus menjadi prioritas dalam agenda politik dan kebijakan publik. Pemerintah yang berkomitmen terhadap mitigasi perubahan iklim

cenderung mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur transportasi ramah lingkungan. Sebaliknya, pemerintah yang lebih fokus pada agenda pertumbuhan ekonomi sering kali mengutamakan industri bahan bakar fosil, yang kurang mendukung kebijakan hijau.

Dibutuhkan *political will* dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah di setiap negara untuk mendorong kebijakan transportasi publik yang ramah lingkungan (Huang & Zhai, 2021). Banyak negara telah mendukung transisi menuju moda transportasi hijau, seperti kendaraan listrik, efisiensi sistem transportasi umum, pengembangan infrastrukturnya, serta penyediaan fasilitas untuk pesepeda dan pejalan kaki. Transisi ini membutuhkan investasi besar yang sering menjadi isu politik, terutama di negara berkembang.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan GRK dan mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui sektor transportasi dengan meningkatkan efisiensi energi dan memanfaatkan energi baru terbarukan. Kebijakan pemerintah mencakup promosi kendaraan listrik serta pengembangan transportasi massal berbasis rel modern, seperti KRL, MRT, LRT, dan Kereta Api Cepat Whoosh (Kemenhub RI, 2024).

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim, yang secara spesifik tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2023. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim global dengan mengurangi emisi GRK serta menjaga kelestarian lingkungan.

Di sisi lain, meskipun saat ini pemerintah telah menyatakan akan menunda penerapan rencana kebijakan penentuan tarif KRL berdasar NIK pada tahun 2025, tapi bukan berarti bahwa rencana ini kemudian dibatalkan. Padahal, apabila kedepannya rencana kebijakan ini

diberlakukan, maka dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa kebijakan ini akan sangat kontradiktif dengan komitmen Indonesia terhadap upaya pengendalian perubahan iklim. Banyak kerugian yang harus ditanggung jika rencana kebijakan ini diterapkan tanpa kajian dan persiapan yang mendalam dari berbagai aspek. Menurut Kraft (2011), terdapat tiga perspektif yang semestinya dipenuhi dalam politik lingkungan, *pertama*, perspektif ilmu pengetahuan. Menurut perspektif ini, pemerintah seharusnya berinvestasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadikannya sebagai referensi utama dalam pengambilan kebijakan. *Kedua*, perspektif ekonomi yang melihat aspek untung rugi sebagai faktor utama. Kerusakan lingkungan merupakan dampak dari perhitungan ekonomi yang tidak memperhatikan jasa lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, dalam menetapkan kebijakan harga, pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan keadilan dan konservasi lingkungan hidup. *Ketiga*, perspektif etika lingkungan yang mengkritisi gaya hidup manusia yang memikirkan kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan aspek kehidupan non-manusia.

Kepedulian pemerintah terhadap isu lingkungan sangat memengaruhi kebijakan politik yang ditempuh. Regulasi yang dibuat tidak hanya mendorong, tetapi juga membentuk dan bahkan dapat memaksa perubahan kebiasaan masyarakat menuju pola transportasi yang lebih ramah lingkungan (Pound, 1940). Setiap kebijakan yang diambil terkait sumber daya alam akan membawa dampak terhadap konfigurasi kekuatan ekonomi dan sosial di dalam sebuah masyarakat. Kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya dapat bertambah lebar atau sempit karena kebijakan atas sumber daya alam yang diambil pemerintah. Dalam konteks keadilan, rencana kebijakan penentuan tarif KRL berbasis NIK merupakan suatu hal yang adil apabila penerapannya dapat dilakukan secara baik. Oleh karenanya, sangat diperlukan pematangan analisis dan rencana penerapannya sehingga keadilan bagi masyarakat dalam penggunaan transportasi publik dapat tercapai, namun dengan tetap

bersinergi dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK guna berkontribusi dalam upaya global terhadap pengendalian perubahan iklim.

Penutup

Persoalan transportasi publik dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya menjadi tantangan yang terus diupayakan oleh pemerintah untuk diatasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah integrasi transportasi publik melalui penyesuaian tarif. Namun, kebijakan semacam ini tidak hanya memengaruhi pola perilaku masyarakat dalam menggunakan transportasi, tetapi juga menentukan apakah kepentingan publik yang bermakna dapat tercapai. Kebijakan transportasi harus dirancang secara strategis agar mampu mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum, sehingga berdampak pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan perbaikan kualitas lingkungan.

Komitmen pemerintah terhadap transportasi publik yang terintegrasi harus tercermin dalam kebijakan yang mengutamakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dibutuhkan *political will* yang kuat untuk memastikan kebijakan tersebut sejalan dengan target dan komitmen terhadap isu lingkungan, termasuk upaya mitigasi perubahan iklim. Dalam konteks ini, rencana penyesuaian tarif KRL berbasis NIK menjadi langkah yang mencerminkan integrasi transportasi dan keadilan substansial, sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan.

Namun, untuk memastikan kebijakan tersebut berhasil, pemerintah harus mengutamakan validitas data dalam penentuan tarif berbasis NIK. Integrasi data kependudukan dengan sistem transportasi serta koordinasi lintas sektoral menjadi hal yang sangat penting. Jika data yang digunakan tidak valid, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran dan dapat memicu ketidakpuasan masyarakat. Akibatnya, minat terhadap transportasi publik, khususnya KRL, dapat menurun.

Penurunan minat terhadap transportasi massal seperti KRL tidak hanya berdampak pada efisiensi mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini akan memperburuk kualitas lingkungan, menghambat upaya mitigasi perubahan iklim, dan menurunkan keberlanjutan sistem transportasi di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan transportasi dirancang secara cermat, adil, dan berbasis data yang akurat untuk mencapai tujuan bersama.

Referensi

- Alfarlianda, F. (2024). Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Malaysia: Upaya Bersama Dalam Mengatasi Isu-Isu Perubahan Iklim Periode 2019–2024. *Global Insights Journal Vol.1 No.1* <https://doi.org/10.36859/gij.v1j1.2522>.
- Aminzadegan, S., Shahriari, M., Mehranfar, F., & Abramovic, B. (2022, 28). Factors affecting the emission of pollutants in different types of transportation: A literature review. *Energy Reports*, 8.
- Aprilia, K. (2024, Oktober 4). Subsidi Tarif KRL berbasis NIK Sudah Dipastikan Batal Diterapkan pada 2025. Retrieved November 21, 2024, from <https://narasi.tv/read/narasi-daily/subsidi-tarif-krl-berbasis-nik-sudah-dipastikan-batal-diterapkan-pada-2025>
- Arif, A. (2022, Juni 19). *kompas.id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/06/18/konsentrasi-pm25-di-jakarta-membahayakan> diakses 23 September 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Transportasi DKI Jakarta 2015–2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Transportasi DKI Jakarta 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023, Oktober 17). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta, 2016–2022. Jakarta. Retrieved November 6, 2024, from <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/Nzg2IzI=/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan--unit--di-provinsi-dki-jakarta.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Transportasi Provinsi DKI Jakarta 2022* (Vol. 15). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2024, Juni 20). Bappenas Luncurkan Sistem Data Regsosek Untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045. Retrieved September 24, 2024, from <https://www.bappenas.go.id/berita/bappenas-luncurkan-sistem-data-regsosek-untuk-capai-visi-indonesia-emas-2045-cHjcd>
- BBC News Indonesia. (2024, September 3). Gaduh soal rencana penetapan tarif KRL berbasis NIK-Bagaimana mekanismenya dan mengapa dinilai tak tepat sasaran? Retrieved September 23, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gz09z4j25o>
- BBC News Indonesia. (2024, September 3). Gaduh soal rencana penetapan tarif KRL berbasis NIK - Bagaimana mekanismenya dan mengapa dinilai tak tepat sasaran? Retrieved September 27, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gz09z4j25o>
- Berita Gorontalo. (2024, Juni 21). Provinsi Gorontalo Terima Hak Akses Data Regsosek Nasional dari Menteri PPN/Bappenas. Retrieved September 24, 2024, from <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/06/21/provinsi-gorontalo-terima-hak-akses-data-regsosek-nasional-dari-menteri-ppn-bappenas/>
- BPS - Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Transportasi Provinsi DKI Jakarta 2022 Volume 15*, 2023. Jakarta: BPS.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Statistik Transportasi Provinsi DKI Jakarta 2022* (Vol. 15). Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Cahyadi, R., & Surtiarti, G. (2009). Penduduk dan Pembangunan Perumahan di Jabodetabek: Tantangan Pengembangan Megapolitan Jakarta. *Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. IV No. 1*, 55–72.
- CPI. (2016, 330). *TransMilenio: renewing Bogota's transport system*. Retrieved from Centre for Public Impact-A BCG FOUNDATION: <http://www.centreforpublicimpact.org/case-study/transmilenio>
- F. Creutzig, P., Jochem, O. Y., Edelenbosch, L., Mattauch, D. P., Vuuren, D., McCollum, J., & Minx. (2015). Transport: A Roadblock to Climate Change Mitigation? . *Science*, 350.

- FA, A. (2024). Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Malaysia: Upaya Bersama Dalam Mengatasi Isu-Isu Perubahan Iklim Periode 2019–2024. *Global Insight Journal*.
- FA, A. (2024). Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Malaysia: Upaya Bersama Dalam Mengatasi Isu-Isu Perubahan Iklim Periode 2019–2024. *Global Insights Journal*.
- Forino, B., & Putranto, L. (2023). Persepsi Pengguna Transportasi Umum di Jabodetabek terhadap Integrasi Tarif PT Jaklingko Indonesia. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil. Vol.6 No.1*, 71–84.
- Hariani, M. L., Santoso, I., & Wibowo, S. S. (2020). Analisis Kebijakan Struktur Tarif dan Pengaruhnya terhadap Besaran Subsidi (Studi Kasus: Trans Jakarta). *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(3), 219–234.
- Huang, M.-T., & Zhai, P. M. (2021). Achieving Paris Agreement Temperature Goals Requires Carbon Neutrality by Middle Century With Far-Reaching Transitions in The Whole Society. *Advance in Climate Change Research* 12, 281–286.indopos.co.id. (2024, Oktober 31). Survei: Mayoritas Masyarakat Jabodetabek Keberatan Tarif KRL dan PPn Naik serta Pembatasan Peralite. Retrieved November 24, 2024, from <https://www.indopos.co.id/nasional/2024/10/31/survei-mayoritas-masyarakat-jabodetabek-keberatan-tarif-krl-dan-ppn-naik-serta-pembatasan-peralite/>
- Ishak. (2022, Juni 24). Tantangan Penerapan Sistem Terintegrasi pada Sektor Publik. Retrieved September 24, 2024, from <https://digitaltransformation.co.id/tantangan-penerapan-sistem-terintegrasi-pada-sektor-publik/>
- Janati, F., & Maullana, I. (2024, September 4). *kompas.com*. Retrieved from *kompas.com*: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/09/04/11555471/kritik-wacana-subsidi-tarif-krl-berbasis-nik-penolakan-warga-dan?utm_source.
- Karim, A., Priharyaningsih, D., & Veronika, L. (2018). Proyeksi Kecepatan Kendaraan dan Emosi CO2 di DKI Jakarta Tahun 2015–2030 Dengan Pendekatan System Dynamic. *Jurnal Ilmu Ilmu Teknik Sipil Vol.2 No.1*.
- Katadata.co.id. (2023, Agustus 22). *survei cepat persepsi masyarakat terhadap kualitas udara*. Retrieved from Katadata.co.id: https://cdn1.katadata.co.id/media/files/2023/08/22/2023_08_22-17_18_53_b298b1cd7e74ed809676ed3d26e7b5d9.pdf
- Kemhub. (2024, 9 20). *Transportasi Umum Massal Indonesia Menuju Zero Emission*. Retrieved from Liputan Khusus Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan RI: <https://www.dephub.go.id/post/read/transportasi-umum-massal-indonesia-menuju-zero-emission>
- KemhubRI.(2024,920). *Tranportasi Umum Massal Indonesia Menuju Zero Emission*. Retrieved from Liputan Khusus Kementerian Perhubungan RI: <https://www.dephub.go.id/post/read/transportasi-umum-massal-indonesia-menuju-zero-emission>
- Kemensos. (2021, April 6). Logo Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Retrieved September 24, 2024, from <https://kemensos.go.id/logo-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtk>s
- Kompas.com. (2024, September 4). Kritik Wacana Subsidi Tarif KRL Berbasis NIK, Penolakan Warga dan Tanggapan Pengamat. Retrieved September 27, 2024, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/09/04/11555471/kritik-wacana-subsidi-tarif-krl-berbasis-nik-penolakan-warga-dan?page=2>
- Kontan.co.id. (2024, Oktober 19). Kebijakan Uang Muka Kredit Kendaraan 0% Diperpanjang hingga Akhir 2025. Retrieved November 23, 2024, from <https://keuangan.kontan.co.id/news/kebijakan-uang-muka-kredit-kendaraan-0-diperpanjang-hingga-akhir-2025>
- Kraft, M. E. (2011). *Environmental Policy and Politics*. Boston: Longman.
- Krestanto, N. (2019). Model Pertumbuhan Sepeda Motor Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Perkapita (Studi Kasus Pulau Jawa). *Media Komunikasi Teknik Sipil, vol. 25, no. 1*, 107–114.
- Kurious-KIC. (2023). *Survei Cepat Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Udara*. Jakarta: Katadata Insight Center.

- Kusumaatmadja, M. (2006). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Binacipta.
- Lathif, N. (2017, Januari-Juni). Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3(1), 73–94.
- Litman, T. (2013). Transportation and Public Health. *The Annual Review of Public Health*.
- Martens, K. (2017). *Transport justice: Designing fair transportation systems*. New York: Routledge.
- Martens, K., Bastiaanssen, J., & Lucas, K. (2019). Measuring transport equity: Key components, framings and metrics. In K. Lucas, K. Martens, F. Ciommo, & A. D. Kieffer (Eds.), *Measuring Transport Equity* (pp. 13–36). Elsevier Inc.
- Masindo, A., & Ningsih, D. (2024, Oktober 31). Warga Jabodetabek Tolak Wacana Kenaikan Tarif KRL dan Subsidi Peralihan Berbasis NIK, Ini Alasannya. Retrieved November 24, 2024, from <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1767434-warga-jabodetabek-tolak-wacana-kenaikan-tarif-krl-dan-subsidi-peralihan-berbasis-nik-ini-alasannya>
- Matnuh, H. (2018). Law as a Tool of Social Engineering. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 147, 118–120.
- Meng-Tian, H., & Pan-Mao, Z. (2021). Achieving Paris Agreement Temperature Goals Requires Carbon Neutrality by Middle Century With Far-Reaching Transitions in The Whole Society. *Advances in Climate Change Research*, 12(2), 281–286.
- MenpanRB. (2021, November 3). Integrasi Data dan Keterhubungan Layanan, Syarat Mutlak Menuju Pemerintahan Cergas. Retrieved September 24, 2024, from <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/integrasi-data-dan-keterhubungan-layanan-syarat-mutlak-menuju-pemerintahan-cergas>
- Mubarok, F. (2024, Maret 14). *Perkotaan Penyumbang Terbesar Emisi Gas Rumah Kaca, Bagaimana Mengatasinya?* Retrieved from Mongabay Situs Berita Lingkungan: <https://www.mongabay.co.id/2024/03/14/perkotaan-penyumbang-terbesar-emisi-gas-rumah-kaca-bagaimana-mengatasinya/>
- okefinance. (2024, Agustus 31). Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK, Kemunduran Sistem Transportasi Umum. Retrieved November 25, 2024, from <https://economy.okezone.com/read/2024/08/31/320/3056960/tarif-krl-jabodetabek-berbasis-nik-kemunduran-sistem-transportasi-umum?page=1>
- PBB Indonesia. (2022, 3 18). *Penyebab dan Dampak Perubahan Iklim*. Retrieved from Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia: <https://indonesia.un.org/id/175273-penyebab-dan-dampak-perubahan-iklim>
- Pereira, R., & Karner, A. (2021). Transportation Equity. In *International Encyclopedia of Transportation* (pp. 271–277). Elsevier. doi:<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102671-7.10053-3>
- Pound, R. (1940). *Contemporary Juristic Theory*. Claremont CA: Pomona College.
- Pramesti, D., Andini, N., Raharjo, D., & Dwipayana, A. (2024). Efektivitas Penggunaan Moda Transportasi Umum Dengan Kendaraan Pribadi. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 2(1), 6–16. doi:<https://doi.org/10.31004/ijmst.v2i1.246>
- Pratama, W. (2024, Agustus 30). *Subsidi KRL Diubah Berbasis NIK, Padahal Anggaran Hanya 5% Alokasi IKN*. Retrieved from bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240830/10/1795506/subsidi-krl-diubah-berbasis-nik-padaahal-anggaran-hanya-5-alokasi-i>
- Putri, R. S. (2024, Mei 6). Apa Untung-Rugi Menaikkan Tarif KRL Jabodetabek. Retrieved November 24, 2024, from <https://www.tempo.co/ekonomi/dampak-kenaikan-tarif-krl-409784>
- Quinta, F., & Prakoso, H. (2016). Kajian Pemanfaatan Moda Transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line dalam Pergerakan Komuter Bekasi-Jakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, vol. 5, no. 2, 1–10.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Randal, E., Shaw, C., Woodward, A., Chapman, P., Macmillan, A., Hosking, J., . . . Keall, M. (2020). Fairness in Transport Policy: A New Approach to Applying Distributive Justice Theories. *Sustainability*, 12(23), 1–20.

- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice: Original Edition*. Harvard University Press. doi:<https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9z6v>
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Roe, E. (1991, April). Development narratives, or making the best of blueprint development. *World Development*, 19(4), 287–300.
- Santhi, N. H., & Junaidi, J. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur. *Jurnal Bintang Manajemen*, 2(1), 128–139. doi:<https://doi.org/10.55606/jubima.v2i1.2694>
- Scoones, I. (1999, October). New Ecology and the Social Sciences: What Prospect for a Fruitful Engagement? *Annual Review of Anthropology*(28), 479–507.
- Silver, K., Lopes, A., Vale, D., & da Costa, N. M. (2023). The inequality effects of public transport fare: The case of Lisbon's fare reform. *Journal of Transport Geography*.
- Sinaga, S., Hamdi, M., Wasistiono, S., & Lukman, S. (2019). Model of Implementing Bus Rapid Transit (BRT) Mass Public Transport Policy in DKI Jakarta Province, Indonesia. *International Journal of Science and Society (IJSOC)*, 1(3), 261–271. doi:<https://doi.org/10.54783/ijssoc.v1i3.51>
- Siswadi, A. (2024, September 6). Wacana Tiket KRL Berbasis NIK, Pakar Transportasi ITB Usulkan Gerbong Berkelas atau Voucher Subsidi. Retrieved September 23, 2024, from <https://tekno.tempo.co/read/1912941/wacana-tiket-krl-berbasis-nik-pakar-transportasi-itb-usulkan-gerbong-berkelas-atau-voucher-subsidi>
- Sitorus, B., Hidayat, R., & Prasetya, O. (2014, Juli). Pengelolaan Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang Efektif pada Transportasi Darat. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 1(2), 117–126.
- Sitorus, B., Hidayat, R., & Prasetya, O. (2014). Pengelolaan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Yang Efektif Pada Transportasi Darat. *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, vol.1, no.2, 117–126.
- Sutandi, A. (2015). Pentingnya Transportasi Umum Untuk Kepentingan Publik. *Jurnal Administrasi Publik Vol.12 No.1*, 19–34.
- Tamin, O., Rahman, H., Kusumawati, A., Munandar, A. S., & Setiadi, B. H. (1999). Evaluasi Tarif Angkutan Umum dan Analisis 'Ability To Pay' (ATP) dan 'Willingness To Pay' (WTP) di DKI Jakarta. *Jurnal Transportasi*, 1(2), 121–139.
- tirto.id. (2024, Mei 20). Mencari Formula Tarif Baru KRL dan Upaya Peningkatan Layanan. Retrieved November 25, 2024, from https://tirto.id/mencari-formula-tarif-baru-krl-dan-upaya-peningkatan-layanan-gYMu#google_vignette
- Vuchic, V. R. (2005). *Urban Transit Operation, Planning and Economics*. Canada: John Wiley & Sons. Inc.
- Wahyudi, A., & Alterkawi, M. (2023). The Impacts of Public Transportation Policy on Bus Rapid Transit Operational in the Metropolitan Jakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol.19 No.4*, 562–578.
- Widiarsa. (2019). Kajian Pustaka (Literature Review) sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka. *Jurnal Media Informasi*, 28(1).
- Zainuddin, A. (2010). Kebijakan Pengelolaan Kualitas Udara Terkait Transportasi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol.4 No.6*, 281.

SOSIAL MEDIA DAN PEMASARAN POLITIK POLITISI MUDA: STUDI PEMANFAATAN INSTAGRAM OLEH CALON ANGGOTA LEGISLATIF MUDA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU 2024

Khanif Idris, Jamalullail

Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid, Jakarta

Email: khanifidris@gmail.com

Accepted: 17 Desember 2024; Revised: 27 Desember 2024; Approved: 27 Desember 2024

Abstrak

Sekalipun partisipasi pemuda secara global dan khususnya di Indonesia dalam saluran politik formal tidak sebanding dengan jumlah populasinya, sebetulnya mereka tidak benar-benar apatis terhadap politik. Di Indonesia, trend keterlibatan politik kelompok muda sebagai calon anggota legislatif Indonesia terus berprogres dan terus meningkat hingga penyelenggaraan Pemilu terakhir di tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui data yang bersumber dari wawancara mendalam, pengamatan media sosial kandidat, dan data sekunder dari sumber-sumber yang relevan, studi ini menitikberatkan pada bagaimana politisi muda Partai Keadilan Sejahtera dengan rentang usia 21–40 tahun membangun citra publiknya melalui strategi pemasaran politik melalui kampanye di platform digital. PKS dipilih sebagai salah satu partai politik pioneer yang secara tegas mengatur afirmasi politik bagi kelompok muda dalam AD/ARTnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, politisi muda PKS menunjukkan prioritas utama pada konten sosialisasi politik, tapi dengan variasi dalam cara mereka mengintegrasikan konten personal. Meski memerlukan uji korelasi lebih lanjut tentang strategi integrasi konten sosialisasi politik dalam konten personal kandidat pada tingkat keterpilihan kandidat, model pemasaran politik digital ini terbukti menjadi salah satu cara yang mendorong popularitas kandidat yang apabila dikombinasikan dengan strategi kampanye politik yang komprehensif, dapat mendorong elektabilitas mereka.

Kata Kunci: Instagram; Kampanye Digital; Media Sosial; Pemasaran Politik; Politisi Muda

Abstract

Although youth participation in formal political channels—both globally and in Indonesia—remains disproportionate to their demographic size, young people are not entirely apathetic toward politics. In Indonesia, the trend of youth involvement in politics as legislative candidates has been steadily progressing, with continued growth up to the 2024 general election. Using qualitative research methods based on in-depth interviews, observations of candidates' social media, and secondary data from relevant sources, this study examines how young politicians from the Prosperous Justice Party (PKS), aged 21–40, construct their public image through political marketing strategies on digital platforms. PKS was selected as a case study due to its pioneering stance in institutionalizing political affirmative action for youth within its organizational statutes. The findings show that PKS's young politicians primarily focus on political socialization content, though they differ in how they integrate personal content into their campaigns. While further correlation testing is needed to assess the impact of combining political socialization and personal content on electability, this digital political marketing model has proven to be an effective means of increasing candidate popularity. When paired with a comprehensive campaign strategy, it has the potential to significantly enhance electoral success.

Keywords: Instagram; Digital Campaign; Social Media; Political Marketing; Young Politicians

Pendahuluan

Secara umum, terdapat dua pendapat yang dapat menggambarkan partisipasi politik pemuda. Pertama, pemuda dianggap apolitis dan menjadi penyebab dari krisis demokrasi (Bessant, 2004; Collin, 2015; Furlong and Cartmel (2007) dalam Longstaff, 2001). Collin menilai bahwa ada massa di mana anak muda dianggap malas berpolitik yang mana hal ini menjadi penyumbang krisis demokrasi. (Collin, 2015). Data tahun 2000-an menunjukkan bahwa jumlah anggota partai di negara-negara demokrasi barat secara umum mengalami penurunan yang sangat signifikan (Seyd & Whiteley, 2002; Whiteley & Seyd, 2002). Pada kondisi terkini, data dari Interparliamentary Union (IPU) menunjukkan bahwa kelompok muda sangat kurang terwakili dalam kehidupan politik hanya sekitar 2 % dari penduduk berusia di bawah 30 tahun yang duduk di parlemen, padahal populasi mereka adalah lebih dari setengah populasi dunia. Selain itu, sekitar sepertiga dari negara dengan unicameral dan mejelis rendah, serta lebih dari tiga perempat majelis tinggi tidak memiliki anggota di bawah usia 30 tahun (IPU, 2018). Sikap apatis pemuda terhadap politik yang demikian, terutama dalam saluran politik formal, antara lain disebabkan oleh penilaian pemuda terhadap politik sebagai suatu ranah yang kotor, *toxic*, memerlukan biaya tinggi, hingga dianggap sulit dapat memberikan ruang gerak bagi karakter pemuda (Shames, 2017; Sweinstani & Idris, 2019).

Sementara itu, asumsi kedua menyatakan bahwa pemuda justru dianggap sebagai motor penggerak dari bentuk-bentuk politik baru yang canggih, terutama untuk beberapa hal yang berhubungan dengan penggunaan teknologi dalam politik (Coleman, 1999, 2006). Sebagaimana di Indonesia, dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, peran pemuda tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Sekalipun partisipasi pemuda secara global dan khususnya di Indonesia dalam saluran politik formal tidak sebanding dengan jumlah populasinya, sebetulnya mereka tidak benar-benar apatis terhadap politik. Pascareformasi 1998, liberalisasi politik memberikan ruang lebih luas bagi setiap individu untuk dapat berorganisasi dan berekspresi. Implikasinya terhadap peran

pemuda, semakin banyak pemuda yang bergeliat menyalurkan aspirasinya, baik melalui partai politik, maupun melalui jalur di luar sistem formal, seperti LSM, media, maupun berbagai gerakan sosial transformatif lainnya.

Di Indonesia, trend keterlibatan politik kelompok muda sebagai calon anggota legislatif Indonesia terus berprogres. Data menunjukkan bahwa pada pemilu DPR RI tahun 2014, hanya terdapat 6,4 persen atau setara dengan 414 caleg dari total 6.397 caleg yang berusia muda (21-30 tahun) (BPS, 2014). Dari jumlah tersebut, hasil pemilu menunjukkan bahwa dari total 560 anggota DPR periode 2014-2019, hanya sekitar 4 persen (atau 24 orang) yang berusia kurang dari 30 tahun (Irdiana et al., 2021). Sementara pada pemilu 2024, tercatat ada sekitar 32 persen calon anggota DPR RI yang berusia 21-40 tahun.

Berkaitan dengan eksistensi politisi muda dalam lanskap politik Indonesia di atas serta melihat fakta perkembangan teknologi digital yang mengiringi kehadiran para politisi muda saat ini, studi ini menitikberatkan pada bagaimana politisi muda membangun citra publiknya melalui strategi pemasaran politik melalui kampanye di platform digital. Studi ini menjadi penting untuk dilakukan karena apa yang terjadi pada masa kampanye dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kandidat tersebut dan mampu meningkatkan popularitas kandidat, sekalipun tidak serta merta menjamin elektabilitasnya. Di samping itu, pemilihan model kampanye digital yang dilakukan oleh politisi muda juga didasarkan pada fakta bahwa saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi nampaknya bukan merupakan hal yang sama sekali baru di tengah masyarakat Indonesia. Untuk itulah, metode kampanye politik saat inipun telah bergeser dari kampanye konvensional (*offline*) menjadi kampanye yang memanfaatkan lini massa di dunia maya (*online*), sekalipun metode pertama belum juga sepenuhnya ditinggalkan.

Menurut Andriana (2013), dalam dunia politik, ruang siber yang ditengarai melalui platform digital dilihat sebagai peluang yang cukup menjanjikan oleh politisi sebagai media komunikasinya dengan khalayak. Penggunaan

media ini untuk kepentingan politik bahkan mulai menanjak pasca penyelenggaraan Pilpres tahun 2009. Lonjakan penggunaan media siber sebagai platform baru kampanye politik menjadi masuk akal karena internet nampaknya dewasa ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan asumsi bahwa aktor politik memiliki kecenderungan akan memanfaatkan semua media yang dianggap potensial dan menjanjikan untuk meningkatkan popularitasnya (Situmorang, 2012), maka menjadi masuk akal bila media internet juga dimanfaatkan secara paralel dengan media tradisional atau konvensional lainnya sebagai media bagi mereka menjalankan strategi politiknya.

Beberapa studi terdahulu menyatakan bahwa kampanye *online*, khususnya melalui *website*, memungkinkan terjadinya pola komunikasi interaktif antara kandidat dengan pemilihnya (Warnick, Xenos, Endres, & Gastil, 2005) dan personalisasi politik yang memungkinkan pemilih menjadi semakin mengenal calon pemimpinnya (Adam & Maier, 2010). Menurut Sanne (2016) situs web politik interaktif memiliki efek positif pada keterlibatan warga, dan efek ini terutama hadir untuk situs web dengan interaktivitas tingkat tinggi. Lebih lanjut, Gibson dan McAllister menjelaskan bahwa kampanye *online* melalui *website* memiliki hubungan yang positif dengan perolehan suara kandidat (Gibson & McAllister, 2006).

Begitu pula dengan kampanye *online* menggunakan sosial media seperti Twitter, Kruikemeier Sanne menyimpulkan bahwa kandidat yang memanfaatkan Twitter dalam kampanyenya mampu mendapatkan suara yang lebih besar daripada mereka yang tidak. Apalagi jika media ini digunakan oleh kandidat sebagai sarana membangun hubungan interaktif dengan pemilih, dukungan kepadanya akan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan hal yang sama (Sanne, 2014). Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Sweinstani (2019) menunjukkan bahwa sekalipun tidak ada korelasi antara penggunaan sosial media dengan kemenangan kandidat perempuan, sosial media (twitter dan

Instagram) menjadi alat bagi perempuan untuk menunjukkan eksistensi politik perempuan yang tidak hanya terbatas pada segmen pemilih perempuan namun juga pada seluruh pemilih.

Ketika studi sebelumnya fokus kepada kampanye *online* di *website* dan Twitter, maka studi ini akan lebih menitikberatkan pada bagaimana politisi muda memanfaatkan akun Instagram masing-masing. Dalam beberapa tahun terakhir, Instagram telah menjadi salah satu platform media sosial yang paling menarik bagi orang dewasa muda (Alhabash & Ma, 2017). Instagram didominasi secara khusus oleh kelompok usia yang relatif lebih muda (18 hingga 24 tahun), dibandingkan dengan Facebook, di mana orang dari segala usia (18 hingga 65+ tahun) menggunakannya secara proporsional (Pew Research Center, 2019). Pada tahun 2023, Pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 86,5 % dari jumlah populasi. Berdasarkan pada data intensitas penggunaan Instagram tersebut, tokoh politik, maupun partai pun belakangan tidak ketinggalan untuk memanfaatkan media ini sebagai media yang mampu mendekatkan mereka dengan masyarakat (pemilih). Apalagi menurut Hoostisuite, kelebihan yang ditawarkan oleh Instagram adalah media ini dapat memfasilitasi *peer-to-peer* sharing melalui fitur Instagram stories dan fitur video live. Fitur yang dimiliki platform tersebut, seperti Instagram stories dan video live, memungkinkan politisi untuk berbagi konten secara *real-time*, memberikan update terbaru tentang aktivitas mereka, dan merespons pertanyaan serta komentar dari pemilih secara langsung. Atas hal tersebut, Instagram tidak hanya menawarkan adanya keterlibatan dari pemilih, tetapi juga memberikan kesempatan bagi politisi untuk memperkuat citra yang lebih dekat dan autentik di mata pemilih. Oleh karena itu, berpijak pada beberapa alasan tersebut, studi tentang penggunaan Instagram sebagai media baru dalam marketing politik menjadi perlu untuk melihat apakah media ini berhasil mengonstruksi persepsi masyarakat (pemilih) terhadap kandidat yang bersangkutan.

Penulis membatasi politisi muda di sini pada politisi generasi millennial atau generasi Y yang lahir pada tahun 1981-1994 (Codrington

& Grant-Marshall, 2011). Penelitian ini akan menitikberatkan pada unggahan atau konten sosial media yang diunggah oleh politisi muda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada masa kampanye. Batasan usia politisi muda dalam penelitian ini adalah caleg DPR RI dari PKS dengan rentang usia 21-40 tahun.

Sementara itu, berkaitan dengan pemilihan partai politik, PKS dipilih karena PKS yang pada mulanya dikenal sebagai partai dakwah dan eksklusif, kini telah bertransformasi menjadi lebih cair bahkan lebih bergaya anak muda. Hal ini dapat dilihat dari, antara lain, perubahan warna kebesaran dan lambang PKS dari yang semula berwarna hitam menjadi berwarna oranye yang mengisyaratkan humanisme dan perubahan beberapa istilah dalam PKS, misalnya istilah *Liqo* yang kini menjadi Unit Pembinaan Anggota (UPA). Selain itu, berkaitan dengan kebijakan internal partai tentang dukungan pada kelompok politisi muda, PKS merupakan salah satu partai politik *pioneer* kebijakan afirmasi bagi politisi muda. Adapun kebijakan afirmasi internal partai politik bagi politisi muda tersebut dapat dilihat dari pemberian sumber daya kampanye, berupa logistik dan finansial, dan penempatan anak muda pada nomor urut kecil.

Hal-hal yang diamati dari strategi pemasaran politik pada platform ini adalah apakah konten unggahan mereka mengarah pada upaya personifikasi semata yang berkaitan dengan konten-konten pribadi seperti kehidupan pribadi, keluarga, pertemanan dan sebagainya; atau mengarah pada konten profesional kandidat yang antara lain berkaitan dengan konten sosialisasi politik, kampanye politik, kegiatan politik (*political activity*) dan pernyataan, maupun sikap politik lainnya yang dapat mendukung kampanye politik yang dilakukan (*political stand point*). Selain itu, cara berkomunikasi politik politisi muda juga menjadi fokus kedua dalam penelitian ini.

Strategi Pemasaran Politik Politisi Muda: Sebuah Kerangka Analisis

Metode pemasaran politik melalui media digital yang saat ini banyak dilakukan oleh politisi di Indonesia menjadi menarik untuk diteliti

di era digital ini. Menurut Andriana (2013), dalam dunia politik, media siber dilihat sebagai peluang yang cukup menjanjikan oleh politisi sebagai media komunikasinya dengan khalayak. Penggunaan media ini untuk kepentingan politik, bahkan mulai menanjak pasca penyelenggaraan Pilpres tahun 2009. Lonjakan penggunaan media siber sebagai platform baru kampanye politik menjadi masuk akal karena internet nampaknya dewasa ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Studi lain yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Soedarsono dkk, menunjukkan bahwa tiga komponen dari konten twitter seorang pemimpin (berbagi berita, konteks pesan dan pembaruan aktivitas sehari-hari) memainkan peran penting untuk menentukan sikap para pengikutnya (warganya) di media sosial. Para pengikut dapat merasa lebih dekat dengan seorang pemimpin bahkan pada titik tertentu para pengikut akun Twitter seorang pemimpin dapat lebih mudah mengikuti setiap aturan yang dirumuskan oleh pemimpin tersebut. Dengan asumsi bahwa aktor politik memiliki kecenderungan akan memanfaatkan semua media yang dianggap potensial dan menjanjikan untuk meningkatkan popularitasnya (Situmorang, 2012), maka menjadi masuk akal bila media internet juga dimanfaatkan secara paralel dengan media tradisional atau konvensional lainnya sebagai media bagi mereka menjalankan strategi politiknya.

Beberapa studi terdahulu menyatakan bahwa kampanye *online*, khususnya melalui *website*, memungkinkan terjadinya pola komunikasi interaktif antara kandidat dengan pemilihnya (Warnick, Xenos, Endres, & Gastil, 2005) dan personalisasi politik yang memungkinkan pemilih menjadi semakin mengenal calon pemimpinnya (Adam & Maier, 2010). Menurut Sanne (2016) situs web politik interaktif memiliki efek positif pada keterlibatan warga, dan efek ini terutama hadir untuk situs web dengan interaktivitas tingkat tinggi. Lebih lanjut, Gibson dan McAllister menjelaskan bahwa kampanye *online* melalui *website* memiliki hubungan yang positif dengan perolehan suara kandidat (Gibson & McAllister, 2006).

Begitu pula dengan kampanye *online* menggunakan sosial media seperti Twitter, Kruikemeier Sanne menyimpulkan bahwa kandidat yang memanfaatkan Twitter dalam kampanyenya mampu mendapatkan suara yang lebih besar daripada mereka yang tidak. Apalagi jika media ini digunakan oleh kandidat sebagai sarana membangun hubungan interaktif dengan pemilih, dukungan kepadanya akan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan hal yang sama (Sanne, 2014). Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Sweinstani (2019) menunjukkan bahwa sekalipun tidak ada korelasi antara penggunaan sosial media dengan kemenangan kandidat perempuan, sosial media (twitter dan Instagram) menjadi alat bagi perempuan untuk menunjukkan eksistensi politik perempuan yang tidak hanya terbatas pada segmen pemilih perempuan namun juga pada seluruh pemilih.

Dengan demikian, kebaruan yang diangkat dalam studi ini adalah, ketika studi sebelumnya fokus kepada kampanye *online* di *website* dan Twitter, maka studi ini akan lebih menitikberatkan pada bagaimana politisi muda memanfaatkan akun Instagram masing-masing. Pemilihan platform media sosial ini dikarenakan, platform ini diketahui sebagai platform media sosial yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia. Pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 86,5% dari jumlah populasi, angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 84,8%.

Untuk mengerangkai fokus studi di atas, penulis menggunakan kerangka teoritis strategi pemasaran mix yang dikemukakan oleh Philip Kotler. Philip Kotler menjelaskan bahwa strategi adalah wujud rencana yang terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Kotler & Keller, 2009). Menurut Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Menurut Kotler, marketing berlaku baik pada sektor publik dan non-komersial. Dengan demikian sekalipun sebagian besar teori ini digunakan untuk memasarkan barang, namun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hal-hal yang dipasarkan

sesungguhnya tidak hanya terbatas pada barang fisik saja. Jasa maupun ide juga dapat menjadi hal yang dipasarkan yang dapat dipertukarkan dengan hal lain. Dalam konteks penelitian ini, hal yang dipasarkan oleh politisi muda adalah citra diri dan gagasan politiknya yang dapat dipertukarkan dengan suara (*vote*) dari pemilih. Oleh karena itu, Firmanzah menyatakan bahwa cakupan dari marketing ini menjadi sangatlah luas. Dalam bidang politik, contoh penerapan marketing yang paling nyata di Indonesia adalah positioning dalam kampanye politik.

Dalam melakukan pemasaran baik barang maupun jasa, Kotler mengembangkan salah satu teorinya yang dikenal dengan strategi *Marketing Mix* yang merupakan bauran pemasaran yang terdiri dari 4P yaitu, *product*, *place*, *price*, *promotion*. Produk merupakan elemen penting dalam sebuah program pemasaran. Strategi produk dapat memengaruhi strategi pemasaran lainnya. Pembelian sebuah produk bukan hanya sekedar untuk memiliki produk tersebut tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Di dalam strategi bauran pemasaran, strategi produk merupakan unsur yang paling penting, karena dapat memengaruhi strategi pemasaran lainnya. Pemilihan jenis produk yang akan dihasilkan akan menentukan kegiatan promosi yang dibutuhkan, serta penentuan harga dan cara penyalurannya. Dalam konteks strategi *marketing* politik, produk disini dapat diartikan sebagai visi dan pesan politik apa yang ingin disampaikan oleh politisi untuk menarik perhatian dan dapat memenuhi keinginan pemilih. Produk dalam bentuk gagasan politik inilah yang nantinya akan penulis lihat bagaimana praktik dilapangan melalui program, visi, dan pesan politik yang dibawa oleh politisi muda.

Sementara itu, *price* atau harga merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Dalam keadaan persaingan yang semakin dewasa ini, peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar, di samping meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Berkaitan dengan riset ini, harga disini dapat diasumsikan sebagai

seberapa besar *effort* yang dihabiskan oleh pemilih untuk mengakses pesan politik dari politisi muda melalui unggahan instagramnya.

Ketiga, *place* atau tempat berkaitan dengan strategi bagaimana menempatkan produk berarti menyediakan produk pada tempat (pasar) yang tepat dan di waktu yang tepat pula. Hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu produk terdistribusi dengan baik sehingga dapat diakses oleh konsumen. Dalam kaitannya dengan riset ini, tempat disini dapat diartikan sebagai strategi politisi muda memilih platform digital, termasuk tentang bagaimana pemilihan *timing* atau waktu unggahan yang mudah diakses oleh pemilih sehingga pada waktu yang tepat pemilih dapat terpapar pesan politiknya.

Terakhir, *promotion* di sini berkaitan dengan kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada konsumen atau pihak lain dalam saluran penjualan untuk memengaruhi sikap dan perilaku. Dalam konteks riset ini, aspek promosi dapat dilihat dari bagaimana kreativitas dan gaya bahasa politisi muda dalam menyampaikan pesan politiknya melalui unggahan di akun Instagramnya.

Berdasarkan pada keempat indikator marketing campuran menurut kloter diatas, studi ini hanya akan menekankan pada tiga indikator yaitu *product*, *place* yang dimaknai sebagai waktu unggah konten, dan *promotion*. Penulis mengeksklusikan indikator *price* karena indikator ini melihat pada seberapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh penerima pesan, dalam hal ini adalah pemilih. Sementara, fokus studi ini tidak bergerak sampai dengan melihat pilihan politik pemilih.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-eksplanatori. Jenis penelitian ini dipilih karena tim berupaya untuk tidak hanya memberikan informasi deskriptif dan eksploratif tentang strategi kampanye politik politisi muda PKS selama masa kampanye pemilu 2024. Melalui penggunaan metode studi kasus, penelitian ini berusaha mendalami satu atau beberapa unit analisis secara mendalam

dan komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, studi kasus penelitian berfokus pada politisi muda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai subjek utama. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks spesifik dan strategi yang digunakan dalam kampanye mereka di media sosial selama pemilu 2024.

Data dalam artikel ini diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada politisi muda dari PKS, dengan rentang usia 21–40 tahun di Jakarta dan Sekitarnya baik melalui tatap muka langsung maupun secara daring. Adapun cara untuk mendapatkan informan adalah dengan cara snowballing, di mana penulis akan mewawancarai salah satu informan kemudian meminta rekomendasi informan selanjutnya kepada informan yang telah ditemui. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari konten unggahan Instagram beberapa politisi muda PKS dan dokumen-dokumen partai yang relevan seperti buku panduan kampanye atau dokumen lain sejenis, serta buku atau artikel dalam media lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Strategi Pemasaran Politik Digital Politisi Muda PKS

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, perubahan dramatis terjadi pada bagaimana cara seorang politisi mendekatkan diri dengan pemilih. Media sosial saat ini digunakan secara rutin oleh banyak masyarakat Indonesia dan memiliki pengaruh besar dalam pemasaran politik. Akses yang mudah ke internet dan media sosial memungkinkan pembentukan opini publik dengan cepat. Platform seperti Instagram memfasilitasi komunikasi yang cepat dan interaktif, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, bertukar pendapat, dan membahas isu dengan lebih efisien dibandingkan media konvensional.

Politisi mampu memanfaatkan platform-platform seperti Instagram secara efektif dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan

lebih beragam, serta membangun hubungan yang lebih personal dengan pemilih. Konten yang dirancang untuk menarik perhatian dan merespons minat serta kekhawatiran audiens dapat meningkatkan keterlibatan dan membangun dukungan yang lebih kuat. Selain itu, penggunaan media sosial memungkinkan politisi untuk menanggapi isu-isu terkini secara *real-time*, yang membantu mereka untuk tetap relevan dan responsif terhadap dinamika politik yang sedang berlangsung.

Media sosial juga memainkan peran penting dalam mempercepat proses pembentukan opini publik. Kecepatan dan keterhubungan yang ditawarkan oleh platform-platform ini memungkinkan informasi, baik itu berita politik atau konten kampanye, untuk menyebar dengan cepat dan luas. Ini memberikan keuntungan strategis bagi politisi yang dapat memanfaatkan momentum dan tren yang sedang populer untuk memperkuat pesan mereka. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial juga memerlukan strategi yang cermat untuk mengelola potensi misinformasi dan reaksi negatif, karena informasi yang tidak akurat atau kontroversial dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi persepsi publik. Dengan demikian, media sosial menjadi arena yang sangat penting dan kompleks dalam pemasaran politik, di mana pemahaman dan pengelolaan yang efektif dapat menentukan keberhasilan komunikasi politik.

Penggunaan media sosial untuk kampanye oleh politisi semakin umum karena platform ini menawarkan jangkauan luas dengan biaya rendah dan tingkat keterlibatan tinggi. Politisi muda semakin terampil dalam memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih, membangun koneksi, dan menyampaikan pesan dengan efektif. Melalui pemanfaatan alat digital dan strategi inovatif, mereka mampu bersaing lebih baik dengan politisi berpengalaman, membuka peluang baru untuk terlibat dalam diskusi politik dan membentuk opini publik. Kemampuan mereka dalam menggunakan berbagai platform media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan pemilih, menjawab pertanyaan, dan memperkuat dukungan secara *real-time*.

Media sosial menyediakan ruang bagi politisi muda untuk mengembangkan dan mempromosikan agenda mereka dengan pendekatan yang lebih inovatif dan personal. Para politisi muda memanfaatkan konten visual, video, dan kampanye yang viral untuk memperkuat hubungan dengan pemilih dan memengaruhi pilihan publik. Fokus pada keterlibatan dan interaktivitas di platform-platform ini memungkinkan mereka untuk menggerakkan dukungan dengan cara yang lebih efektif. Politisi muda tidak hanya mendapatkan visibilitas yang lebih besar, tapi juga memperbarui strategi politik mereka untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang sangat kaya akan informasi.

Politisi-politisi muda PKS tampak secara strategis menargetkan anak muda sebagai audiens utama mereka. Hal ini menjadi sebuah keputusan yang tercermin dalam gaya komunikasi dan citra yang mereka bangun. Pernyataan Ismail Bachtiar menegaskan bahwa pendekatan yang dia ambil adalah dengan menjadikan dirinya sebagai figur yang mudah diakses dan dekat dengan audiens muda. Dengan berfokus pada interaksi yang bebas dari kesan formal dan canggung, Ismail Bachtiar berusaha menciptakan suasana yang lebih inklusif dan menyenangkan bagi anak muda. Strategi ini tidak hanya menunjukkan kesadaran akan kebutuhan untuk terhubung dengan pemilih yang lebih muda, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menyesuaikan gaya kampanye dengan preferensi dan harapan demografis target. Dengan membangun citra yang “easy” dan terkesan dekat dengan pemilih, politisi muda PKS berupaya meningkatkan keterlibatan dan dukungan dari generasi muda, yang penting dalam memenangkan dukungan dalam lanskap politik kontemporer.

Politisi muda PKS dalam hal ini memanfaatkan konten visual sebagai strategi marketing utama mereka dalam kampanye digitalnya. Mereka membuat unggahan konten berupa infografis dan gambar yang dirancang secara menarik untuk menyampaikan pesan politiknya. Penggunaan desain yang identik segar, informasi yang singkat, dan konten visual yang disajikan menarik perhatian pemilih

memudahkan penyebaran pesan di media sosial. Lebih lanjut, penyajian melalui infografis pun dilakukan oleh politisi muda PKS dengan narasi-narasi terkait program yang politisi muda bawa, sedangkan *meme* berupa elemen humor terkait aktivitas kampanye sehari-hari politisi muda. Alhasil, pesan politik lebih relevan dan mudah diingat oleh pemilih. Melalui penyajian video pendek, mereka menyampaikan pesannya secara langsung, hingga mengadakan sesi tanya jawab. Penggunaan video secara *live* di media sosial politisi muda juga dijadikan cara bagi mereka untuk merespons pertanyaan serta komentar pemilih secara langsung.

Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan upaya politisi muda PKS untuk memanfaatkan tren digital dan preferensi audiens mereka. Dalam era digital, pemilih, khususnya generasi muda, seringkali lebih terlibat dengan konten visual yang mudah dicerna dan menarik. Infografis dan gambar yang dirancang dengan estetika menarik tidak hanya membantu dalam menyampaikan pesan politik secara efektif tetapi juga berfungsi untuk membangun identitas visual yang konsisten untuk kampanye. Penggunaan *meme* dan video pendek memperlihatkan kemampuan politisi muda untuk beradaptasi dengan format yang populer di media sosial, yang meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan audiens. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan dan dampak pesan mereka dengan cara yang lebih kreatif dan relevan.

Sesi tanya jawab dan video langsung yang dilakukan oleh politisi muda PKS memungkinkan mereka untuk menciptakan hubungan yang lebih personal dan langsung dengan pemilih. Fitur ini memberikan kesempatan bagi pemilih untuk berinteraksi secara langsung dan santai, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan jawaban langsung dari kandidat, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Interaksi langsung ini juga memungkinkan politisi untuk menunjukkan kepribadian mereka dan merespons isu-isu yang menjadi perhatian publik secara cepat. Melalui pemanfaatan video *live* dan format interaktif lainnya, politisi muda PKS tidak hanya memperkuat koneksi mereka

dengan pemilih tetapi juga menunjukkan kesiapan mereka dalam berkomunikasi secara terbuka dan responsif di era digital. Selain itu, pendekatan ini menciptakan ruang bagi politisi untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran pemilih secara *real-time*, sehingga mereka dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, politisi muda PKS menyusun strategi yang lebih efektif dan relevan berdasarkan umpan balik langsung dari audiens mereka, memperkuat legitimasi mereka sebagai wakil rakyat yang peka terhadap perubahan dan harapan masyarakat.

Dalam analisis jenis konten yang diunggah, Sweinstani (2019) membaginya menjadi dua kategori utama, antara lain: 1) Konten pribadi yang meliputi kehidupan pribadi, keluarga, dan profesi kandidat. 2) Konten sosialisasi politik yang mencakup kampanye politik sesuai peraturan KPU, aktivitas politik, dan pernyataan politik lainnya yang mendukung kampanye. Politisi muda pada masa kampanye menggunakan jenis konten pribadi sebagai langkah untuk mendekatkan mereka kepada pemilih dan mendapatkan citra yang baik serta lebih dekat dengan pemilih. Mereka berbagi di dalam media sosialnya perihal aspek personal dari kehidupan mereka, seperti aktivitas profesi, momen bersama keluarga, kegiatan komunitas, dan hobi yang mereka tekuni. Berdasarkan gambaran di atas, politisi muda PKS mengunggah konten pribadi dalam kampanye politik mereka untuk membangun kedekatan dan keaslian dengan pemilih.

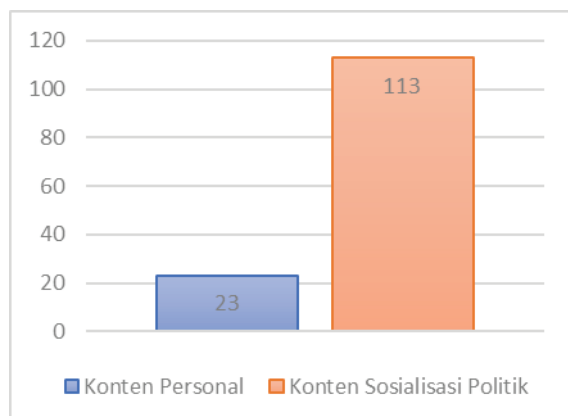
Melalui unggahan momen-momen pribadi, seperti aktivitas sehari-hari, hobi, atau profesi mereka menciptakan citra yang lebih manusiawi dan relevan dengan pemilih, sehingga dapat memperkuat hubungan emosional dengan pemilihnya. Konten pribadi juga memungkinkan mereka untuk menonjol di tengah politisi lainnya, memperlihatkan karakter dan nilai-nilai mereka secara langsung, serta membangun kepercayaan dan keterhubungan yang lebih dalam dengan calon pemilih. Politisi muda PKS juga menggunakan postingannya untuk bercerita perihal pengalaman hidup atau cerita kisah inspiratif yang mereka dapatkan selama kampanye. Mereka tidak hanya melakukan

promosi kebijakan yang diusung mereka, tapi juga memberikan gambaran perihal karakter mereka sendiri.

Selama kampanye berlangsung, politisi muda menggunakan metode yang enerjik dalam proses sosialisasi politik mereka. Mereka memanfaatkan akun media sosialnya untuk mempromosikan dirinya, menjelaskan aktivitas politik mereka, hingga sikap politik mereka. Melalui pemanfaatan berbagai format seperti infografis, video langsung, dan diskusi daring dilakukan oleh mereka untuk mencapai khalayak yang lebih luas, hingga mengikutsertakan pemilih dalam dialog dua arah. Pendekatan-pendekatan ini mempermudah bagi politisi muda untuk bisa merespons pertanyaan secara langsung, mendapat umpan balik dari pemilih, dan memberikan tanggapan.

Dengan melakukan pengamatan pada beberapa akun instrgram politisi muda PKS, seperti Ismail Bachtiar, Habib Idrus, dan Meitri Citra Wardani selama periode kampanye (28 November 2023–10 Februari 2024), penulis mendapati jenis konten apa yang didominasi oleh politisi muda PKS. Fokus pada tiga politisi muda PKS ini memberikan kesempatan untuk melakukan perbandingan mendalam dan memahami dinamika yang terjadi dalam komunikasi politik digital PKS, termasuk efektivitas pesan yang disampaikan dan respons audiens terhadap konten yang diproduksi oleh politisi muda tersebut.

Gambar 1. Jenis Konten Unggahan oleh Politsi Muda PKS



Sumber : Instagram @ismailbachtiar, @habibidrus, @meitricitrawardani

Dalam analisis akun Instagram @ismailbachtiar, @habibidrus, dan @meitricitrawardani, terlihat bahwa konten sosialisasi politik mendominasi dibandingkan konten personal. Strategi ini mencerminkan pendekatan marketing politik yang fokus pada penyampaian pesan-pesan penting dan visi-misi kampanye mereka kepada pemilih. Mereka memprioritaskan konten sosialisasi politik guna memperkuat *brand positioning* mereka sebagai kandidat yang terampil dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan target pemilihnya. Hal ini mencakup pengenalan program kerja, inisiatif politik, dan interaksi dengan publik yang relevan dengan isu-isu terkini, yang semuanya dirancang untuk membangun citra profesional dan kredibilitas mereka. Dengan memilih fokus pada sosialisasi politik, ketiga akun ini berupaya untuk membangun citra mereka sebagai kandidat yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu politik terkini dan memiliki rencana konkret untuk mengatasi tantangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin menonjolkan diri sebagai pemimpin yang kompeten dan terinformasi.

Strategi yang dilakukan oleh poltisi muda PKS mencerminkan pendekatan marketing politik yang sangat terencana, di mana konten-konten yang diunggah lebih banyak berkisar pada tema-tema politik dibandingkan konten personal. Penggunaan platform Instagram sebagai media untuk menyebarkan pesan politik dan interaksi dengan publik memungkinkan mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan pesan yang konsisten. Melalui strategi-strategi tersebut, mereka tidak hanya mengedukasi pemilih tentang program kerja mereka, tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat melalui komunikasi yang aktif dan relevan.

Keputusan untuk memprioritaskan konten sosialisasi politik di atas konten personal juga mencerminkan upaya mereka dalam memperkuat *brand positioning* sebagai kandidat yang profesional dan kredibel. Dalam konteks politik, citra seperti ini dilakukan oleh politisi muda PKS dalam memenangkan kepercayaan pemilih dan menciptakan dampak yang

signifikan dalam kampanye. Fokusnya pada isu-isu terkini dan program-program yang akan mereka jalankan, mereka dapat menegaskan komitmen mereka terhadap perubahan dan solusi nyata. Dalam lanskap media sosial yang sangat kompetitif, menampilkan konten yang langsung berkaitan dengan kampanye politik membantu memastikan bahwa pesan utama mereka tetap berada di garis depan perhatian publik. Politisi-politisi muda tersebut memanfaatkan algoritma media sosial, sehingga jangkauan menjadi lebih luas dan maksimal. Konten sosialisasi politik ini menjadi alat strategis dalam membentuk persepsi dan mendorong dukungan di kalangan pemilih.

Persaingan yang begitu kuat di media sosial, konten yang secara langsung terkait dengan kampanye politik tidak hanya memperkuat pesan utama tetapi juga memastikan visibilitas yang konsisten di mata publik. Politisi muda PKS secara cermat memanfaatkan algoritma media sosial untuk meningkatkan jangkauan konten mereka, sehingga pesan politik mereka dapat mencapai audiens yang lebih luas dan beragam. Melalui strategi unggahan konten yang relevan dan terkini, mereka berupaya untuk memaksimalkan eksposur mereka dan memastikan bahwa pesan mereka tetap menonjol di tengah banjir informasi yang ada di platform sosial. Dengan menganalisis data keterlibatan dan umpan balik dari audiens, para politisi muda PKS terus menyempurnakan pendekatan dan memastikan bahwa konten yang dihasilkan sesuai dengan preferensi pemilih.

Selain itu, strategi ini juga berfungsi untuk membentuk dan memelihara persepsi publik tentang kandidat. Dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial, politisi muda ini dapat mengarahkan narasi yang mereka inginkan dan memperkuat citra mereka sebagai calon yang kredibel dan relevan. Konten sosialisasi politik yang konsisten dan terencana dengan baik memungkinkan mereka untuk membangun citra yang positif dan membangun hubungan yang kuat dengan pemilih, yang dapat berpengaruh besar pada hasil pemilihan.

Akhirnya, penggunaan konten yang difokuskan pada sosialisasi politik juga memungkinkan politisi muda untuk beradaptasi

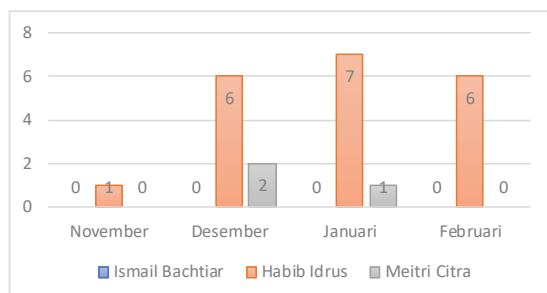
dengan tren dan perubahan dalam media sosial. Melalui pendekatan strategi yang mengikuti perkembangan algoritma dan preferensi audiens, mereka dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap efektif dalam menggaet perhatian dan dukungan. Hal ini menunjukkan kemampuan mereka untuk berinovasi dan beradaptasi dalam lanskap digital yang terus berkembang, serta memastikan bahwa mereka tetap relevan dan berpengaruh dalam diskursus politik yang semakin terhubung dengan teknologi. Dalam konteks marketing politik, pendekatan ini mencerminkan pentingnya segmentasi audiens yang tepat dan penyampaian pesan yang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi pemilih. Konten yang menarik dan interaktif dibuat oleh para politisi muda PKS untuk membangun loyalitas pemilih.

Pada akun Instagram @ismailbachtiar, @habibidrus, dan @meitricitrawardani, terlihat bahwa politisi muda PKS tersebut secara strategis memanfaatkan konten kampanye politik mereka. Terutama pada bulan Januari dan Februari, konten sosialisasi politik diperkuat secara masif untuk memaksimalkan visibilitas dan dampak sebelum memasuki masa tenang. Pendekatan dirancang untuk memastikan pesan-pesan penting dan agenda politik mereka mendapatkan eksposur maksimal saat momentum puncak kampanye, sebelum peraturan kampanye membatasi aktivitas. Penekanan konten sosialisasi politik yang masif ini dilakukan selama periode kritis guna memperkuat kesadaran pemilih dan meningkatkan dukungan sebelum batas waktu kampanye yang ketat dimulai. Hal tersebut menjadi langkah strategis oleh politisi muda PKS dalam memaksimalkan visibilitas dan dampak dari pesan-pesan kampanye mereka sebelum memasuki masa tenang, yang artinya aktivitas kampanye secara resmi dibatasi.

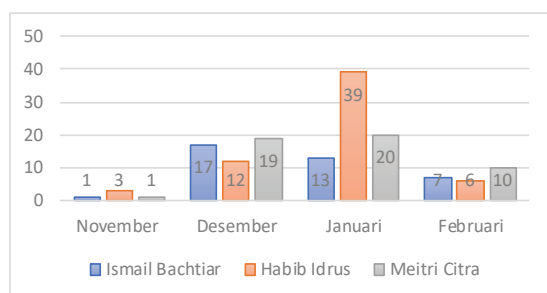
Periode awal tahun ini menjadi waktu yang krusial untuk memastikan pesan mereka disebarluaskan secara luas dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada jumlah konten, tetapi juga pada kualitas dan relevansi pesan yang disampaikan. Konten yang diunggah selama periode ini dirancang untuk menyampaikan agenda politik, visi,

dan program kerja dengan cara yang menarik dan persuasif. Tujuan utamanya adalah memperkuat kesadaran pemilih mengenai kandidat dan apa yang mereka tawarkan, serta membangun momentum yang positif sebelum batasan kampanye diberlakukan. Dengan demikian, konten-konten terkait berfungsi sebagai alat untuk mengukur citra yang kuat dan memastikan bahwa pesan mereka tetap relevan di benak pemilih. Dengan memanfaatkan waktu secara optimal sebelum masa tenang dimulai, ketiga politisi muda PKS tersebut mampu mengarahkan perhatian pemilih pada isu-isu penting dan menjawab kebutuhan mereka akan informasi yang akurat dan mendalam. Politisi muda PKS melakukan strategi yang adaptif di tengah dinamika kampanye politik. Mereka merancang strategi yang sesuai perubahan dan memaksimalkannya sebelum masa kampanye berakhir.

Gambar 2 Segmentasi Konten Personal Oleh Politi Muda PKS



Gambar 3 Segmentasi Konten Sosialisasi Politik oleh Politi Muda PKS



Sumber: Instagram @ismailbachtiar, @habibidrus, @meitricitrawardani

Hasil segmentasi konten pada akun Instagram politisi muda PKS seperti @ismailbachtiar, @habibidrus, dan @

meitricitrawardani menunjukkan perbedaan mencolok dalam pendekatan mereka terhadap konten personal dan sosialisasi politik. Akun @ismailbachtiar, misalnya, menampilkan konsistensi yang signifikan dengan nol konten personal dan memfokuskan 38 konten selama kampanye pada sosialisasi politik. Ismail Bachtiar mencerminkan strategi yang sangat terfokus pada penyampaian pesan kampanye, program, dan agenda politik, tanpa adanya interaksi pribadi yang dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utamanya sebagai kandidat. Dengan menghindari konten pribadi, akun @ismailbachtiar menjaga agar pemilihnya tetap terfokus pada program dan visi politik yang ditawarkan, menghindari potensi pembauran atau pergeseran perhatian yang bisa terjadi jika konten personal juga diperkenalkan. Strategi yang dilakukan oleh Ismail Bachtiar mencerminkan upaya untuk memaksimalkan efektivitas komunikasi politik dan memastikan bahwa pesan kampanye disampaikan dengan jelas dan konsisten kepada pemilih.

Sementara @habibidrus dengan penyajian kontennya yang cukup masif dibandingkan politisi lainnya, ia mengunggah konten personalnya dengan jumlah 20 konten, walaupun konten kampanye politiknya lebih dominan, yakni sejumlah 60 konten. Dengan menyajikan 60 konten politik dan 20 konten pribadi, @habibidrus tidak hanya berusaha untuk menegaskan agenda dan program politiknya, tetapi juga mengakui pentingnya hubungan personal dalam kampanye. Strategi yang dilakukan oleh Habib Idrus menunjukkan bahwa mengelola keseimbangan antara citra profesional dan koneksi personal dapat memperkuat daya tarik kandidat di mata pemilih, sehingga memperluas jangkauan pengaruhnya dalam arena politik.

Terakhir, @meitricitrawardani memiliki keseimbangan konten yang berbeda, yakni 3 konten personal dan 45 konten sosialisasi politik yang dimilikinya. Meitri Citra Wardani memprioritaskan konten sosialisasi politik dengan kemasan citra profesional serta kredibilitas mereka yang ditonjolkan. Dengan proporsi konten yang lebih besar didedikasikan untuk sosialisasi politik, ia memprioritaskan

penyampaian pesan politik dan programnya secara konsisten, sambil menggunakan konten pribadi dalam jumlah kecil untuk menambah dimensi personal pada citranya. Strategi tersebut dilakukan olehnya untuk menonjolkan kredibilitas dan keahlian politik yang dimiliki, sekaligus tetap mempertahankan keterhubungan dengan pemilih melalui konten yang menunjukkan sisi kebaikan dirinya. Pendekatan tersebut dilakukan dalam menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan personalisasi guna meningkatkan daya tarik kandidat serta memperkuat kepercayaan publik terhadapnya.

Secara keseluruhan, ketiga politisi muda PKS menunjukkan prioritas utama pada konten sosialisasi politik, tapi dengan variasi dalam cara mereka mengintegrasikan konten personal. Temuan ini menjadi pembeda dari beberapa studi sebelumnya tentang penggunaan Instagram oleh politisi. Studi Bast (2022) menunjukkan bahwa politisi terutama menggunakan Instagram untuk menciptakan citra positif tentang diri mereka sendiri. Ini berarti mereka ingin orang melihat mereka dalam rona yang baik, daripada membahas isu-isu politik penting atau berbicara langsung dengan warga negara. Misalnya, alih-alih memposting tentang undang-undang yang ingin mereka ubah, mereka mungkin berbagi foto diri mereka tersenyum di acara atau terlibat dengan pendukung. Ini berarti mereka sering berbagi gambar yang menonjolkan kepribadian atau kualitas kepemimpinan mereka. Sementara itu dalam temuan studi ini, integrasi pesan politik kandidat dalam berbagai jenis konten yang diunggahnya, termasuk dalam konten pribadi masing-masing mencerminkan perbedaan dalam cara mereka ingin dipersepsikan oleh pemilih dan bagaimana mereka berusaha membangun hubungan dengan audiens. Penekanan pada konten sosialisasi politik yang konsisten di semua akun menunjukkan pentingnya penyampaian pesan yang jelas dan kuat dalam kampanye politik, sementara kehadiran konten personal memberikan kesempatan untuk membangun keakraban dan daya tarik yang lebih personal. Dengan demikian, perbedaan dalam pendekatan konten ini tidak hanya mencerminkan strategi individual masing-masing politisi tetapi

juga mencerminkan beragam metode dalam membangun citra dan hubungan dengan pemilih. Strategi yang berbeda menyoroti pentingnya menyeimbangkan antara presentasi profesional dan interaksi pribadi dalam kampanye politik, serta bagaimana konten yang dipilih dapat mempengaruhi persepsi dan dukungan dari audiens target.

Meski memerlukan uji korelasi lebih lanjut tentang strategi integrasi konten sosialisasi politik dalam konten personal kandidat pada tingkat keterpilihan kandidat, model pemasaran politik digital ini terbukti menjadi salah satu cara yang mendorong popularitas kandidat. Lebih lanjut, popularitas setidaknya menjadi modal awal tingkat elektabilitas seorang kandidat meski dengan catatan perlunya strategi kampanye secara keseluruhan yang lebih komprehensif. Hal ini terkonfirmasi oleh Ismail Bachtiar dalam wawancara secara daring dengan penulis yang menyatakan bahwa strategi kampanye digital melalui Instagram yang terstruktur dengan jadwal tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya mendorong popularitasnya sehingga lebih mudah dikenal oleh masyarakat dan hal ini dapat mempersuasi masyarakat untuk memilihnya. Artinya, pemanfaatan platform Instagram melalui konstruksi narasi citra diri yang dibangun melalui strategi integrasi konten politik dalam konten personal menjadi salah satu cara yang efektif menyebarkan sosialisasi politik yang berkelanjutan. Dampaknya mereka mampu menjangkau pemilih yang lebih luas dan memperkuat pesan kampanye mereka. Strategi pendekatan di media ini dilakukan oleh mereka untuk memengaruhi persepsi publik dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pemilih.

Marketing Politik Politisi Muda dalam Kacamata Marketing Mix

Bilamana kita menerapkan teori Marketing Mix atau 4P (*Product, Price, Place, Promotion*), dalam menganalisis kampanye politik kandidat politisi muda PKS, maka kita dapat melihat bagaimana elemen-elemen ini berperan dalam strategi kampanyenya. Setiap elemen memiliki peran dalam meningkatkan daya saing kandidat

dalam Pemilu. Berdasarkan empat indikator marketing campuran yang diklasifikasikan oleh Kloter, studi ini akan fokus pada tiga indikator produk, yakni produk, *place* (waktu unggah konten), dan *promotion*. Penulis dalam hal ini mengeksklusi indikator *price*, karena indikator ini berlandaskan dari seberapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh penerima pesan, yakni pemilih.

Pertama, yakni produk. Dalam konteks politik, “produk” di sini adalah kandidat tersebut dan platform politik yang dimilikinya. Sebagaimana sampel dalam penulisan ini, Ismail Bachtiar sebagai politisi muda PKS menyampaikan visi, misi, dan kebijakan yang ia tawarkan melalui media sosial. Kampanye politiknya mengkomunikasikan nilai-nilai serta solusi yang diberikan dan dikemas menarik untuk pemilih.

Kedua, yakni *place* yang diartikan sebagai waktu unggah yang mudah diakses bagi pemilih, sehingga waktu tersebut tepat untuk penerima pesan agar terpapar atas pesan politik yang dibawa kandidat. Waktu unggah dari politisi muda dalam kampanye digitalnya menggunakan strategi dan pertimbangan cermat agar bisa memaksimalkan jangkauan serta dampak. Politisi muda memanfaatkan hal-hal yang *trending* melalui pemanfaatan analisis data dan tren penggunaan media sosial dalam menentukan waktu yang paling efektif untuk diunggah.

Strategi yang ditetapkan oleh politisi muda PKS menunjukkan pendekatan yang terencana, tapi tetap fleksibel dalam manajemen kampanye politik digital. Terdapat jadwal konten yang rinci untuk setiap minggu, yang juga sangat beradaptasi dengan isu-isu insidental. Hal tersebut mencerminkan keseimbangan yang penting antara perencanaan strategis dan responsif terhadap dinamika media sosial. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi pesan kampanye sambil tetap relevan dan terkini dengan mengangkat isu-isu yang tiba-tiba muncul dan menarik perhatian publik. Dalam konteks marketing digital, memiliki jadwal konten yang terstruktur memungkinkan kampanye untuk mengatur aliran informasi secara terencana, meningkatkan visibilitas,

dan memastikan pesan kampanye yang konsisten. Lebih lanjut, politisi muda PKS pun memanfaatkan tanggal-tanggal kalender dan acara isu-isu yang pada saat itu sedang hangat dibicarakan oleh publik guna memastikan konten mereka telah relevan dan waktu yang tepat. Sebagai contoh, unggahan yang memiliki kaitan dengan peristiwa terkini ataupun tren viral, mereka memanfaatkan momen tersebut.

Membuat *timeline* dalam kampanye digital bagi politisi muda adalah langkah yang dilakukan untuk memastikan penyampaian pesan yang terencana, konsisten, dan efektif. Melalui penetapan jadwal yang jelas untuk pengunggahan konten, politisi muda merancang dan menyebarkan materi kampanye secara strategis, menyesuaikan pesan dengan waktu yang tepat untuk memaksimalkan dampaknya. *Timeline* memungkinkan mereka untuk mengatur berbagai jenis konten—mulai dari video, infografis, hingga postingan di media sosial—agar selaras dengan momen-momen penting dan peristiwa terkini yang relevan dengan audiens target. Selain itu, perencanaan yang matang membantu dalam mengelola sumber daya secara efisien, menghindari kekacauan atau tumpang tindih konten, dan memastikan bahwa setiap pesan mendukung tujuan kampanye secara menyeluruh. Dengan begitu, kampanye digital tidak hanya lebih terstruktur tetapi juga lebih mampu menjangkau dan beresonansi dengan pemilih secara efektif.

Ketiga, yakni *promotion*. Promosi dalam hal ini mencakup kreativitas dan gaya bahasa politisi muda untuk menyampaikan pesan politik yang dimilikinya melalui Instagram. Politisi muda identik menggunakan kreativitasnya dalam menyampaikan pesan politik. Kreativitas ini terlihat dari format-format yang tidak konvensional dalam berkomunikasi.

Dalam kasus Ismail Bachtiar, ia selaku politisi muda menyadari pentingnya segmentasi pasar dalam kampanye politik digital dan bagaimana memilih platform yang tepat dapat memengaruhi efektivitas pesan. Hal ini efektif untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar di berbagai wilayah dan demografi tanpa terlalu memperhatikan detail lokal. Sebaliknya, Instagram memerlukan pendekatan yang

lebih terperinci dan spesifik. Artinya, konten disesuaikan dengan audiens berdasarkan daerah pemilihan dan karakteristik lokal. Pendekatan yang dilakukan oleh Ismail Bacjtari memastikan bahwa pesan kampanye lebih relevan dan resonan dengan audiens target yang lebih tersegmentasi. Strategi tersebut diterapkan oleh politisi muda PKS dalam menekankan pentingnya adaptasi dalam marketing politik digital, yakni konten dan saluran komunikasi disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pemilih yang berbeda.

Dalam melakukan promosi, politisi muda PKS mengunggah keseharian mereka, menyampaikan pesan politik yang dikemas dengan hiburan, hingga melakukan *live streaming* di Instagram untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan audiens. Politisi muda mengemas konten yang dikemas dengan bahasa daerah pemilihan perihal isu yang ia bawa untuk memudahkan pemilih dalam memahami pesannya.

Dalam konteks strategi komunikasi yang lebih luas, pendekatan politisi muda PKS untuk merencanakan isu-isu menarik dan acara tatap muka menggambarkan usaha mereka untuk mengintegrasikan interaksi digital dengan keterlibatan langsung yang lebih mendalam. Dengan menyiapkan tempat, waktu, dan peserta secara cermat, politisi muda PKS tidak hanya berusaha memperluas dampak keterlibatan digital tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk membangun koneksi yang lebih personal dan langsung dengan pemilih. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan umpan balik langsung yang berharga dari masyarakat, yang dapat memperkaya strategi kampanye dengan wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan harapan pemilih. Integrasi antara komunikasi digital dan tatap muka ini menunjukkan keseriusan dalam menciptakan hubungan yang lebih signifikan dan efektif, serta mengoptimalkan penggunaan berbagai saluran komunikasi untuk membangun dukungan yang kuat dan terinformasi.

Gaya bahasa yang dimiliki oleh politisi muda PKS dalam kampanye digital identik menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa

daerah dari daerah pemilihannya. Mereka juga menggunakan jargon politik untuk memberi kesan pada pemilih. Gaya bahasanya bersifar autentik dan penuh energi. Selain itu, mereka sering menggunakan analogi yang sederhana untuk menyampaikan gagasan yang ia bawa. Dalam hal ini juga, politisi muda memanfaatkan gaya bahasa yang inklusif untuk membangun hubungan emosional dengan pemilih, sehingga di antara kandidat dan pemilih telah tercipta resonansi yang lebih dalam dengan pemilih hingga membuat mereka termotivasi untuk memberikan dukungan yang lebih besar. Melalui penerapan teori Marketing Mix, kampanye politik sebelumnya dirancang secara matang dari kandidat dan timnya untuk memaksimalkan efektivitas dari berbagai aspek.

Pada dunia era politik modern ini, strategi marketing politik dapat berbeda, tergantung berdasarkan usia serta pengalaman seorang politisi. Politisi muda, yang dekat dengan teknologi memanfaatkan alat digital dalam menjangkau audiens secara langsung juga profesional. Partisipasi politik tidak terbatas hanya pada jalur formal seperti partai politik, organisasi sayap, atau organisasi kader. Ia juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan seperti pembuatan petisi online, *crowdfunding*, menulis opini di media sosial, membuat meme, dan *video blogging* (Sweinstani, 2024).

Penutup

Dalam era digital saat ini, politisi muda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memanfaatkan media sosial secara intensif sebagai alat untuk kampanye digital dalam membangun citra politik mereka. Politisi muda PKS cenderung memfokuskan kampanye digital mereka pada konten sosialisasi politik ketimbang konten personal. Mereka secara aktif mengunggah materi yang menjelaskan program, visi, dan misi partai, serta berinteraksi dengan pemilih melalui diskusi politik dan edukasi mengenai isu-isu terkini. Pendekatan ini menunjukkan prioritas mereka untuk menyampaikan informasi substansial dan membangun kesadaran politik, alih-alih menonjolkan aspek pribadi dari kehidupan mereka.

Politisi muda PKS aktif di platform media sosialnya untuk menjangkau pemilih yang lebih luas dan beragam. Mereka sering mengunggah konten-konten yang relevan dan menarik, seperti video pendek, infografis, dan interaksi langsung dengan pengikutnya. Strategi tersebut dilakukan mereka untuk membangun koneksi yang lebih personal dengan masyarakat dan menyampaikan pesan politik dengan cara yang lebih dinamis. Di sisi lain, para politisi senior di PKS pun turut menggunakan media sosialnya untuk beradaptasi dengan tren digital, tetapi pendekatannya lebih formal serta kurang interaktif. Politisi senior lebih fokus pada kebijakan-kebijakan sebelumnya yang dinilai telah berhasil dengan gaya komunikasi yang formal, berbeda dibandingkan dengan politisi muda yang mengadopsi gaya komunikasi lebih kasual.

Media sosial dalam hal ini memiliki dampak signifikan terhadap popularitas politisi. Atas kemudahan akses dan penyebaran informasi yang cepat, politisi muda dapat memperkenalkan diri dan pesan politik mereka kepada masyarakat. Platform-platform media sosial yang digunakan oleh para politisi PKS memungkinkan mereka untuk membuat konten yang viral dan mendapatkan jangkauan yang lebih luas dalam waktu yang sempit. Kendati demikian, hal yang perlu diingat adalah popularitas kandidat melalui media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan elektabilitas secara langsung.

Popularitas yang tidak berbanding lurus dengan elektabilitas ini disebabkan oleh beberapa faktor. Sebab, popularitas di media sosial bersifat sementara dan dapat dipengaruhi oleh algoritma platform, tren sesaat, atau viralitas konten yang tidak selalu mencerminkan dukungan yang mendalam atau berkelanjutan. Selain itu, pemilih yang aktif di media sosial tidak selalu mewakili keseluruhan populasi pemilih, dan keputusan pemilihan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti rekam jejak kandidat, program kebijakan yang nyata, serta kepercayaan dan hubungan yang dibangun secara tatap muka. Oleh karena itu, meskipun kampanye media sosial dapat membantu dalam

membangun citra dan menarik perhatian, keberhasilan pemilihan memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi, termasuk komunikasi langsung, substansi kebijakan, dan upaya untuk menjangkau pemilih di luar ruang digital.

Daftar Pustaka

- Adam, S., & Maier, M. (2010). Personalization of politics: A critical review and agenda for research. In *Annals of the International Communication Association* (pp. 213–257). London: Routledge.
- Afifuddin, Beni Saebani. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Amalia, L. S., Budiatri, A. P., Sweinstani, M. K. D., Kusumaningtyas, A. N., & Ekawati, E. (2021). Simultaneous Elections and the Rise of Female Representation in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 50–72. <https://doi.org/10.1177/1868103421989716>
- Andriana, N. (2013). Media Siber Sebagai Alternative Jembatan Komunikasi Antara Rakyat dan Pemimpinnya. *Jurnal Penelitian Politik Vol. 10 No. 2 Desember 2013*, 79–93.
- Batara, P. A. L., Prisanto, G. F., Ernungtyas, N. F., Irwansyah, I., & Hasna, S. (2020). Strategi Komunikasi Pemasaran Politik pada Pemilu Legislatif. *Metacommunication; Journal of Communication Studies*, 5(2), 184–194.
- Bessant, J. (2004). Mixed messages: Youth participation and democratic practice. *Australian Journal of Political Science*, 39(2). <https://doi.org/10.1080/1036114042000238573>
- Boulianne, S. (2009). Does internet use affect engagement? A meta-analysis of research. *Political Communication*, 26(2), 193–211. <https://doi.org/10.1080/10584600902854363>
- Coleman, S. (1999). The new media and democratic politics. *New Media and Society*, 1(67), 67–73.
- Coleman, S. (2006). *Remixing citizenship: democracy and young people's use of the Internet*. Carnegie YPI.

- Collin, P. (2015). Young Citizens and Political Participation in a Digital Society. In *Young Citizens and Political Participation in a Digital Society*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9781137348838>
- Cresswell. 2016. *Research Design, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm 284
- Creswell, W. J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitive and Mixed Methods Approaches. In *SAGE* (Vol. 53, Issue 9). <https://doi.org/131415161710987654321>
- Firmanzah, P. D. (2012). *Marketing politik: antara pemahaman dan realitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gainau, M. B. (2016). *Pengantar Metode Penelitian*. Depok: PT Kanisius.
- Gibson, R. K., & McAllister, I. (2006). Does cyber-campaigning win votes? *Online communication in the 2004 Australian election. Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 16(3), 243–263.
- Hayes, D., & Lawless, J. J. (2016). *Women On The Run. Gender, Media, and Political Campaigns in a Polarized era*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hidayat, S. (2016). An Islamic Party in Urban Local Politics: The PKS Candidacy at the 2012 Jakarta Gubernatorial Election. *Jurnal Politik*, 2(1), 4.
- Ida, R., Saud, M., & Mashud, M. (2020). Persistence of social media on political activism and engagement among Indonesian & Pakistani youths. *Journal of Web-based Communities, Inderscience Publisher*. <https://doi.org/10.1504/IJWBC.2020.10028448>
- Kartika, Y., Suminar, P., & Adhrianti, L. (2021). Political Marketing Pemilihan Kepala Daerah Bengkulu Utara Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)*, 10(1), 85–96.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introductions to its Methodology (Second Edition)*. California: Sage Publication.
- Kruikemeier, S., Van Noort, G., & Vliegenthart, R. (2016). The Effect of Website Interactivity on Political Involvement: The Moderating Role of Political Cynicism. *Journal of Media Psychology*, 28(3), 136-147. <https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000200>
- Longstaff, E. (2001). Book Review: Young People and Social Change: Individualization and Risk in Late Modernity. *Youth Justice*, 1(2). <https://doi.org/10.1177/147322540100100210>
- Mancini, Paolo. (1996). *Politics, Media and Modern Democracy: An Internatinal Study of Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences*. Wesport: Praeger.
- McNair, Brian. “Introduction Political Communication”, London: Routledge, 2011.
- Newman, B. I. (1999). *Handbook of political marketing*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Newman, B. I., & Perloff, R. M. (2004). *Political Marketing: Teory, Research, and Aplication*. In L. L. Kaid, *Handbook of Political Communication Research* (pp. 17–43). New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates Inc.
- Nurfitriani, N., Hamrun, H., & Taufik, A. (2017). Pemasaran Politik Bupati Bima Terpilih pada Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2015. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(2), 71–78.
- Sanne, K. (2014). How Political Candidates Use Twitter and The Impact on Votes. *Computers in Human Behaviour*, 34 (2014), 131–139.
- Saud, M. (2020). Youth participation in political activities: The art of participation in Bhakkar, Punjab Pakistan. *Journal of Human Behavior in Social Environment*. <https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1745112>
- Seyd, P., & Whiteley, P. (2002). *New Labour's Grassroots: The Transformation of the Labour Party Membership*. Palgrave Macmillan. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Q0-BDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=seyd+%26+whiteley+2002&ots=XHDXl8bIVX&sig=8N2VKIDF2A9looXmqjZyz2w8kgo&redir_esc=y#v=onepage&q=seyd%20%26%20whiteley%202002&f=false
- Shames, S. L. (2017). *Out of the Running Why Millennials Reject Political Careers and Why It Matters*. New York University Press.
- Situmorang, J. R. (2012). Pemanfaatan Internt Sebagai New Media dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan, dan Sosial Budaya. *Jurnal Administrasi Bisnis* (2012), Vol. 8 No. 1, 73–87.
- Soedarsono, Dewi & Mohamad, Bahtiar &

- Akanmu, Diekola. (2020). *Political Leaders and Followers' Attitudes: Twitter as a Tool for Political Communication*. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 12. 1615–1626. 10.5373/JARDCS/V12I2/S20201359.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sweinstani, M. K. D. (2019). The Use of Social Media as the New Platform for Women's Campaign in Local Executive Election. *Proceeding of International Conference on Social Sciences in The 21st Century*, 45–61. <https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2019/07/35-7045.pdf>
- Sweinstani, M., & Idris, K. (2019). *Mengenal Demokrasi dan Politik Untuk Pemula*. Esensi.
- Sweinstani. (2024). Healthy Society and The Youth Political Participation in Indonesia. Disampaikan dalam Tokyo Youth Democracy Forum, Tokyo 10 Juni 2024
- Utomo, W. P. (2013). Menimbang media sosial dalam marketing politik di Indonesia: belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1), 67–84.
- Wahid, Umaimah. (2016). *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Warnick, B., Xenos, M., Endres, D., & Gastil, J. (2005). Effects of campaign-to-user and text-based interactivity in political candidate campaign web sites. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 10(3)
- Whiteley, P., & Seyd, P. (2002). *High-intensity Participation: The Dynamics of Party Activism in Britain*. The University of Michigan Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=FhmuaScREfMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=seyd+%26+whiteley+2002&ots=gN4L7dtJQT&sig=QX5edFsuT0EGUuQgToNyd_QNHJY&redir_esc=y#v=onepage&q=seyd%20%26%20whiteley%202002&f=false

RISING SEAS, RISING STAKES: CLIMATE ADAPTATION IN BANYUWANGI'S COASTAL COMMUNITIES AND ITS IMPACT ON INDONESIA'S RESILIENCE AND ASEAN'S SECURITY

Pandu Prayoga

Research Center for Politics - BRIN
E-mail: pandu.prayoga@brin.go.id

Accepted: 3 Januari 2025; Revised: 30 Januari 2025; Approved: 30 Januari 2025

Abstract

The rising seas caused by climate change present significant challenges to coastal communities worldwide, particularly in vulnerable regions like Banyuwangi, Indonesia. This paper examines the intersection of climate change adaptation strategies and their socio-economic and environmental impacts in Banyuwangi's coastal zones. By analysing government policies, community initiatives, the study highlights the region's effort to address sea-level rise, coastal erosion, and biodiversity loss. It further explores how these localised contributed to Indonesia's broader resilience and ASEAN frameworks against climate change. The findings emphasise the importance of community engagement, innovative policies, and multi-sectoral collaboration to mitigate the risks posed by rising seas, ensuring the sustainability of coastal livelihoods and ecosystems. This study contributes to the growing body of literature on climate adaptation, offering actionable insights for policymakers and stakeholders in similar place across the Southeast Asia region.

Keywords: Climate change, resilience, maritime, Banyuwangi, Indonesia, ASEAN.

Introduction

Climate change is posing impacts on coastal areas globally and presenting significant threats to ecosystems, economies, and human populations. Rising sea levels, driven by the melting of polar ice and the thermal expansion of seawater, are among the common pressing challenges (Oliver-Smith, 2009). As sea levels rise, low-lying coastal zones face increased risks of flooding, erosion, and saltwater intrusion, jeopardizing freshwater supplies and agricultural productivity. Many countries are affected by climate changes including Indonesia.

Indonesia is a country that located among the Indian Ocean, Andaman Sea, South China Sea, and the Pacific Ocean. It has an extensive coastline of approximately 173,000 kilometres and is surrounded by significant bodies of water including sea, gulf, and straits (Secretariat,

2006). The country experiences warm and humid climate year-round since it has equatorial location.

Indonesia, as an archipelagic country, is particularly vulnerable, with major coastal area and environment exposed to higher storm surges and extreme weather events. Warmer ocean temperatures and acidification are disrupting marine ecosystems, affecting biodiversity and fisheries that millions of people rely on food and livelihood (Kumari & Garg, 2024). These environmental stressors lead to remote catching (Moegni et al., 2014), with some coastal communities facing displacement and increased vulnerability to poverty (Yokoyama et al., 2023) (Fujii, 2016) (Sato, 2024). The compounded effect of these calls for urgent and comprehensive adaptation strategies, as the repercussions of coastal climate impacts are felt

not only locally but also contribute to broader social and economic instability on a global scale.

Rising sea levels also pose a significant security threat to Indonesia, particularly to its outer islands, many of which are low-lying and vulnerable to submersion. For example, Jakarta in Indonesia, is among the sinking rapidly cities globally, with sea levels rising faster than the city's elevation each year (Hebron, 2024). As global temperatures continue to increase due to climate change, polar ice melts and ocean waters expand, causing sea levels to rise. This puts Indonesia's extensive archipelago, especially its outermost islands as boundaries with 10 neighbouring countries, at risk of sinking or being severely eroded (Apriani et al., 2014). If these islands disappear, it could not only result in the loss of valuable land but also impact the country's maritime boundaries which potentially leading to disputes over territorial waters and resources. The sinking of these islands would have profound social, economic, and environmental consequences, including loss of biodiversity and increased vulnerability to natural disasters.

While Indonesia faces significant challenges from climate changes above, it also holds immense potential to contribute to global climate resilience and environmental security. This country can offer examples in developing and implementing innovative adaptation strategies. Indonesia is rich with natural resources, such as mangroves, coral reefs, and rainforests, serve as critical buffers against climate impacts while also acting as carbon sinks. Through initiatives like ecosystem restoration, sustainable coastal management, and community-driven adaptation projects, Indonesia can strengthen its resilience and security while sharing valuable lessons with other countries facing similar challenges. By leveraging its unique geographic and ecological strengths, Indonesia has the opportunity to not only safeguard its communities and environment but also play a vital role in global fight against climate change. To do so, this paper reviews Banyuwangi in Indonesia as a case study.

Banyuwangi, a district with strategic maritime significance due its location along

shipping routes and tourism destiny, serves as a microcosm for understanding how climate adaptation community-based can contribute into broader security program. Climate-induced risks, namely rising seas, erosion, and extreme weather events, disrupt local livelihoods and strain resources are factors that collectively fuel social instability. Given Indonesia's vast coastline and reliance on coastal resources, Banyuwangi's experience serves as a pressing example of the need for integrated policies that bolster resilience against climate impacts. Strengthening Banyuwangi's climate adaptation efforts can contribute to Indonesia's national security by reducing vulnerabilities, enhancing resource management, and maintaining stability in one of Southeast Asia's most strategically positioned regions.

This paper is addressing two important questions, 1) What are the adaptation strategies employed by the people of Banyuwangi in response to the impacts of climate change that have enhanced Indonesia resilience? 2) How do these community-driven efforts contribute to ASEAN's endeavours in achieving environmental security? In addressing these two questions, the paper divided into five parts. First part explores literature review to explore existing literature about the topic. Second part explains impact of Climate Change on Banyuwangi's Coastal Regions. Third part reviews community-based adaptation strategies in Banyuwangi. Fourth part explains relation between local and Indonesia's climate resilience. Then, last part explores ASEAN frameworks addressing environmental security.

Literature Review

This study of climate change adaptation in Banyuwangi's coastal areas is crucial, as it highlights the interconnectedness of environmental issues and national security concerns for Indonesia. Existing studies on climate change reveal that rising sea levels and intensified coastal impacts are among the most significant threats to coastal regions globally. Research consistently shows that the primary drivers of sea level rise pose severe risks to

low-lying coastal areas (Dawson et al., 2018). Studies by the Intergovernmental panel on Climate Change (IPCC) highlight that as sea levels rise, coastlines experience increased flooding, erosion, and salinization of fresh water resources, affecting agriculture, drinking water supplies, and infrastructure (Oppenheimer & Glavovic, 2022).

In Southeast Asia and Pacific, where many coastal communities rely on the ocean for their livelihoods, leading to economic, social, and ecological challenges. Studies point to a positive feedback loop: as ecosystems such as mangroves and coral reefs, which buffer coastlines from storms and erosion, are degraded by climate change, coastal vulnerability is further intensified (Trégarot et al., 2024). Localized studies in countries like Indonesia show that rural and urban communities alike are already facing resource scarcity, with adaptation efforts lagging the accelerating pace of environmental change (Rejekiingrum, 2014). Together, these findings underscore the urgent need for region-specific adaptation strategies that address both immediate and long-term coastal vulnerabilities.

The concept of climate change as a security threat has gained increasing attention in recent years (Boyer & Oculi, 2019). Theories linking climate change to security emphasize that environmental stressors such as extreme weather events, rising sea levels, and resource scarcity can destabilize societies by exacerbating economic disparities and intensive coastal competition. In Indonesia, a nation with thousands of islands and extensive coastal populations, climate-related security risks are particularly critical. Rising seas threaten to displace coastal communities, which may lead to mass migrations and tensions in urban areas unprepared for such demographic shifts. Saltwater intrusion and flooding undermine agricultural productivity and freshwater availability, posing risks to food and water security. Security experts argue that climate-driven impacts can strain government resources, weaken institutional capacity, and heighten vulnerabilities to conflict and organized crime in affected areas. The ASEAN region, where

many countries share maritime borders, is also sensitive to these cascading risks, as disruptions in one area can affect trade, migration, and political stability across the region (Boas, 2015). Indonesia's experience underscores the need for regional, multi-level response to climate security that includes stronger climate adaptation, disaster preparedness and resource management policies to mitigate the destabilizing effects of climate change (Indonesia's Government, 2021).

Several scholars discussed the impact of climate change on security in Southeast Asia region. Caballero-Anthony et al. (2023) explore how climate change exacerbates environmental, economic, and security challenges in the region, with a focus on resource conflict, climate-induced migration, and coastal areas. Caballero-Anthony et al. highlights the need for stronger regional cooperation and integrated strategies to mitigate climate risks and safeguard peace and stability in ASEAN. While it may provide an overview of the human security threat posed by climate change, the book lacks a detailed examination of localized impacts on specific coastal communities in Southeast Asia. There is a need to understand how different coastal areas, depending on geography, socio-economic conditions, and governance structures, experience varying levels of vulnerability to climate-related threats.

UNDP Policy Brief on the climate security nexus explores the connection between climate change and violent extremism, identifying climate changes as a significant "risk multiplier" in fragile regions (Wong et al., 2020). This linkage operates through several mechanisms which climate change depletes resources and destabilises livelihoods, it can exacerbate grievances, weaken governance, and fuel conflict over scarce resources.

For some countries, environment and maritime domain can be seen as trigger for conflict and competition specifically for controlling over valuable resources and strategic territories. Disputes over fishing grounds, claimed waters, artificial islands, and the exploitation of marine resources can

elevate tensions and confrontations between countries (González Levaggi, 2023). However, environment and maritime domain also can produce cooperation among nations (Nagy, 2024).

Climate change is classified as non-traditional security which basically a positive sum game that motivates countries in Southeast Asia to cooperate (Prayoga, 2022). Shared environmental threats, such as pollution, climate change and protecting of marine biodiversity, demand collective actions not only among countries but also public. Environmental degradation can lead several threats to national survival and human security (Ali & Shah, 2023). By working together on environmental sustainability of marine resources, countries can build trust, strengthen diplomatic ties, and create frameworks for peaceful coexistence. Therefore, while environmental and maritime domain may lead to competition, both also offer opportunities for countries to address common challenges and potential conflicts into areas for cooperation on environmental security.

Other scholar focuses on environmental security and highlights some approaches such as focusing on environmental management (Peou, 2021). Environmental management has gained increasing attention as regional institutions like the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) take on a more active role in addressing global environmental problems which reflected in Socio Cultural Community (ASCC). By participating in global initiatives, ASEAN not only contributes to the global dialogue on sustainability but also enhances its member states' capacities to mitigate climate change. This collective approach allows ASEAN to implement more comprehensive strategies that address both unique environmental concerns of the region and global challenges. Through collaborative efforts, including sharing best practices on mitigation and adaption, conducting joint research, and cultivating regional partnership, ASEAN underscores the importance in achieving economic growth, social development, and environmental sustainability.

Impact of Climate Change on Banyuwangi's Coastal Regions

Banyuwangi, located on the eastern part of Java Island, Indonesia, is highly vulnerable to impacts of climate change due to its extensive coastline 175.8 km and proximity to the Indian Ocean (Umilia & Mahendra, 2022)(Regency Official Website, n.d.). This coastal district faces increasing risks from sea level rise, coastal erosion, and more frequent extreme weather events, including intense rainfall and storms (Saksono, 2024). As sea levels rise, low-lying areas in Banyuwangi are prone to regular flooding, threatening homes, agricultural lands, and vital infrastructure. Also, saltwater intrusion into freshwater sources compromises water quality and agricultural productivity, endangering local food security and livelihoods, particularly for fishing and farming communities (Muchamad et al., 2017). Banyuwangi's geographic position, coupled with limited adaptive resources, heightens its vulnerability, making it susceptible not only to environmental degradation but also to economic and social instability. The combination of these challenges underscores the urgent need for comprehensive climate adaptation measures to safeguard Banyuwangi's natural resources, economy, and residents.

The coastal region of Banyuwangi faces significant challenges from both current and projected sea-level rise, driven by the accelerating impacts of climate change. Rising seas have led to increased flooding, coastal erosion, and saltwater intrusion, threatening vital agricultural lands and freshwater resources. Communities along the coast are already experiencing disruptions to their livelihoods, particularly in fisheries and tourism, which are essential economic for the region (Zulianto et al., 2020). Projections indicate that if sea levels continue to rise at the current rate, low-lying areas in Banyuwangi could face permanent inundation, displacing thousands of residents, and endangering critical infrastructure (Erwanto et al., 2021a). These changes also pose a threat to the region's unique ecosystems, including pine tree, mangroves, and coral reefs, which act as natural barriers against storm surges. Addressing

these challenges requires urgent and coordinated efforts to implement adaptive measure that protect both human and environment systems in Banyuwangi's coastal zones.

The socio-economic consequences of climate change for coastal communities in Banyuwangi are profound, affecting livelihoods, health, and overall well-being. The region's dependence on fisheries and agriculture has made these communities particularly vulnerable to disruptions caused by rising seas and erratic weather patterns. Coastal erosion and saltwater intrusion have reduced agricultural productivity, threatening food security and income for farmers. Meanwhile, declining fish stocks due to warming seas and habitat degradation have impacted the livelihoods of fisherfolk (Badjeck et al., 2010), forcing some to seek alternative, often less stable, sources of income (Fatimah, 2014). Tourism, another vital economic sector, has also been affected as beach erosion and environmental degradation reduce the region's appeal to visitors (Phillips & Jones, 2006). Some coastal areas in Banyuwangi, including Camara Beach, are affected by beach erosion (Erwanto et al., 2021b). Beyond economic losses, these changes exacerbate social inequality, as marginalised groups often lack the resources to adapt or recover. Without effective intervention, those socio-economic challenges could deepen poverty and force migration, further straining the resilience of coastal communities in Banyuwangi.

Environmental degradation and biodiversity loss in Banyuwangi's coastal zones are significant consequences of climate change and human activities. These ecosystems, which provide critical habitats for marine and terrestrial species, are being degraded at an alarming rate, leading to the loss of biodiversity, and disrupting ecological balance. The destruction of mangroves, for instance, not only reduces biodiversity but also weakens natural coastal defences against storms and flooding. Coral bleaching, driven by warming seas and pollution, has diminished fish population, threatening marine food chains and the livelihoods of local fishing communities. Furthermore, the expansion of

urban and industrial activities along the coast has intensified habitat destruction and waste accumulation. This environmental degradation compromises the region's natural resilience, highlighting the urgent need for conversation and sustainable management efforts to protect Banyuwangi's rich biodiversity.

Adaptation Strategies in Banyuwangi

The local government in Banyuwangi has implemented several policies aimed at adapting to climate change and mitigating its impact on the coastal zone. Strategic spatial planning and zoning regulations have been introduced to restrict development in high-risk areas prone to flooding and erosion. Infrastructure projects, such as wave barriers and embankments, have been prioritised to protect coastal settlements and critical facilities (Manunggal, 2023). In several places in Banyuwangi, TetraPOT are applying for coral reef conservation (Abdurrahman et al., 2020). The government has promoted the integration of climate-resilient designs in urban development, ensuring that buildings and infrastructure can withstand extreme weather events. Public awareness campaigns and community engagement initiatives have also been launched to educate residents on the importance of sustainable land use and disaster preparedness. These proactive measures demonstrate the local government's commitment to balancing economic growth with environmental conservation.

Banyuwangi's communities have taken a leading role in climate adaptation through grassroots initiatives that address both environmental and economic challenges. One notable effort is the restoration of pine tree forest along the Camara Beach, which serves as natural barriers against strong winds and sea-level rise while also reducing erosion. Another successful initiative is Bangsring Underwater, a community-driven marine conservation program aimed at restoring coral reef and promoting sustainable tourism (Setiawan et al., 2022). Local fisherfolk have transformed damaged coral ecosystems into

vibrant underwater parks, attracting eco-tourists and divers while protecting marine biodiversity. Eco-tourism projects across Banyuwangi have further encouraged the preservation of natural resources, providing alternative income streams for residents, and fostering a sense of environmental stewardship. These initiatives showcase the power of community action in creating innovative, sustainable solutions to climate challenges.

Collaboration between the public and business has played a critical role in advancing Banyuwangi's climate adaptation strategies. State-owned companies (Pertamina and PLN), in partnership with the local government, have invested in green infrastructure projects, such as renewable energy installations and eco-friendly tourism facilities (Rimawati, 2024) (Hidayatullah, 2024). These partnerships have not only enhanced the region's resilience to climate impacts but have also supported economic growth through job creation and sustainable business opportunities. Moreover, private sector, such as PT. BSI, involvement in mangrove restoration and reforestation efforts has provided funding and expertise to scale up these projects (Rinanda, 2024). Corporate social responsibility (CSR) programs have also been instrumental in raising awareness and mobilizing resources for climate adaptation at the community level. By leveraging the strengths of both sectors, Banyuwangi has demonstrated the importance of inclusive and collaborative approaches to building resilience in the face of climate change.

Banyuwangi's climate adaptation strategies present a mix of strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Among its strengths are the community-driven initiatives which showcase the power of grassroots engagement in creating sustainable solutions. The local government's commitment to integrating environmental conservation with economic development further strengthens its approach. However, weaknesses remain, including limited financial resources and the uneven enforcement of zoning and environmental policies. Opportunities for Banyuwangi lie in scaling up eco-tourism and leveraging public-private

partnerships to attract further investment. On the other hand, threats such as rapid urbanization, environmental degradation, and the intensifying effects of climate change pose significant challenges. Addressing these weaknesses and threats will be crucial for the long-term success of Banyuwangi's adaptation efforts.

Coastal communities, based on the strength side, and local actors in Banyuwangi have played a pivotal role in driving climate adaptation efforts. By leveraging traditional knowledge and fostering a sense of ownership, these communities have successfully implemented initiatives like mangrove restoration and sustainable fishing practices. Local leaders and community-based organizations have also been instrumental in raising awareness about climate risks and mobilizing collective action. Programs such as Bangsring Underwater have demonstrated how local actors can transform environmental challenges into opportunities for economic growth, such as through eco-tourism. The involvement of local stakeholders ensures that adaptation strategies are contextually relevant, socially inclusive, and more likely to be sustained over time.

To scale and replicate Banyuwangi's successful climate adaptation strategies, several key recommendations can be made. First, creating knowledge-sharing platforms can help disseminate lessons learned and best practices to other coastal regions in Indonesia. This could include workshops, conferences, and digital tools that connect local governments and communities. Second, securing financial support through national and international funding mechanisms is essential for expanding programs like mangrove restoration and coral reef conservation. Third, fostering multi-stakeholder collaboration that includes government, private sector, and local communities can enhance resource mobilization and implementation capacity. Lastly, integrating climate adaptation into broader regional and national development plans will ensure that successful strategies are institutionalized and scaled effectively. These recommendations can help amplify the impact of Banyuwangi's initiatives and strengthen Indonesia's overall climate resilience.

Impacts on Indonesia's Climate Resilience

Banyuwangi's efforts in addressing climate change contribute to Indonesia's national adaptation goals, particularly in enhancing coastal resilience and sustainable development. By implementing innovative policies and community-driven initiatives, Banyuwangi serves as a model for integrating environmental conservation with socio-economic growth. The restoration of mangroves, coral reefs, and coastal ecosystems aligns with Indonesia's commitment to climate resilience under its Nationally Determined Contributions (NDCs) to the Paris Agreement. Moreover, Banyuwangi's success in promoting eco-tourism and sustainable fisheries demonstrates how local adaptation strategies can support broader national objectives, such as reducing greenhouse gas emissions and improving livelihoods. These achievements underline the importance of localised actions in achieving Indonesia's overarching climate adaptation goals.

The experiences and outcomes of climate change adaptation strategies in Banyuwangi offer valuable lessons for other regions across Indonesia. One key takeaway is the importance of community engagement in developing and implementing sustainable solutions. The people of Banyuwangi have employed a range of adaptation strategies that address both the environmental and socio-economic impacts of climate change.

Key initiatives include the restoration of mangrove forests, the implementation of sustainable fishing practices, and the development of eco-tourism projects like Bangsring Underwater. Mangrove restoration projects not only act as natural barriers against coastal erosion and storm surges but also serve as carbon sinks, contributing to climate mitigation efforts. Sustainable fishing practices have helped rebuild fish stocks and ensure food security, while eco-tourism has created alternative livelihoods, reducing dependence on traditional, climate-sensitive industries.

Community-driven pine tree restoration along coastal areas, including Cemara Beach, has mitigated the effects of strong winds and reduced soil erosion and protecting agricultural lands. Local zoning policies and disaster preparedness training have also enhanced the community's capacity to respond to extreme weather events. These strategies collectively contribute to Indonesia's resilience by safeguarding vulnerable coastal areas, reducing poverty through diversified income sources, and fostering environmental stewardship among local populations. Banyuwangi's success exemplifies how localised actions can align with national adaptation goals and strengthen Indonesia's ability to withstand and recover from climate impacts.

Grassroots initiatives, such as Bangsring Underwater and Cemara Beach, highlight the role of local communities as active agents of change, rather than passive recipients of aid. Besides, Banyuwangi demonstrates the effectiveness of combining traditional ecological knowledge with modern technology to address complex climate challenges. Regions facing similar risks can adopt Banyuwangi's approaches, tailoring them to their unique environmental and socio-economic contexts. Sharing these best practices through inter-regional collaboration can strengthen Indonesia's overall capacity to adapt to climate change.

Banyuwangi's adaptation strategies underscore the need for integrated coastal management policies that balance environmental conservation with economic development. Policymakers must prioritise the protection and restoration of natural ecosystems, such as mangroves and coral reefs, which provide critical services to coastal communities. Zoning regulations and spatial planning should consider the long-term impacts of sea-level rise, ensuring that infrastructure and settlements are designed to withstand future risks. Moreover, Banyuwangi's success highlights the importance of fostering public-private partnerships to mobilise resources and expertise for sustainable development. National and

local governments can draw on Banyuwangi's experience to create comprehensive policies that address the interconnected challenges of climate adaptation, economic resilience, and social equity in Indonesia's coastal regions.

ASEAN Frameworks Addressing Environmental Security

Banyuwangi's community-driven climate adaptation efforts strongly align with ASEAN's commitment to a people-centred and people-oriented community, particularly in achieving environmental security. At the core of ASEAN's people-centred approach is the belief that solutions to regional challenges, such as climate change, must prioritize the needs, aspirations, and active participation of local communities. Banyuwangi exemplifies this by placing communities at the forefront of its adaptation strategies, empowering them to be agents of change in addressing environmental challenges.

For example, initiatives like mangrove restoration and Bangsring Underwater demonstrate how local people can contribute directly to environmental security while improving their own livelihoods. These projects emphasize community participation in decision-making, implementation, and benefit-sharing, ensuring that the strategies are sustainable and rooted in local needs. By creating alternative income sources such as eco-tourism, Banyuwangi provides economic stability while reducing environmental degradation, addressing two critical pillars of ASEAN's vision for sustainable development.

Furthermore, Banyuwangi's success showcases how empowering local actors fosters resilience and strengthens social cohesion—essential elements of a people-centred ASEAN. When local communities are directly involved in solving climate-related issues, they become stakeholders in preserving environmental security not only for their region but for the broader ASEAN community. This approach aligns with ASEAN's Blueprint 2025, which emphasises inclusive regional growth and sustainable development driven by active citizen participation. The lessons from Banyuwangi

provide a replicable model for other ASEAN nations to adopt, reinforcing the principle that a people-centred approach is key to achieving long-term environmental security and stability across Southeast Asia.

With Banyumas, Banyuwangi Regency has been recognised as participant in the Smart Green Cities (SGAC) development program (Kenzu, 2023). This initiative, supported by the United Nations Capital Development Fund (UNCDF), aims to promote sustainable and environmentally friendly urban development across the ASEAN region. As part of this program, Banyuwangi has the opportunity to showcase its commitment to sustainability and innovation, further solidifying its position as a leader in climate adaptation and green development.

Since Southeast Asia people live in many islands, it is crucial for the grouping to have response to the climate change impacts maritime sectors such as fishing activities, tourism, and living space in the coastal area. The capture fisheries sector is quite vulnerable to the change of habitat and temperature. Furthermore, coastal communities in Southeast Asia already experiencing direct climate change impacts from changes in temperature, sea-level rise, ocean warming, and extreme weather conditions. This community is vulnerable due to their livelihood are influenced by climate change.

According to Secretariat, ASEAN member states (AMS) continue to balance among economic growth, environmental sustainability, and social development. AMS agreed to improve their capacities in promoting conservation and sustainable management and utilisation of marine and coastal ecosystem. These commitments can be seen at Declaration on ASEAN post-2015 Environmental Sustainability and Climate Change Agenda. Regional climate-related commitment is in line with global agenda on Paris Agreement to respond to climate change based on differentiation of national conditions. Paris Agreement acknowledged that economic growth, social development, poverty eradication, and environmental protection are essential for Southeast Asia countries (UNCC).

ASEAN countries are diverse in their levels of economic development, which affects their capacity to invest in climate change mitigation and adaptation plans (Lestari et al., 2024). Wealthier country within the grouping like Singapore can access more sophisticated and costly technologies to implement advanced and often expensive climate solutions. Such country can afford to adopt cutting-edge technologies for reducing carbon emissions, improving energy efficiency, and enhancing resilience to climate impact. On the other hand, less developed AMS such as Laos and Myanmar face greater challenges. These countries are often focused on addressing immediate response namely fulfilling basic infrastructure needs, ensuring access to clean water and electricity, improving healthcare services, and upgrading education systems. Their limited financial capabilities make it difficult to prioritise large-scale climate initiatives, even though they also vulnerable to the impacts of climate change. As a result, these nations may rely more on international aid, regional cooperation, and technology transfer to support their climate efforts.

The economic development gap among AMS plays significant role in shaping national priorities, often leading to decisions that do not fully align with regional climate agendas (Asian Development Bank, 2023). For many countries as well as AMS, the pursuit of economic growth, poverty alleviation, and political stability in many cases win over environmental protection as they can provide the immediate needs for their populations. The focus tends to be on using economic opportunities and improving living standards since large portions of the population may still struggle with poverty and lack access to basic service. The government will prioritise industrial development, infrastructure expansion, and natural resource exploitation over environmental sustainability. For example, a country heavily dependent on natural resources might utilise mining or logging to boost economic growth even though such agenda can contribute to climate change and lead to environmental degradation. Compared with wealthier ASEAN nations with more developed economies might have the capacity to integrate

environmental considerations into their growth strategies.

Several ASEAN member states have economies that are heavily reliant on fossil fuels, both for domestic energy consumptions and as significant export product (Liu, Sheng, & Azhgaliyeva, 2019). Reliance on fossil fuels has been a driving force behind economic growth in these countries, providing affordable energy to power industries, support transportation, and meet the needs of rapidly urbanising populations. However, this dependence presents challenges when it comes to transitioning towards cleaner energy sources. Shifting to renewable energy sources is technically, economically, and politically challenging especially post COVID-19 pandemic. This natural disaster has drawn national budgets, increased debt levels, and enhanced economic recovery, thus making it difficult for governments to develop more advance renewable energy infrastructure. Moreover, the fossil industry is often deeply entrenched in the political and economic landscape of these countries, with powerful stakeholders who may resist changes that could endangered their interests. Indeed, this creates a complex situation where the push for sustainable energy solutions must head-to-head with the immediate need to revive economies that were hit hard by the COVID-19 pandemic. Additionally, for countries that rely on fossil fuels as a major export product, the shift to renewables poses the risk of destabilising income from export, which are crucial for maintaining economic stability and funding social programs. Furthermore, these problems get more complicated by the global dynamics of fluctuating energy prices and the need to remain competitive in the international market. As a result, while there is growing recognition of the importance of renewable energy to combat climate change but the path to achieve this transition is fraught with economic obstacles.

In addition to economic challenges, the diverse political systems and governance structure chain effective regional coordination on climate change (Caballero-Anthony, 2011). The grouping is characterised by a wide spectrum of political regimes, ranging from

democracies to authoritarian states, each with its own decision-making processes, priorities, and government capabilities. It is obvious a challenge to implement unified policies or strategies for climate change among AMS. While ASEAN as a regional organisation promotes cooperation and collective action, the varying levels of political will, institutional capacity, and governance frameworks among its member states can interrupt the effectiveness of these effort. However, without strong regional coordination and alignment of national policies, these common responses risk creating fragmentation rather than synergy in ASEAN's overall climate strategy. The complex interplay of economic and political factors thus makes it clear that achieving a cohesive and effective regional approach to climate change requires not only economic adaptation but also significant political and institutional coordination.

At public level, the lack of awareness and engagement on environmental protection and climate change issues is a common challenge across Banyuwangi District. This lack of awareness is often rooted in a variety of factors, including limited access to education, poor media coverage, and the prioritisation of more immediate economic and social concerns over environmental issues. When the research team interviewed several respondents in Pangandaran and Banyuwangi Districts, especially in coastal areas, daily survival and economic stability are more worrying than abstract or long-term threats like climate change. People may not fully understand the impacts of environmental degradation or the urgency in environmental initiatives. The challenge is not just about raising awareness but also about fostering a sense of responsibility and empowering individuals and communities to act. Without significant improvements in public education and engagement, efforts to address environmental challenges in the region may fall short, as widespread public support and participation are crucial for the successful implementation of climate policies and the transition to a more sustainable future.

This is a crucial point to address when it became evident that daily survival and

economic stability often overshadow concerns about long-term or abstract threats such as climate change. Many individuals lacked a full understanding of the impacts of environmental degradation or the urgency of environmental initiatives. This insight highlights a critical challenge for ASEAN's climate adaptation and resilience programs: the need to bridge the gap between immediate livelihood priorities and long-term environmental goals. ASEAN's people-centred approach to climate resilience should enhanced focus on raising awareness into prioritised fostering a sense of responsibility and empowering communities to take actionable steps. By aligning adaptation strategies with local socio-economic needs, such as creating sustainable livelihood opportunities or integrating environmental education into economic initiatives. ASEAN can ensure that climate resilience efforts resonate with ad benefit local populations while achieving regional sustainability objectives.

To effectively address the environmental challenges facing the region, ASEAN needs to enhance regional cooperation, improve capacity-building, coordinating national and regional policies, and secure adequate funding and technology support. By strengthening regional cooperation, ASEAN can facilitate the sharing of resources, expertise, and best practices, enabling countries to address these problems more effectively and efficiently. Improving capacity-building is also crucial, as it empowers member states to develop the technical and institutional capabilities needed to implement and enforce environmental policies. This includes training government officials, raising public awareness, and encouraging research and innovation in sustainable technologies. Furthermore, coordinating national and regional policies is crucial to ensure that AMS contribute to the grouping goals and creating a cohesive strategy that increases impact. As many ASEAN countries may lack the financial resources or access to advance technologies needed to address environmental challenges. International partnerships, investments, and technology transfers can play a vital role in bridging these gaps.

ASEAN have agreement in implementing people-centred and people-oriented approaches which provides the importance of environmental and human security framework. This framework, guided by principle of “no one leaves behind,” emphasises the need to consider the most vulnerable populations in climate actions and environmental protection efforts, ensuring that all segments of society benefit from sustainable development. By integrating these strategies, ASEAN can strengthen its collective resilience against environmental threats and work towards a future where environment, human well-being, and economic are safeguarded across the region. With all these condition and reasons, as the only organisation that successfully securing challenges from super powers competition, it is time for ASEAN to conduct a comprehensive action tackling climate change.

ASEAN has been actively engaging in cooperation on climate change, recognizing the region’s vulnerability to its impacts and the need for collective action. At the 26th ASEAN Summit in Kuala Lumpur in 2015, leaders of ASEAN committed to build a community that resilient to disaster and climate change. On the Socio-Cultural Community 2025, ASEAN highlights several crucial points cooperation in terms of climate change mitigation and adaption. ASEAN is promoting cooperation to protect, restore, and sustainably use coastal and marine environments. This includes addressing pollution risks and threats to marine ecosystems and coastal areas, especially those that are ecologically sensitive. The organisation advocates for adaption of good management practices and the strengthening of policies to mitigate the impact of development projects on coastal and international waters, as well as transboundary environmental issues like pollution and the illegal movement and disposal of hazardous substances and waste. ASEAN encourages the use of existing regional and international institutions and agreements for these purposes. It also focuses on enhancing policy and capacity development, as well as best practices, to conserve, develop, and sustainably manage marine environments, wetlands, peatlands, biodiversity, and land and water resources.

Conclusion

Banyuwangi’s community-driven adaptation strategies provide a compelling example of how localized, people-centered initiatives can effectively address the complex challenges posed by climate change while contributing to broader resilience and security goals. By empowering communities to lead efforts in mangrove restoration, sustainable fishing, and eco-tourism, Banyuwangi has demonstrated how grassroots innovation and inclusive participation can align with Indonesia and ASEAN priorities. These initiatives not only strengthen Indonesia’s climate resilience but also advance ASEAN’s vision of environmental security by promoting sustainable development, enhancing regional biodiversity, and fostering social cohesion.

Furthermore, Banyuwangi’s emphasis on empowering local actors aligns with ASEAN’s commitment to a people-centered community, where citizens actively contribute to shaping solutions that address shared environmental challenges. This approach underscores the importance of integrating local knowledge, inclusive decision-making, and sustainable livelihoods into climate adaptation strategies, ensuring their effectiveness and scalability. As a model for Indonesia and ASEAN, Banyuwangi’s experience highlights the transformative potential of empowering communities to lead in achieving environmental security and resilience across the region.

Banyuwangi’s experience in addressing climate change and its associated challenges underscores the critical need for integrated environmental and security policies in Indonesia and the broader ASEAN region. Rising sea levels, coastal erosion, and biodiversity loss threaten not only the ecological and socio-economic stability of local communities but also regional security. Banyuwangi’s approach demonstrates that effective adaptation requires a combination of local innovation, government leadership, and multi-sectoral collaboration. By prioritizing ecosystem restoration, community empowerment, and sustainable development, Banyuwangi has set an example for managing climate risks while enhancing resilience. This

experience highlights the interconnectedness of environmental sustainability and security, emphasizing the urgency of addressing these issues holistically to protect both local livelihoods and regional stability.

References

- Abdurrahman, H. A., Erwanto, Z., & Fauqho, N. (2020). Pengembangan SEGAR (Sea Garden) dengan Teknologi Puzzle Tetrapod Berbasis Konservasi Ekowisata di Pesisir Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(4), 482–488. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v11i4.4307>
- Ali, S., & Shah, N. (2023). ENVIRONMENTAL DEGRADATION: A HUMAN SECURITY CONUNDRUM FOR PAKISTAN. *Strategic Thought*, 5(1), 97–114.
- Apriani, D., Sari, A., & Muslimah, S. (2014). KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL. *Yustisia*, 03(03). <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29548>
- Badjeck, M.-C., Allison, E. H., Halls, A. S., & Dulvy, N. K. (2010). Impacts of climate variability and change on fishery-based livelihoods. *Marine Policy*, 34(3), 375–383. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.08.007>
- Boas, I. (2015). Climate Migration and Security_Securitisation as a Strategy in Climate Change Politics (Environmental Politics). In *Routledge*.
- Boyer, M. A., & Oculi, N. (2019). Securitizing the Environment: Climate Change as First-Order Threat. In B. M.J (Ed.), *Securitization Revisited: Contemporary Applications and Insights* (pp. 116–142). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429054648-8>
- Dawson, R. J., Khan, M. S. A., Gornitz, V., Lemos, M. F., Atkinson, L., Pullen, J., Osorio, J. C., & Usher, L. (2018). Urban Areas in Coastal Zones. In *Climate Change and Cities: Second Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network* (pp. 319–362). Cambridge University Press. https://uccrn.ci.columbia.edu/sites/default/files/content/pubs/ARC3.2-PDF-Chapter-9-Urban-Areas-in-Coastal-Zones-wecompress.com_.pdf
- Erwanto, Z., Holik, A., & Sanjaya, A. W. (2021a). IDENTIFICATION AND PREDICTION OF COASTLINE CHANGES IN BANYUWANGI REGENCY DUE TO CLIMATE CHANGE USING GRASS QGIS. *ASTONJADRO: Jurnal Rekayasa Sipil*, 10(2), 333–345. <https://doi.org/10.32832/astonjadro.v10i2>
- Erwanto, Z., Holik, A., & Sanjaya, A. W. (2021b). IDENTIFICATION AND PREDICTION OF COASTLINE CHANGES IN BANYUWANGI REGENCY DUE TO CLIMATE CHANGE USING GRASS QGIS. *Astonjadro*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.32832/astonjadro.v10i2.5336>
- Fatimah, D. (2014). *STRATEGI MATA PENCAHARIAN RUMAH TANGGA NELAYAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI* [Jember University]. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59982>
- Fujii, T. (2016). *ADB Working Paper Series CLIMATE CHANGE AND VULNERABILITY TO POVERTY: AN EMPIRICAL INVESTIGATION IN RURAL INDONESIA* Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org/publications/climate-change-vulnerability-poverty-indonesia>
- González Levaggi, A. (2023). *Great Power Competition in the Southern Oceans*. Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-36476-1>
- Hidayatullah, M. R. (2024, November 14). *Pertamina Bakal Bangun Pabrik Bioetanol di Banyuwangi, Segini Kapasitasnya*. <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20241114/44/1816039/Pertamina-Bakal-Bangun-Pabrik-Bioetanol-Di-Banyuwangi-Segini-Kapasitasnya>.
- Indonesia's Government. (2021). *Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (Indonesia LTS-LCCR 2050)*.
- Kenzu, N. H. (2023, March 29). East Java's Banyuwangi candidate for Smart Green ASEAN Cities. <https://En.Antaranews.Com/News/277023/East-Java-s-Banyuwangi-Candidate-for-Smart-Green-Asean-Cities>.

- Kumari, S., & Garg, M. C. (2024). Confronting the nexus of climate change. In *Impact of Climate Change on Social and Mental Well-Being* (pp. 29–50). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-23788-1.00003-8>
- Lestari, S. D., Leon, F. M., Riyadi, S., Qodariah, Q., & Putra, A. H. P. K. (2024). Comparison and Implementation of Environmental Law Policies in Handling Climate Change in ASEAN Countries: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Thailand. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(2), 687–700. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14998>
- Manunggal, F. R. (2023, September 27). *Dinding Markas Satpolairud Banyuwangi Tergerus Abrasi Selat Bali*. Radar Banyuwangi.
- Moegni, N., Rizki, A., & Prihantono, G. (2014). ADAPTASI NELAYAN PERIKANAN LAUT TANGKAP DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(2), 182–189.
- Muchamad, A. N., Alam, B. Y. C. S., & Yuningsih, E. T. (2017). HIDROGEOKIMIA AIRTANAH PADA DAERAH PANTAI: STUDI KASUS DATARAN RENDAH KATAK, DESA SUMBER AGUNG, KABUPATEN BANYUWANGI. *Riset Geologi Dan Pertambangan*, 27(1), 39. <https://doi.org/10.14203/risetgeotam2017.v27.442>
- Nagy, S. R. (2024). Chapter 1. Southeast Asia's Indo-Pacific Balance: FOIP and BRI as Hedging Strategies to Secure Strategic Autonomy. In I. Saxena & S. Nagy (Eds.), *Southeast Asia and the Indo-Pacific Construct* (pp. 1–24).
- Oliver-Smith, A. (2009). *Sea Level Rise and the Vulnerability of Coastal Peoples Responding to the Local Challenges of Global Climate Change in the 21 st Century*. https://www.unisdr.org/files/14028_4097.pdf.
- Oppenheimer, M., & Glavovic, B. C. (2022). Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities. In *The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 321–446). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157964.006>
- Peou, S. (2021). Peace and Security in Indo-Pacific Asia: IR Perspectives in Context. In *Peace and Security in Indo-Pacific Asia: IR Perspectives in Context*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003132646>
- Phillips, M. R., & Jones, A. L. (2006). Erosion and tourism infrastructure in the coastal zone: Problems, consequences and management. *Tourism Management*, 27(3), 517–524. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.10.019>
- Prayoga, P. (2022). The Indonesian Political-Economy: Maritime Development in Fisheries and Commerce. In *ASEAN Maritime Security* (pp. 43–63). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2362-3_4
- Regency Official Website. (n.d.). *Geografi: Keadaan Geografi Banyuwangi*. <https://Banyuwangikab.Go.Id/Profil-Daerah/Geografi>.
- Rejekiingrum, P. (2014). Dampak Perubahan Iklim terhadap Sumberdaya Air: Identifikasi, Simulasi, dan Rencana Aksi Impact of Climate Change on Water Resources: Identification, Simulation, and Action Plan. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 8(1), 1–15. <http://go.worldbank.org/0F7PS203T0>
- Rimawati, E. (2024, August 14). *Banyuwangi Bakal Punya Sumber Energi Listrik Panas Bumi Desember Nanti*. <https://www.Detik.Com/Jatim/Bisnis/d-7488614/Banyuwangi-Bakal-Punya-Sumber-Energi-Listrik-Panas-Bumi-Desember-Nanti>.
- Rinanda, H. (2024, July 26). *Ribuan Mangrove Ditanam Peringati Hari Lingkungan Hidup*. <https://www.Detik.Com/Jatim/Berita/d-7458315/Pt-Bsi-Tanam-Ribuan-Mangrove-Peringati-Hari-Lingkungan-Hidup>.
- Saksono, R. B. (2024, December 18). Air Laut Pasang Naik, Hujan Turun Setiap Hari, Begini yang Terjadi di Muara Kalilo Sekitar Pantai Boom Banyuwangi. <https://Radarbanyuwangi.Jawapos.Com/Berita-Daerah/755433870/Air-Laut-Pasang-Naik-Hujan-Turun-Setiap-Hari-Begini-Yang-Terjadi-Di-Muara-Kalilo-Sekitar-Pantai-Boom-Banyuwangi>.
- Sato, S. (2024). Impact of Climate-Induced Displacement on Livelihoods in Coastal

- Regions of South Asia: A Study of India and Pakistan. In *Advance*. <https://doi.org/10.22541/au.173016225.58783760/v1>
- Secretariat, A. (2006). *Third ASEAN state of the environment report 2006 : executive summary*. ASEAN Secretariat. <https://www.unep.org/resources/report/third-asean-state-environment-report>
- Setiawan, I., Rianto, B., & Sudirman. (2022). IMPLEMENTATION OF COASTAL AREA MANAGEMENT POLICY BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BANYUWANGI REGENCY. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 4(2), 35–50. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v4i2.311>
- Trégarot, E., D’Olivo, J. P., Botelho, A. Z., Cabrito, A., Cardoso, G. O., Casal, G., Cornet, C. C., Cragg, S. M., Degia, A. K., Fredriksen, S., Furlan, E., Heiss, G., Kersting, D. K., Maréchal, J. P., Meesters, E., O’Leary, B. C., Pérez, G., Seijo-Núñez, C., Simide, R., ... de Juan, S. (2024). Effects of climate change on marine coastal ecosystems – A review to guide research and management. In *Biological Conservation* (Vol. 289). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110394>
- Umilia, E., & Mahendra, D. (2022). Identifikasi Faktor Prioritas dan Karakteristik Wisata Pantai Boom Marina Banyuwangi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknik ITS* , 11(3), 113–119.
- Wong, C., Saeedi, N., & Rizk, S. (2020). *UNDP Policy Brief-The Climate Security Nexus and the Prevention of Violent Extremism: Working at the Intersection of Major Development Challenges*.
- Yokoyama, A., Matsuyuki, M., Antokida, Y., Fitritia, I. S., Tanaka, S., & Ariyoshi, R. (2023). Assessing the impacts of climate-induced resettlement on livelihood vulnerability: A case study in Jakarta Special Province, Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 96, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103946>
- Zulianto, M., Puji, R. P. N., Zaini, Wiyoko, T., & Sholeh, B. (2020). Sustainable tourism in Bangsring Underwater Banyuwangi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 485(1), 012046. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012046>

THE CHILD-FRIENDLY CITIES INITIATIVE PROGRAM: INDONESIA-UNICEF COOPERATION IN PROMOTING THE FULFILLMENT OF CHILDREN'S PARTICIPATION RIGHTS IN THE DEVELOPMENT PROCESS IN SURABAYA

Muhammad Fajhriyadi Hastira, Ali Maksum

International Relations Master Program, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183 Indonesia
E-mail: Muhammadfajhriyadi@gmail.com

Accepted: 24 Desember 2024; Revised: 17 Januari 2025; Approved: 30 Januari 2025

Abstract

The Child-Friendly City Initiative program has contributed to encouraging the fulfillment of children's participation rights in the development process in Surabaya City. Using a descriptive qualitative method with a literature study of journal articles, reports, news, and official documents from the Ministry of Women Empowerment and Children Protection of Indonesia, P3APKB Office of Surabaya City, Surabaya City Children's Forum, Surabaya City Child-Friendly City Task Force Team, UNICEF Indonesia and interviews with the Surabaya City Children's Forum Management via zoom. This research found that the fulfillment of children's participation rights in Surabaya has met the standards of Robert Hart's Child Participation Ladder and Lundy's Child Participation Model after the World Child-Friendly City predicate in Surabaya. Secondly, Surabaya has also obtained the Main Level Child-Friendly City (CFC) title through children's involvement in the Development Planning Conference and support for the Children's Forum. Finally, through the CFCI program, the Surabaya Government significantly ensures that children's right to participation in local development is realized through various initiatives, although there are negative contributions that the Surabaya Children's Forum also experiences. This research uses thematic analysis to fill in the gaps in the contribution of the Child-Friendly City Initiative program, especially in fulfilling children's participation rights in development in Indonesia.

Keywords: CFCI, Child Participation Rights, CFC, Surabaya, UNICEF

Introduction

Safe and child-friendly spaces refer to physical, social, and emotional environments that support children's optimal development and protect them from all forms of harm. The concept of child security is closely related to the idea of human security, which emphasizes the protection of individuals from direct threats to their well-being, including threats to safety, freedom, and survival (Öztürk, 2024; United Nations Development Programme, 1994; van der Haer & Brown, 2024). In the context of child issues, this approach includes physical, psychological, and social protection for children, especially in conflict, disaster, or economic instability.

This concept is integral to the broader study of Human Security in international relations, emphasizing protecting and fulfilling children's rights in a secure, nurturing environment conducive to their growth (UNICEF, 2018). From a human security perspective, this approach encompasses physical protection from violence, exploitation, and discrimination and the empowerment of children through the right to meaningful participation in decision-making processes (Lustitiani & Ajisuksmo, 2022).

The fulfillment of children's rights, especially the right to participate in the decision-making process, is an essential barometer in ensuring that the child-friendly concept can

work. This is not only a moral responsibility but also a legal obligation mandated through the Convention on the Rights of the Child, which almost all countries in the world have ratified. The right to participation allows children to actively voice their interests, especially in the development process, thus creating an inclusive, safe, and friendly environment for them. In the context of human security, children's participation rights strengthen the protection and empowerment dimensions, which are essential elements in ensuring children's welfare and mitigating the risk of exploitation and violence. By positioning children as development actors, as shown in research related to the ASEAN Children's Forum and the Children's Forum in Indonesia, this strategy strengthens the legitimacy of public policies, ensures the sustainability of development based on the needs of future generations, and creates international norms that are relevant to be applied locally (RI, 2019; Rizki et al., 2015; Silverio, 2016; UNICEF, 2020).

Thus, it is vital to ensure the effective implementation of child-friendly concepts, which requires international cooperation. Through cross-country collaboration, international organizations such as UNICEF have played an essential role in developing policies, providing technical resources, and supporting initiatives such as the Child-Friendly Cities Initiative (Sitepu, 2023; UNICEF, 2018). This underscores the importance of international actors' involvement in addressing this issue, which transcends local boundaries and has attained global significance in the context of the Convention on the Rights of the Child. The overarching objective of the Convention is to ensure that children are in spaces that are conducive to their well-being and development.

According to UNICEF (2018), child-friendly spaces are places where children's rights are fulfilled, including the right to play, learn, and interact positively without the threat of violence, discrimination, or exploitation. On the other hand, Chawla (2002) emphasizes that child-safe spaces include physical elements, such as accessibility, structural safety, and risk reduction, and psychological

elements, such as an inclusive atmosphere that values children's participation in decision-making. Bronfenbrenner (1979), through his developmental ecology theory, underlines the importance of positive interactions between children and their environment, emphasizing that child-friendly spaces should enable supportive relationships between children and their families, schools, and communities (Cochran, 2007; Nallari, 2011; UNICEF, 2018).

The difference between these views lies in their focus, with UNICEF providing a rights and policy approach, Chawla emphasizing design and participation elements, and Bronfenbrenner focusing on relational dynamics within the child's ecological system. Despite their differences, these views complement each other, creating a holistic perspective that safe and child-friendly spaces should fulfill their physical, psychological, social, and human rights needs.

Therefore, the establishment of safe spaces free from violence and the facilitation of appropriate participation by children according to their age and maturity level are of paramount importance. Indonesia has endeavored to uphold this concept as a moral obligation and responsibility of the nation that has ratified the Convention on the Rights of the Child (CRC) on September 5, 1990, through Presidential Decree Number 36 of 1990. The government of Indonesia has demonstrated a commitment to protecting the rights of children by implementing various programs under the Indonesian Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. One such program is the Child-Friendly City, which aims to create a safe and friendly environment for children in accordance with the principles of the CRC (DPR, 1985; Nurusshobah, 2019; Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989).

In addition to implementing the Child-Friendly City program, one form of the Government of Indonesia's efforts in the Convention on The Rights of the Child (CRC) implementation process is cooperation with UNICEF in encouraging the fulfillment of children's participation rights, which is very

important, especially in the context of inclusive and sustainable development. One of the main initiatives in this collaboration is the Child-Friendly Cities Initiative (CFCI) (Lustitiani & Ajisuksmo, 2022; Sitepu, 2023; UNICEF, 2021).

It is a program launched by UNICEF in 1996 that focuses on empowering local governments to support and protect children's rights in urban environments. CFCI builds on the principles of the CRC by promoting environments where children's voices, needs, and rights are integral to urban planning and governance. The program emphasizes the importance of creating urban spaces that support children's well-being, including safe spaces for play, quality health care, access to education, and participation in civic life, including integrating children's rights into public policy and urban design (Alias et al., 2023; Cordero Vinueza et al., 2023).

The CFCI framework focuses on five key objectives to establish child-friendly governance: (1) ensuring children are valued and respected, (2) promoting their right to voice and participate in public decision-making, (3) providing access to essential services, (4) creating a safe and clean environment, and (5) encouraging opportunities for play and family life (Roche, 1999; UNICEF, 2018, 2022).

Geographically, CFCI has snowballed and is now present in more than 38 countries, reaching up to 30 million children in cities such as London and Barcelona, and even in 2024, Surabaya as one of the major cities in Indonesia has been recognized by UNICEF as a CFCI (UNICEF, 2018).

Surabaya was first awarded as a Child-Friendly City in 2011. Since Mayor Tri Rismaharini's leadership began, Surabaya introduced various programs, such as issuing local regulation number 6 in 2016 on child protection, construction of playgrounds and libraries, and Public Order Police (Satpol PP) services to keep children safe at night. This effort continues until today; the Surabaya government has had various initiatives such as the construction of Rumah Anak Prestasi, a child-friendly information center, providing

opportunities for children to be directly involved in public forums such as Development Planning Conference/musrenbang at the village, sub-district, and city levels which causes their voices to be more accommodated in the city's development process. This commitment is also evidenced by Surabaya City having won the Main Child-Friendly City Award eight times in a row from the Ministry of Women Empowerment and Children Protection of Indonesia (Ajeng et al., 2024; Arindi & Hidayat, 2024).

Research related to the CFCI program in Indonesia has not been widely researched. It shows through Scopus and Google Scholar through the Publish or Perish application that study with the keyword "The AND Child AND Friendly AND City AND Initiative AND in AND Indonesia" with a range of years 2019-2024 found 15 suitable articles. There is not even a publication with the keywords "The Right of Child Participation in the Development Process in Surabaya through the Child-Friendly Cities Initiative Program."

However, research related to the implementation of child-friendly cities in several regions has been conducted and has been published; the author found through the Publish or Perish application that there are five articles and one thesis. All previous studies have examined various aspects of child-friendly policies. However, these publications have not addressed the CFCI program and mostly focus on policy evaluation, implementation strategies, or general child protection issues without directly addressing mechanisms that enable children's active participation in governance (Alviana et al., 2021; Arindi & Hidayat, 2024; Jannah et al., 2022; Mahendra, 2019; Nurhayati et al., 2018; Sitepu, 2023).

For instance, Mahendra and Sujanto (2019) evaluate the 2016-2018 Yogyakarta City CFC policy emphasized policy outcomes rather than children's participatory dynamics. In a similar vein, Arindi and Hidayat (2024) research on the optimization of the *PUSPAGA* program in Surabaya centered on institutional support mechanisms. However, it did not delve into children's lived experiences and involvement

in governance processes. Furthermore, research such as Alviana et al. (2021) explore the role of *Forum Anak Banyumas* in realizing a child-friendly district frames participation within the lens of multi-stakeholder partnerships but does not have a specific focus on how children's voices influence actual decision-making.

Other studies, such as Nurhayati et al. (2018) analysed CFC policy in Makassar and Jannah et al. (2022) conduct study in Palembang, examine broader policy frameworks, leaving gaps in understanding the operationalization of children's participation rights. While these works highlight the importance of child-friendly policies, they often treat participation as an abstract principle rather than a tangible process that influences governance. Hanifan Sitepu (2023) focuses on UNICEF's role in addressing child marriage through CFCI, provides valuable insights into the broader contributions of this initiative. However, the national scope of the study and its focus on specific social issues limit its overall comprehensiveness.

Thus, this research offers a new perspective on the implementation of the CFCI program in Surabaya, with a particular focus on its role in promoting children's participation rights in the development process. Furthermore, this research uniquely examines how CFCI, as a UNICEF-Indonesia program, directly facilitates children's meaningful participation in governance at the city level. Conversely, this research endeavors to explore the contribution of CFCI as a UNICEF-Indonesia cooperative program in promoting the realization of children's participation rights in the developmental process, particularly in the context of Surabaya, spanning from 2015 to 2023.

Based on this description, this research focuses on analyzing more deeply the form of Indonesia-UNICEF cooperation through CFCI in Surabaya and the contribution of CFCI in encouraging the fulfillment of children's participation rights in development in Surabaya City. The research question is "How does the CFCI Program Contribute to Encouraging the

Fulfillment of Children's Participation Rights in Development in Surabaya?." Therefore, the subsequent sections examine the theory of international cooperation and children's participation.

Theoretical Framework

International Cooperation

The theory of international cooperation in international relations is a theory that explains how international relations actors work together based on principles, norms, rules, and decision-making procedures that are in accordance with the expectations of actors. International cooperation is defined by Robert Keohane, who says *that cooperation occurs when actors (states or non-state actors) adjust their behavior to the actual and anticipated preferences of others through policy coordination* (Keohane, 2020). International cooperation started with the assumption that states are the main actors in collaboration, but today, cooperation occurs not only between individuals but also between collective entities, such as companies, political parties, ethnic organizations, terrorist groups, and nation-states. Recently, research has involved other actors, such as intergovernmental or intergovernmental organizations (IGOs) and non-governmental organizations (NGOs), which have been included in this analysis (Dai et al., 2010).

According to K.J Holsti, international cooperation is the process by which states or other global actors work together to achieve common goals or solve common problems (Holsti; 1995). It can involve various forms of collaboration, negotiation, and coordination among sovereign entities, often within the framework of international institutions or treaties. International cooperation can occur across multiple issues, including security, economics, environment, and human rights, and can occur at the bilateral, regional, or global level. Holsti also argues that international cooperation can materialize due to the following:

- a. The view of two or more interests, this indicator will look at the extent to which cooperation can accommodate the interests of the countries and international organizations involved,
- b. The views or expectations of a country, where this indicator will look at cooperation in meeting the expectations and goals expected by the countries involved,
- c. Agreement on specific issues: this indicator will measure the effectiveness of cooperation in resolving or addressing particular issues that are the focus of collaboration,
- d. Official or unofficial rules, where this indicator will assess the clarity and effectiveness of the regulations or mechanisms agreed upon in cooperation, both formal and informal, and transactions between actors, this indicator will measure the intensity and quality of interactions and resource exchanges between states and international organizations within the framework of cooperation (Holsti, 1995; Little & Smith, 2005).

International cooperation is carried out not only between countries individually but also between countries under international organizations or institutions. One form of global collaboration is manifested through one of the international organizations, UNICEF, which plays an essential role in implementing the principles by supporting the Convention on the Rights of the Child and fostering cooperation between countries to protect children's rights and ensure their welfare. Through various program initiatives and participation in a global network, UNICEF contributes to a more coordinated and effective response to international issues affecting children.

The success of international cooperation is often measured by the ability of countries to address these strategic issues and achieve mutually beneficial outcomes, which can be reflected in the effectiveness of international

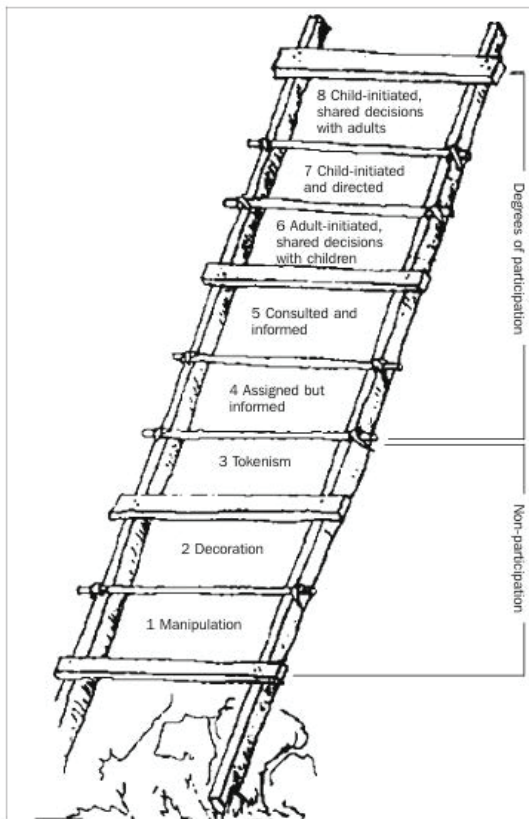
institutions and the stability of the global system. In the context of the CFCI program, success indicators may include metrics that assess the effectiveness of international cooperation in achieving the goal of Surabaya becoming a World Level Child-Friendly City, (a) ensuring children are valued and respected through involvement in child participation platforms, (b) promoting their right to voice opinions and participate in public decision-making as assessed through children's involvement in Public Policy Forums (Regional Development Planning Conference/ *Musrenbang*) (c) providing access to essential services as evidenced by programs and policies that are born from children's suggestions (d) creating a safe and clean environment as evidenced by child-friendly infrastructure and environment and (e) encouraging opportunities for play and family life with indicators on the availability of child-friendly play spaces and family life preparation programs for children and adolescents. These five metrics constitute the framework in UNICEF's CFCI.

Child Participation

Participation is a spontaneous involvement accompanied by awareness and responsibility for the group's interests for the common good, such as actively socializing, making decisions, or implementing development projects. Furthermore, participation is often associated with mutually beneficial conditions for the two interacting parties and a person's full involvement in society and himself in various activities (Sari et al., 2024). One form of participation that exists in society is child participation.

Furthermore, children's participation is also defined by Hart as the process of children's involvement in decision-making, which is very broad, so Hart (1997) developed a participation ladder policy, each level of which has its indicators (Thoomaszen, 2017). The ladder of participation can be described as follows:

Figure 1: Child Participation Ladder



Source: (Hart, 2008; Thoomaszen, 2017)

In addition, children's participation is also described by Lundy (2007) as a model of participation that translates from Article 12 of the Convention on the Rights of the Child by developing four dimensions that need to be considered in implementing meaningful children's participation, including 1) Space is a mechanism or platform that children can use to express their views in a child-friendly manner. 2) Voice is a mechanism or platform that children can use to express their views in a child-friendly manner. 3) Audience is a dialog with parties who must listen to and consider the views/voices of children. 4). Influence is children's views that must be taken seriously and acted upon. The highest level of child participation is in the collaboration of actions taken by children and adults (duty bearers) for specific purposes with the needs expressed by children. This model also emphasizes that one of the crucial principles in children's participation is the availability of procedures for involving children in influencing decisions and feedback mechanisms to children regarding the decision-

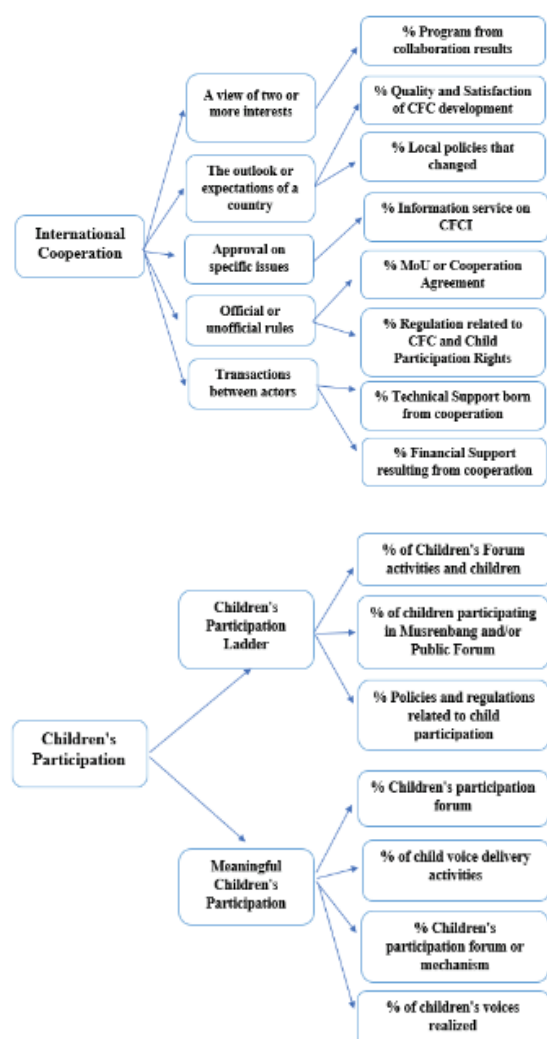
making process related to the fulfillment of their rights (Solin & Ruwaida, 2022).

The definition of children's participation is also contained in the Regulation of the Minister of Women Empowerment and Child Protection of Indonesia Number 1 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Women Empowerment and Child Protection of Indonesia Number 18 of 2019 concerning the Implementation of Children's Forums, which defines children's participation as the participation of children or groups of children to express their views according to human dignity about everything related to them and carries out with the awareness, understanding, and willingness of children so that children can enjoy the results or benefit from their participation. Children's participation has criteria contained in the guidelines for children's participation in the development process, namely being an Indonesian citizen, being at least 12 (twelve) years old and at most before 18 (eighteen) years old, being able to communicate well, being able to submit proposals for children's aspirations, representing a child participation forum in the area where the child is located, including a statement of willingness to be involved in the development process (*informed consent*), getting permission from parents/guardians by including a letter of authorization, and must be accompanied by facilitators and assistants.

Therefore, through the various definitions above, the researcher decided to take the definition in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which was then combined with the criteria listed in the Guidelines for Children's Participation in the Development Process issued by the Ministry of Women Empowerment and Children Protection of Indonesia. In addition, Hart's ladder of participation is used to see how far the fulfillment of participation rights has been implemented in Surabaya by involving the contribution of the CFCI program. Furthermore, the Lundy model will also be used to see whether the CFCI program contributes to fulfilling children's participation rights, especially in the development process in Surabaya City.

These two conceptual frameworks can be seen in the following operational definitions:

Figure 2. Operational Definition



Source: Processed by Researcher, 2025

Research Method

The research method used in this research is the descriptive qualitative method by collecting literature data from books, scientific journals, news articles, and official documents of government agencies of the Ministry of Women Empowerment and Children Protection of Indonesia, P3APKB Office of Surabaya City, Surabaya City Children's Forum, Surabaya City Child-Friendly City Task Force Team, to UNICEF Indonesia and others and relevant reports. Then, researchers collected empirical data through interviews with the Surabaya City

Children's Forum to deepen information and help researchers answer research questions using the Zoom platform. The type of interview was semi-structured; some questions were predetermined, but others were not planned (Adi Bhat, 2023). This allows the researcher to explore the topic in depth while still having guiding questions (Adams, 2015; DeJonckheere & Vaughn, 2019; Kallio et al., 2016).

Results and Discussion

1. CFCI program as a form of UNICEF-Indonesia cooperation

One form of international cooperation that can be seen in relation to efforts to fulfill children's rights and protect children at the local level is the Indonesia-UNICEF cooperation in the CFCI program. The Child-Friendly Cities Initiative (CFCI) program is a global initiative led by UNICEF to assist local governments in realizing children's rights at the regional level regarding the Convention on the Rights of the Child.

In Indonesia, the program was officially launched in Surabaya City on 14 November 2023 through the signing of an Annual Work Plan (RKT) between the Surabaya City Government, UNICEF Indonesia, and the National Development Planning Agency/ *Bappenas* (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2023; Yunani, 2023).

In general, the program has five focus areas that are implemented in Surabaya as a World Child-Friendly City, namely a) Improving the quality of health and education services, b) Strengthening children's participation in development planning and supervision, c) Improving coordination capacity between government and community, d) Public awareness of children's rights, e) Collecting and utilizing data related to the situation of children in Surabaya (Faiq, 2015; Pemerintah Kota Surabaya, 2023).

The collaboration process between UNICEF and Indonesia in the *Child-Friendly Cities Initiative (CFCI)* program involves several strategic steps to support local governments, especially Surabaya City, in realizing children's

rights. This mechanism began with developing a *Memorandum of Understanding (MoU)* as part of the collaboration process to establish the terms and criteria for the collaboration, which included clear objectives, indicators of success, and evaluation mechanisms (UNICEF, 2018).

Then, UNICEF provided technical assistance to the Surabaya City government in implementing the CFCI program, which included analyzing the situation of children's rights, developing *baseline* data, and conducting program monitoring and evaluation. Furthermore, UNICEF also encouraged the active participation of children in the development planning deliberation (*Musrenbang*) and involved various stakeholders, including the private sector, universities, civil society organizations, and the media, in this collaborative process (Elaine, 2023, 2024a, 2024b).

The forms of cooperation between UNICEF-Indonesia, especially the Surabaya Government in relation to CFCI that have been carried out are as follows:

- a. Signing of Annual Work Plan (RKT)
On 14 November 2023, the Surabaya City Government, UNICEF Indonesia and the National Development Planning Agency (*Bappenas*) signed the Annual Work Plan (RKT) for the CFCI program. This is the first step in implementing this initiative, which aims to support Surabaya as a child-friendly city. The RKT focuses on five priority areas: improving health and education services and strengthening children's participation in development planning and monitoring (Yunani, 2023).
- b. UNICEF CFCI Team Visit
A delegation from CFCI UNICEF visited Surabaya on 25-26 March 2024 to strengthen the child protection system. The visit was led by Ms. Shema Sen Gupta, Director of UNICEF's Child Protection Section. The team interacted with various stakeholders, including local government and non-governmental organizations, and visited child-friendly public facilities

such as the Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) and Ruang Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) (Pemerintah Kota Surabaya, 2023; Tunas Hijau, 2024).

- c. Interactive Dialogue with Children
During the visit, UNICEF also held an interactive dialog between the UNICEF CFCI team and children from various communities in Surabaya. Children were allowed to express their opinions and ask questions on child protection issues. This provided insights for the UNICEF team and strengthened children's voices as an important part of policymaking (Tunas Hijau, 2024).
- d. Stakeholder Empowerment
UNICEF also collaborates with various stakeholders, including civil society organizations and the private sector, to maximize the efforts to fulfill children's rights. Surabaya City Government is committed to involving various parties in solving children's problems and building sustainable systems for future generations (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2023, 2024).
- e. Training and Capacity Building
UNICEF provides training to local governments and other stakeholders on child-friendly policy implementation. This includes capacity building in child-friendly budget planning and strengthening child protection systems at the local level (Tunas Hijau, 2024; Yunani, 2023).

This cooperation was carried out primarily in Surabaya, where the process of Surabaya's selection as part of CFCI began with the sending of an initiative letter by the Mayor of Surabaya to UNICEF on 13 September 2022 (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2024a). This letter signaled the city government's commitment to developing policies and programs that support children's rights. This recognition results from two years of continuous efforts to meet international standards in protecting and fulfilling children's rights.

After the letter was sent, Surabaya continued to improve by taking various strategic steps, including the development of Child-Friendly Infrastructure by building *Rumah Anak Prestasi (RAP)* in four areas of Surabaya, establishing a Child-Friendly Information Center and 487 Family Learning Centers (*Puspaga*) to support children's education and development, and building two new *daycare* facilities to support childcare (Arindi & Hidayat, 2024).

Then, Surabaya also actively involves children in public forums such as the Development Planning Conference (*Musrenbang*) at the village, sub-district, and city levels, ensuring that their voices are heard; even the Surabaya City Government also involves the Surabaya Children's Forum in the CFCI Forum in China (Redaksi Surabaya Today, 2024). In addition, Surabaya also has an innovative program called *Si TALAS* (Surabaya Child-Friendly City Information System), which is used to provide input and keep abreast of policies affecting these children (Ajeng et al., 2024).

At the policy and institutional level, Surabaya also continues to improve by issuing two new Mayor's Regulations (Perwali) in 2024 regarding the CFC implementation mechanism number 61 of 2024 and special protection for children number 62 of 2024, which previously Surabaya also had local regulations related to child protection and its relation to the Child-Friendly City (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2024; Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pusat Informasi Sahabat Anak, 2023; Wahana Visi Indonesia, 2024). Through various initiatives and policies taken by the Surabaya City Government, Surabaya was recognized on 15 August 2024 as a World Child-Friendly City by UNICEF, marked by a certificate as the first Child-Friendly City in Indonesia to be recognized globally (Ajeng et al., 2024; Elaine, 2024a, 2024b).

Therefore, the cooperation between Indonesia, in this case Surabaya-UNICEF, can be said to be successful in encouraging the fulfillment of children's participation rights in the development process in Surabaya. The success of international cooperation can be

measured by the ability of countries to address these strategic issues and achieve mutually beneficial results, which can be reflected in the effectiveness of international institutions and the stability of the international system. In the context of the CFCI program, indicators of success can include metrics that assess the effectiveness of international cooperation in achieving the goal of Surabaya becoming a World Level Child-Friendly City. The five metrics are the framework in CFCI by UNICEF, which can be seen through previous forms of cooperation.

In line with Holski's opinion, this program can be explained by indicators where there are two or more views of the interests of UNICEF and Surabaya who want to become CFCI through cooperation programs that are born, such as monitoring and evaluation programs carried out by UNICEF on policies to fulfill children's participation rights in Surabaya, increasing the *Rumah Anak Prestasi* program as a forum for the participation of children with special needs, increasing children's involvement through the Children's Forum/other child participation forums, improving the services of the Family Education Center/*Puspaga* and optimizing the Technical Support Unit for the Protection of Women and Children in Surabaya City.

Then, the indicator of views or expectations from Surabaya itself to be part of CFCI has been realized through the coronation, which was held on 15 August 2024. Then, agreement on specific issues; in this aspect, both the Surabaya government and UNICEF agree that children's involvement in Surabaya City needs to be increased into meaningful participation through activities organized by both parties, for example, the involvement of Surabaya children in the CFCI World Level Forum in Beijing, involving children in dialogue between Children and UNICEF, and even asking Surabaya children to be able to compile a voice for the world.

Furthermore, many official regulations related to this program have been issued, starting with signing the MoU related to CFCI and the latest regional and mayoral regulations related to CFCI itself. Finally, indicators of transactions between actors are seen through the

technical support from UNICEF to the Surabaya government and the Surabaya government's budget support for programs organized concerning CFCI.

2. Contribution of the CFCI Program in encouraging the fulfillment of children's participation rights in the development process in Surabaya

The CFCI program that has been running in Surabaya is a significant step in encouraging the fulfillment of children's participation rights in the development process. This is in line with the results of the researcher's interview with the Surabaya Children's Forum Facilitator (2.b), who said that:

"I think it's safe to say that this CFCI has opened up a world of possibilities for children's friends, especially. It's also had a positive impact on the children's forum friends. Before this, we were pretty limited in Surabaya. I'd say that the people there were quite conservative. They didn't want to listen to children, and they didn't want to understand how. CFC actually was, so they are only limited to, yes, it's our administration, but if, for example, in the field, I feel that it has not fully passed and it is still below. But when there is CFCI, and there is much better monitoring, because maybe UNICEF is intense every week asking what it is like, and then the children also finally feel that Surabaya has a big commitment."¹

This interview shows that CFCI has become a driving force in ensuring that Surabaya City fulfills children's rights, especially involving children in the development process. Thus, it can be said that Surabaya City has fulfilled children's participation rights in several aspects. It is not just a display; children have been given

¹ The interview was conducted with the Surabaya Children's Forum Facilitator on November 11, 2024 at 20.30-21.15 WIB via Virtual Zoom Meeting.

space to convey their aspirations and be realized by the Surabaya government. As explained earlier, CFCI, which aims to ensure that children are valued, respected, and have the opportunity to participate in decision-making processes that affect their lives based on the Convention on the Rights of the Child (CRC), has contributed to encouraging the fulfillment of children's participation rights in Surabaya.

The process of children's participation in Surabaya has its dynamics. This is because Surabaya City has become a Primary Level Child-Friendly City for 8 consecutive times, but the implementation of children's participation before the CFCI program can be said to be on steps 1-3, which is still manipulation, decoration, and symbolization. Children are often only involved and invited without knowing what they should do, and even when they express their views, they are only listened to without being realized, which is only for administrative purposes of fulfilling the Child-Friendly City indicators.

However, this CFCI Program makes changing views and increasing children's participation more meaningful. Even until the end of 2024, it can be concluded that children in Surabaya City can be at the highest level of the child participation ladder, namely the child's initiative and the gods follow. This level means that every activity that involves children comes from children and is supported by adults who certainly help the process of these activities.

This is in line with the views of the Surabaya City Children's Forum facilitator (2.b), who said:

"If we look at it from before and after CFCI, I'd say yes because when I was on the board, there was still no CFCI. When it was finished, CFCI came in. When I first became a board member at the beginning of 2022, I felt that children's participation in Surabaya was still not there. It seemed like the Children's Forum was just a display, and so on. Even though Surabaya's CFC had become the main CFC, it

hadn't become a full CFC. It was still a big question mark. Now, if I look at it, I think the participation of children in Surabaya in 2020 and 2021 wasn't particularly meaningful because there was still nothing from the Village Children's Forum or the Sub-District Children's Forum."²

This interview shows that the presence of CFCI can change the process of children's participation in Surabaya much more meaningfully and can involve children even more through the Children's Forum. This involvement involves children in the government's development process or activities and supports every program and activity carried out by the Surabaya Children's Forum. For example, what happened in Surabaya in 2023-2024, the management of the Surabaya Children's Forum has carried out various activities supported by the Surabaya City Government, for example, the Surabaya Children's Congress conducted by Surabaya City Children to convey aspirations and compile children's voices that will be submitted to the Surabaya government. Then, every month, the Surabaya City Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning encourages the Surabaya Children's Forum to be able to carry out activities with assistance from the agency.

The involvement of children and the Surabaya government's support for the Forum Anak Surabaya was expressed by the Chairperson of Forum Anak Surabaya (2.a), namely:

"In Surabaya, children's participation in development planning is well-established, supported by the local government through initiatives like the Children's Development Planning Conference (*Musrenbang Anak*). It allows children to collaborate and present their perspectives. The Forum Anak Surabaya also

² The interview was conducted with the Surabaya Children's Forum Facilitator on November 11, 2024 at 20.30-21.15 WIB via Virtual Zoom Meeting.

organizes the Children's Congress, a platform created by and for children, demonstrating their commitment to shaping the city's future. To gather input, the "Tali Aspirasi" division collects feedback through programs like *Gemakan Harapan*, utilizing tools like surveys and aspiration baskets placed across the city. These inputs are compiled and presented directly to city officials, including the Mayor, ensuring children's voices are integrated into policy discussions. This collaboration highlights Surabaya's progressive approach to fostering meaningful child participation in governance."³

This interview shows that the Surabaya Government has fully supported children and the Surabaya Children's Forum through related agencies after the CFCI program. Although it is not denied that the involvement of children and support for the Surabaya Children's Forum had also been provided before CFCI, it was not optimal.

In addition, children's participation is also described by Lundy (2007) that if analyzed in Surabaya government policies, it can be said that before the CFCI program, the four dimensions were not implemented optimally; for example, children's participation in Surabaya is often symbolic and limited to administrative activities such as *Development Planning Conference/musrenbang*, where children are often only formally invited without real influence on the policies taken. Children's Forums are also not yet active at the sub-district and neighborhood levels, and there are few dedicated facilities to support their involvement.

Meanwhile, the fulfillment of children's rights, especially the right to children's participation in the development process in Surabaya, has changed dramatically and can be said to be the impact of the existence of this CFCI program. If analyzed using the same

³ The interview was conducted with the Chairperson of the Surabaya Children's Forum on November 12, 2024 at 18.30-19.30 WIB via Virtual Zoom Meeting.

theoretical framework, namely the Meaningful Child Participation Model by Lundy, it can be concluded that the implementation of CFCI in Surabaya has an impact by making children's participation more meaningful. After this program, the government began to provide a broader and more conducive **space** for children, such as the construction of *Rumah Anak Prestasi (RAP)* and *Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)*, which became a place for them to do activities.

The Voice dimension is implemented through government support for children's forum activities that allow children to voice their aspirations in a structured way, such as the Surabaya Children's Congress and special forums to communicate children's voices to the world. In the **Audience** dimension, UNICEF's involvement as an international partner encourages the government to take children's aspirations more seriously through technical support and specialized facilities that facilitate effective feedback.

Finally, regarding **Influence**, children's participation in *Development Planning Conference/musrenbang* is not only ceremonial; they also have the opportunity to express their aspirations directly, which are often responded to by policymakers at local and international levels. In line with what was described by the Surabaya Children's Forum Facilitator (2.b), who explained:

"In 2023, Surabaya made significant progress in promoting meaningful children's participation, especially after the implementation of the Child-Friendly City Initiative (CFCI). The Development Planning Conference (*Musrenbang*) officially invited the Children's Forum, enabling them to express their aspirations and perspectives directly. The government facilitated the collection of children's voices, ensuring proper documentation and follow-through. The Children's Forum's involvement expanded to sub-district levels, supported by formal decrees issued in 2022-2023. Previously, adult representatives

often dominated these forums, but CFCI brought reforms, emphasizing genuine child representation. Notably, on Children's Day, the forum's chair presented the children's voices directly to the Mayor, reflecting a shift towards inclusive governance. This progress underscores the CFCI's transformative impact on children's participation in Surabaya."⁴

Through this interview with the Surabaya Children's Forum Facilitator, it can be concluded that the CFCI program in Surabaya has brought significant changes in children's participation that are more meaningful according to Lundy's concept, emphasizing space, voice, audience, and Influence. The children's forum began to be officially invited to the *Development Planning Conference/musrenbang*, given space to express their aspirations, and facilitated by the agency in collecting children's voices escorted to the minutes' stage. Children also presented their voices directly to the Mayor on Children's Day, reflecting the government's attention to children's views. The decrees of children's forums at the ward and sub-district levels were updated to ensure age-appropriate membership, with assistance from Forum Anak Surabaya, thus strengthening meaningful and inclusive participation.

Therefore, the *Child-Friendly Cities Initiative* (CFCI) program opens wider access for children in Surabaya to participate actively in city development, transforming their involvement from a mere formality to a meaningful process. However, the presence of CFCI also presents challenges and negative impacts for the children involved.

The first challenge is the capacity and understanding of the Surabaya city government to communicate with children. Surabaya city government often still needs more practical training to be able to interact with children comfortably and productively. In addition, while CFCI provides more significant space for

⁴ The interview was conducted with the Surabaya Children's Forum Facilitator on November 11, 2024 at 20.30-21.15 WIB via Virtual Zoom Meeting.

children to voice their views, better coordination is needed so that children's engagement does not clash with school time, thus not disrupting their education.

The second challenge is related to the community's low understanding of the importance of the CFCI program. Although Surabaya has been recognized as a child-friendly city globally, awareness of the essence of the program is still limited among the community. This impacts children's participation at the newly activated sub-district and village levels, where most children's forums still require assistance to operate effectively and sustainably.

Another challenge is the need for a more structured system to manage children's participation. Children's forums are often invited to government activities. However, there is no sustainable method or system to support their regular involvement, which in turn creates an excessive burden of participation on children, especially considering the high target of meeting UNICEF's child-friendly city indicators. This overall challenge was expressed by the Surabaya City Children's Forum Facilitator (2.b), who revealed that:

“The Child-Friendly City Initiative (CFCI) in Surabaya comes with its own set of challenges, especially when it comes to balancing children's involvement and their education. Sometimes, the demands of CFCI activities clash with school schedules, making it hard for children to participate fully. There's also some confusion because the program's targets can overlap, and it's not always clear how to prioritize them. While CFCI has helped change mindsets and establish Surabaya as a global child-friendly city, not everyone fully understands its purpose. Moving forward, it's important for the government and community to work together to improve the system.”⁵

⁵ The interview was conducted with the Surabaya Children's Forum Facilitator on November 11, 2024 at 20.30-21.15 WIB via Virtual Zoom Meeting.

On a personal level, children also face academic pressures due to their involvement in CFCI. The program demands active participation in various activities and meetings, often held on short notice or during school hours. This makes it difficult for child forum members, especially those still in school, to manage their time between academic obligations and CFCI participation, negatively impacting their academic grades and educational attainment.

In addition, limited coordination with the city government often creates inconvenience. The government usually invites children's forums on the spur of the moment for activities that appear to fulfill the needs of Child-Friendly City (CFC) documentation without considering the welfare of the children involved.

This creates pressure and fatigue for children, who feel that although CFCI has positive goals, excessive involvement in these activities can disrupt the balance between their personal lives, academics, and organizational activities. Finally, children perceived a lack of effective communication between relevant agencies and the children's forum, which suggests that the government needs to understand how to interact better to create a comfortable and practical participation environment. This is in line with the results of interviews with the Chairperson of Surabaya Children's Forum (2.a) and Facilitator of Surabaya Children's Forum (2.b), who said that the challenge in the CFCI program is the *academic pressure* that often collides with sudden official activities, such as meeting invitations in the middle of a busy school schedule or when there are exams. This makes children's forum administrators have to get permission from school, accumulate assignments, and affect grades. Students and administrators face a dilemma between academic priorities and organizational responsibilities, especially since many have grand ambitions.⁶

Thus, if analyzed using the ladder of participation, these challenges, if left unaddressed, then children's involvement, which should have been meaningful and

⁶ The interview was conducted with the Chairperson of the Surabaya Children's Forum on November 12, 2024 at 18.30-19.30 WIB via Virtual Zoom Meeting.

at levels 6-8 of Hart's ladder of children's participation, will return to a much lower ladder. This is unfortunate because Surabaya City has provided and fulfilled the rights of children who are not members of the Children's Forum but ignores the rights of children who are in it. Thus, an appropriate mechanism is needed to overcome this.

Conclusion

This research concludes three crucial things, namely, first, that the presence of the CFCI program helps the process of fulfilling children's participation rights in Surabaya City, which previously when analyzed using Robert Hart's Child Participation Ladder standard and Lundy's Child Participation Model was not sufficient to be considered as meaningful participation. However, after the efforts of Surabaya City to become part of CFCI, accompanied by monitoring programs and other programs in an attempt to encourage the Surabaya government to be able to meet all indicators of children's participation in the development process, making the Fulfillment of Children's Participation Rights in the Development Process in Surabaya City has met the standards of Hart's ladder of child participation which can be seen that various policies and efforts are on the 6th-8th rungs. Also, it has fulfilled the indicators of Lundy's model of meaningful child participation.

Then, this cooperation process through the CFCI program encourages strengthening the Children Forum of Surabaya's capacity, which is the main barometer in fulfilling children's participation rights. Although it cannot be denied, through this research, it

was found that there are challenges faced by the Surabaya Children's Forum, which are also children who need to have their rights fulfilled.

Finally, this study concludes that the CFCI program, which emphasizes the importance of children's active involvement in decision-making in the city, has contributed significantly and positively to the fulfillment of children's participation rights in Surabaya City. The monitoring and evaluation program conducted by UNICEF on policies to fulfill children's participation rights in Surabaya shows some real impact, as follows: *Rumah Anak Prestasi* program provide a forum for the participation of children with special needs, the Children's Forum/other children's participation forums are increasing children's involvement, and the Family Education Center/*Puspaga* has improved and the Technical Support Unit for the Protection of Women and Children in Surabaya City has been optimized.

Bibliography

- Adams, W. C. (2015). Conducting Semi-Structured Interviews. *Handbook of Practical Program Evaluation: Fourth Edition*, 492–505. <https://doi.org/10.1002/9781119171386.CH19>
- Ajeng, C., Ria, K., & Roisul Basyar, M. (2024). Analisis Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Perspektif Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Surabaya. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(3), 16–26. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1360>
- Alias, A., Mohamad Nasri, N., & Awang, M. M. (2023). A Tracer Study on Child Participation in Child Councillor Programmes Aimed towards Development of the Child Friendly Cities Initiative. *Children*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/children10040732>

- Alviana, I., Rosyadi, S., Simin, S., & Idanati, R. (2021). Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 277–287. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3738>
- Arindi, A. P., & Hidayat, E. (2024). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10267–10278. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I3.8134>
- Cochran, M. (2007). Ecology of Human Development. In U. Bronfenbrenner (Ed.), *Early Childhood Education: An International Encyclopedia* (1st ed., pp. 333–337). Harvard University Press.
- Cordero Vinuesa, V. A., Niekerk, F. (Femke), & van Dijk, T. (Terry). (2023). Making child-friendly cities: A socio-spatial literature review. *Cities*, 137, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104248>
- Dai, X., Snidal, D., & Sampson, M. (2010). International Cooperation Theory and International Institutions. In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>
- DeJonckheere, M., & Vaughn, L. M. (2019). Semistructured interviewing in primary care research: a balance of relationship and rigour. *Family Medicine and Community Health*, 7(2), 57. <https://doi.org/10.1136/FMCH-2018-000057>
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2023, December 15). Pemkot Surabaya, Bappenas dan Unicef Tanda Tangan Rencana Kerja Tahunan Program CFCI. *kominfo.jatimprov.go.id*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemkot-surabaya-bappenas-dan-unicef-tanda-tangani-rencana-kerja-tahunan-program-cfci>
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2024, July 9). Tuntaskan Penyusunan Dua Perwali Perlindungan Anak, Surabaya Siap Jadi KLA Paripurna-Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. *Kominfo.jatimprov.go.id*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/tuntaskan-penyusunan-dua-perwali-perlindungan-anak-surabaya-siap-jadi-kla-paripurna>
- DPR. (1985). Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konversi Tentang Hak Asasi Anak). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999*, 4(1), 1–5. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>
- Elaine, M. (2023, November 14). Unicef Beri PR Surabaya Tangani Kekerasan Dunia Maya Hingga Kesenjangan Ekonomi Usai Masuk Program CFCI. *suarasurabaya.net*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/unicef-beri-pr-surabaya-tangani-kekerasan-dunia-maya-hingga-kesenjangan-ekonomi-usai-masuk-program-cfci/>
- Elaine, M. (2024a, August 15). Surabaya Jadi Anggota CFCI Usai Dapat Sertifikat Kota Layak Anak Internasional. *suarasurabaya.net*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/surabaya-jadi-anggota-cfci-usai-dapat-sertifikat-kota-layak-anak-internasional/>
- Elaine, M. (2024b, September 26). UNICEF Resmi Akui Surabaya Sebagai Kota Layak Anak Dunia. *suarasurabaya.net*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/unicef-resmi-akui-surabaya-sebagai-kota-layak-anak-dunia/>
- Faiq, N. (2015, April 2). Surabaya Menuju Kota Layak Anak. *SuryaOnline*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/04/02/surabaya-menuju-kota-layak-anak-dunia>
- Hart, R. A. (2008). Children's Participation. In M. F. Espinosa, S. Iltus, & R. Lorenzo (Eds.), *Unicef* (4th ed.). UNICEF.
- Holsti, K. J. (1995). *International politics: A framework for analysis*. Prentice Hall.
- Jannah, M., Amaliatulwalidain, A., & Kariem, M. Q. (2022). Optimalisasi Peran Forum Anak Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Palembang. *Governance*, 10(2), 65–76. <https://doi.org/10.33558/governance.v10i2.5640>
- Kallio, H., Pietilä, A. M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing*, 72(12), 2954–2965. <https://doi.org/10.1111/JAN.13031>

- Little, R., & Smith, M. (2005). *PERSPECTIVES ON WORLD POLITICS; ED. BY RICHARD LITTLE*. London : Routledge, 2005. <https://www.routledge.com/Perspectives-on-World-Politics/Little-Smith/p/book/9780415322768>
- Lustitiani, N. S. D., & Ajisuksmo, C. R. P. (2022). *Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat Indonesia*. Unicef Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/analisis-situasi-partisipasi-anak-dan-remaja-serta-keterlibatan-di-masyarakat-indonesia>
- Mahendra, G. K. (2019). Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Yogyakarta 2016-2018. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 5(1), 01–19. <https://doi.org/10.52447/GOV.V5I1.2183>
- Nallari, A. (2011). Louise Chawla (2002), Growing up in an Urbanizing World. *Carnets de Géographes*, 3. <https://doi.org/10.4000/cdg.2389>
- Nurhayati, Aslinda, A., & Akib, H. (2018). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 123. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH AYUMI - FSH.pdf>
- Öztürk, Z. A. (2024). Inquiring Children's Security within the Framework of Human Security: A Theoretical Assessment. *Ege Academic Review*, 24(4), 651–660. <https://doi.org/10.21121/EAB.20240411>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023, November 14). *Surabaya Jadi Kota Percontohan Pemenuhan Hak Anak*. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/surabaya-jadi-kota-percontohan-pemenuhan-hak-anak>
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pusat Informasi Sahabat Anak, 1 (2023). <https://jdih.surabaya.go.id/uploads/peraturan/2023perwali3578059.pdf>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1989). *Konvensi Hak Anak: Versi anak anak*. Unicef Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- Redaksi Surabaya Today. (2024, September 24). Wujudkan Kota Layak Anak Dunia, Pemkot Surabaya Berpartisipasi Dalam Forum CFCI di China. *Surabayatoday.id*. <https://www.surabayatoday.id/2024/09/24/wujudkan-kota-layak-anak-dunia-pemkot-surabaya-berpartisipasi-dalam-forum-cfci-di-china-2/>
- RI, K. P. (2019). *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Rizki, D. A., Sulastri, S., & Irfan, M. (2015). Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung. *Share : Social Work Journal*, 5(1), 3. <https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13085>
- Roche, J. (1999). Children: Rights, participation and citizenship. *Childhood*, 6(4), 475–493. <https://doi.org/10.1177/0907568299006004006>
- Sari, R. A., Siregar, M. F. Z., & Nurhamidah, N. (2024). Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 1(1), 10–22. <https://doi.org/10.51178/cjerss.v5i3.2019>
- Silverio, R. V. (2016). Beyond the ASEAN Children's Forum: Exploring and Imagining Spaces for Children's Participation in ASEAN. *Human Rights and Peace in Southeast Asia : PUSHING THE BOUNDARIES*, 5(1), 35–60.
- Sitepu, M. H. (2023). *PERAN UNICEF MELALUI CHILD FRIENDLY CITIES INITIATIVE (CFCI) DALAM MENANGANI PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA PERIODE 2016-2021* [Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75402>
- Solin, R. S. U., & Ruwaida, I. (2022). Reflection on the Implementation of Children's Participation Rights (Based on Lundy's

- Participation Model). *Journal of Strategic and Global Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v5i1.1088>
- Thoomaszen, F. W. (2017). Peran keluarga dalam pemenuhan hak partisipasi anak pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK). *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 6(2), 82–97. <https://doi.org/10.30996/persona.v6i1.1298>
- Tunas Hijau. (2024, March 25). *Kunjungi Surabaya, Tim CFCI UNICEF Global Perkuat Sistem Perlindungan Anak*. Tunashijau.id. <https://tunashijau.id/2024/03/kunjungi-surabaya-tim-cfci-unicef-global-perkuat-sistem-perlindungan-anak/>
- UNICEF. (2018). *Child Friendly Cities and Communities Handbook* (T. Msonda, M. A. de W. Wijn, & C. S. Venturini (eds.); 1st ed.). UNICEF. <https://www.childfriendlycities.org/reports/child-friendly-cities-and-communities-handbook><https://www.childfriendlycities.org/reports/child-friendly-cities-and-communities-handbook>
- UNICEF. (2020). UNICEF Child Protection Strategy. *Unicef*, 1–58. www.unicef.org/protection
- UNICEF. (2021). Luncurkan program kerja sama 2021-2025, RI-UNICEF bersinergi untuk percepatan pemenuhan hak anak di Indonesia. In *Unicef*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/luncurkan-program-kerja-sama-2021-2025-ri-unicef-bersinergi-untuk-percepatan-pemenuhan-hak-anak-di-indonesia>
- UNICEF. (2022). *Guiding Principles | Child Friendly Cities Initiative*. Childfriendlycities.Org. <https://www.childfriendlycities.org/>
- United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report: New Dimension Of Human Security (1994). In *United Nations Development Programme 1994*. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf
- van der Haer, R., & Brown, K. J. (2024). The effect of war exposure on children; an exploration of conflict and post-conflict gendered experiences. *International Journal of Human Rights*. <https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2377328>
- Wahana Visi Indonesia. (2024, July 9). *Kota Surabaya Tuntaskan Penyusunan Dua Perwali Perlindungan Anak*. wahanavisi.org. <https://wahanavisi.org/id/media-materi/media/detail/kota-surabaya-tuntaskan-penyusunan-dua-perwali-perlindungan-anak>
- Yunani, H. P. (2023, November 20). RKT Program The Child Friendly Cities Initiative UNICEF Resmi Dicanangkan di Kota Surabaya. *harian.disway.id*. <https://harian.disway.id/read/744523/rkt-program-the-child-friendly-cities-initiative-unicef-resmi-dicanangkan-di-kota-surabaya>

DINAMIKA PERJUANGAN STATUS POLITIK PAPUA: PERAN ELITE POLITIK PAPUA PERIODE 1949–1961

Bernarda Meteray

Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua

Email: bernardameteray@gmail.com

Accepted: 2 Desember 2024; Revised: 19 Maret 2025; Approved: 19 Maret 2025

Abstrak

Keterlibatan elite politik Papua berpengaruh pada Perundingan New York 1962, membantah anggapan mereka terbelakang atau pasif. Peran mereka dalam sejarah patut diakui dan ditinjau kembali secara objektif. Untuk memperoleh data maka metode yang digunakan adalah rekonstruksi historis. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui 1) elite politik Papua yang terlibat dalam perjuangan status politik Papua (1949–1961), 2). strategi yang digunakan elite politik Papua dalam memperjuangkan status politik Papua 1949–1961, 3) dampak keterlibatan elite politik Papua terhadap dinamika sosial dan politik saat itu. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa 1) Elite politik Papua berasal dari berbagai profesi, termasuk guru, polisi, dan pegawai pemerintah yaitu Corinus Krey, Silas Papare, dan Marthin Indey berpihak pada Indonesia, sementara Johan Ariks, Nicolaas Jouwe, dan Lodewik Mandatjan mendukung Belanda. 2) Elite politik Papua mengadakan rapat-rapat penting, menyusun resolusi, mengirim surat, dan berpartisipasi dalam pertemuan di Jakarta, Yogyakarta, serta Belanda. 3). Perjuangan elite politik Papua tidak selalu berdampak langsung pada kebijakan kolonial atau Indonesia. Namun kesadaran politik Papua pun berkembang, membentuk identitas dan aspirasi dalam perjuangan

Kata Kunci: Elite, Papua, pemerintah, Partai dan Politik

Abstract

The involvement of the Papuan elite was influential in the 1962 New York Negotiations, refuting the notion that they were backward or passive. Their role in history deserves to be acknowledged and reviewed objectively. To obtain data, the method used is historical reconstruction. This study aims to identify 1) the Papuan political elite involved in the struggle for Papua's political status (1949-1961), 2) strategies used by Papuan political elites in fighting for Papua's political status from 1949-1961, 3) the impact of the involvement of Papuan political elites on social and political dynamics at that time. The results of this study show that 1) Papua's political elite comes from various professions, including teachers, police, and government employees, such as Corinus Krey, Silas Papare, and Martin Indey, who side with Indonesia. At the same time, Johan Ariks, Nicolaas Jouwe, and Lodewik Mandatjan support the Netherlands. 2) The Papuan political elite held important meetings, drafted resolutions, sent letters, and participated in meetings in Jakarta, Yogyakarta, and the Netherlands. 3). The struggles of the Papuan political elite do not always have a direct impact on colonial or Indonesian policies. However, Papuan political awareness is also growing, forming identity and aspirations in the struggle.

Keywords: Elite, Papua, Government, Parties and Politics

PENDAHULUAN

Masalah Papua mulai menjadi perhatian besar setelah integrasi melalui Perjanjian New York 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, yang dianggap kontroversial. Meskipun Papua secara resmi menjadi bagian dari Indonesia, beberapa kelompok masih

menolak klaim tersebut dan menginginkan kemerdekaan. Ketegangan antara Jakarta dan Papua terus berlanjut, ditandai dengan gerakan separatis, operasi militer, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan politik. Konflik ini memperburuk hubungan antara

pemerintah pusat dan masyarakat Papua, yang merasa kurang mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Hingga kini, upaya penyelesaian konflik masih menjadi tantangan besar bagi stabilitas nasional dan integrasi Indonesia.

Salah satu puncak ketegangan konflik Papua, menurut Sehrenneta Bella Fiona dan Retno Kusniati (2020: 6), adalah ketika Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menyusup sebagai delegasi Vanuatu dalam kunjungan kehormatan ke Kantor Komnas HAM (KTHAM) pada 25 Januari 2019. Kehadirannya menimbulkan kontroversi, mengingat perannya dalam gerakan separatis Papua yang menentang kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Dalam pertemuan dengan PBB, Benny Wenda menyerahkan petisi berisi 1,8 juta tanda tangan kepada Michelle Bachelet, Direktur Hak Asasi Manusia PBB.

Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memprotes keras tindakan Vanuatu yang dianggap tidak menghormati kedaulatan Indonesia karena memfasilitasi Benny Wenda dalam isu Papua. Pada sidang PBB tahun 2023, isu Papua tidak menjadi pembahasan. Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat, dalam jumpa pers pada Jumat, 29 September 2023 di Jakarta, NKRI sudah semakin dihormati oleh negara-negara lain.

Di bagian lain, Untung Suropati (2019: 86) menegaskan bahwa dari perspektif yang lebih ideologis, kompleksitas permasalahan Papua secara substansial sebenarnya merupakan persoalan pemahaman dan relasi antara konsep keindonesiaan dan kepapuaan. Sementara itu, menurut Rochdi Mohan Nazala (2022: 224), masalah Papua sebenarnya bukanlah persoalan sederhana seperti yang diperlihatkan oleh pernyataan Kementerian Luar Negeri RI maupun Untung Suropati. Pernyataan Rochdi mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (KEMLU), masih berupaya merumuskan strategi diplomasi untuk menghadapi tekanan internasional terkait isu Papua. Kehadiran Benny Wenda di Vanuatu mencerminkan langkah kelompok pro-kemerdekaan Papua dalam mencari dukungan

internasional, yang berpotensi memperkuat desakan terhadap Indonesia di forum global seperti PBB. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia, karena dapat memicu perhatian global yang lebih besar terhadap isu Papua.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, status Papua menjadi sengketa berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda. Meskipun Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 mengakui kedaulatan Indonesia, status Papua tetap belum ditetapkan dan menjadi objek negosiasi lebih lanjut. Belanda bersikeras mempertahankan Papua dengan memberikan status khusus, yang memperburuk hubungan dengan Indonesia. Ketegangan ini tidak hanya terjadi antara kedua negara, tetapi juga di kalangan elite Papua yang memiliki beragam pandangan politik. Sejumlah tokoh Papua pun muncul dalam upaya menentukan masa depan politik Papua, baik dalam mendukung integrasi dengan Indonesia maupun mempertahankan identitas tersendiri.

Beberapa elite politik Papua mendukung integrasi Papua ke dalam Indonesia karena melihat hal itu sebagai langkah yang lebih realistis dan menguntungkan, mengingat Indonesia telah merdeka dan sedang memperjuangkan kemerdekaan seluruh wilayahnya, termasuk Papua. Namun, tidak semua elite Papua sepakat dengan keputusan untuk bergabung dengan Indonesia. Kelompok elite lainnya menginginkan Papua memisahkan diri dari Indonesia untuk menjadi negara merdeka. Beberapa tokoh politik Papua yang memiliki kedekatan dengan Belanda berusaha mendapatkan dukungan internasional guna mempertahankan status Papua di bawah pemerintahan Belanda. Di saat yang sama, mereka juga berupaya memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB), persaingan antara elite politik Papua semakin tajam, terutama dalam menentukan arah masa depan Papua. Dua tokoh utama, Silas Papare dan Johan Ariks, menjadi simbol dari dua kubu yang berseberangan. Silas Papare mendukung integrasi Papua dengan Indonesia, sedangkan Johan Ariks berpihak pada Belanda yang ingin

mempertahankan kendali atas Papua. Dalam situasi ini, baik kubu pro-Indonesia maupun pro-Belanda berupaya mencari dukungan nasional dan internasional untuk memperkuat posisi politik mereka.

Menjelang Desember 1961, ketegangan politik di Papua semakin meningkat. Pada 1 Desember 1961, di depan gedung Dewan Nieuw Guinea, nama Nieuw Guinea resmi diubah menjadi Papua Barat. Untuk pertama kalinya, bendera Papua dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan Papua dinyanyikan sebagai simbol aspirasi kemerdekaan. Belanda berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan mendukung langkah ini, sementara Indonesia merespons dengan mengumandangkan Trikora di Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Trikora menjadi awal konfrontasi militer dan diplomasi. Hingga kini, perpecahan elite Papua antara kubu pro-Indonesia dan pro-kemerdekaan masih mempengaruhi dinamika politik serta konflik di Papua.

Kajian mengenai peran elite politik Papua dalam periode 1949–1961 masih minim mendapat perhatian akademis. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada elite lokal Papua di masa kontemporer, seperti yang dikemukakan I Ngurah Suryawan (2011:141), yang menyoroti konflik horizontal di Papua sebagai hasil konstruksi pemerintah Indonesia melalui elite lokal sebagai perpanjangan kebijakan negara. Sementara itu, Silvia Lili (2023:374) melihat pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan elite pemerintah lokal, namun masih menghadapi penolakan dari beberapa tokoh.

Kurangnya kajian historis mengenai elite Papua di masa lalu menunjukkan bahwa pemahaman terhadap dinamika politik Papua memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, kajian mengenai peran elite politik Papua dalam sejarah politik sangat penting untuk memahami dinamika konflik dan upaya perdamaian di Papua. Muridan dalam Meteray (2012: XXIII) menegaskan bahwa masa lalu Papua tidak dapat diabaikan dalam membahas dialog Papua damai. Sejarah menjadi aspek krusial karena berkaitan erat dengan identitas dan kepentingan masyarakat Papua saat ini dan

masa depan. Dalam perspektif ini, Muridan melihat sejarah sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan konflik, sedangkan Meteray menekankan bahwa pengungkapan sejarah adalah keharusan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami situasi saat ini (2021:299).

Dengan mengungkap keterlibatan elite politik Papua dalam memperjuangkan status politik Papua, terbukti bahwa orang Papua bukanlah pihak yang pasif atau terbelakang dalam panggung sejarah, melainkan aktor aktif dalam menentukan nasib politik wilayahnya. Dengan memahami peran mereka, ruang dialog damai dapat lebih terbuka. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengidentifikasi elite politik Papua yang berperan dalam perjuangan status politiknya, strategi yang mereka gunakan, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan politik. Memahami sejarah secara objektif dapat membuat resolusi konflik Papua menjadi lebih efektif, membuka ruang dialog, dan mencegah kesalahpahaman di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA: Elite Politik dalam Perspektif Sosiologis dan Historis

Kata *elite*, menurut pemikiran Pareto (dalam Bottomore, 2006:1), merujuk pada kelompok-kelompok sosial yang unggul. Kelompok ini menempati posisi puncak dalam struktur masyarakat dan memiliki pengaruh yang menentukan. Mereka bukanlah orang biasa karena memiliki posisi strategis serta pengaruh dalam pengambilan keputusan. Bottomore (2006:85) menjelaskan bahwa pada abad ke-20, elite terdiri atas tiga kelompok utama: kelompok intelektual, manajer, dan birokrat. Kelompok-kelompok ini sering dipilih sebagai pewaris fungsi kelas penguasa dan memainkan peran vital dalam pembentukan masyarakat baru.

Menurut Bottomore (2006:122), di negara-negara tertinggal, elite politik memegang peran dominan dalam menentukan arah wacana pembangunan. Elite ini umumnya berasal dari pemimpin nasional dan kaum intelektual revolusioner, yang dalam beberapa kasus saling berbaur. Di Asia dan Afrika, kaum intelektual

memainkan peran besar dalam perjuangan melawan kolonialisme. Bottomore (2006:123–124) memberikan contoh di Nigeria, di mana elite baru yang berpendidikan Barat mulai menggantikan elite lama dari pemerintahan tradisional seiring dengan berkembangnya gerakan kemerdekaan.

Fenomena serupa terjadi di Ghana. Setelah pemilu tahun 1954, komposisi anggota parlemen menunjukkan dominasi kelompok terdidik dan profesional. Sebanyak 29 persen anggotanya berasal dari kalangan guru, 17 persen dari juru tulis, akuntan, dan profesi administratif lainnya, serta 17 persen dari kelompok profesional liberal seperti pengacara dan dokter. Ini mencerminkan pergeseran politik dari dominasi elite tradisional menuju kepemimpinan berbasis pendidikan dan keterampilan modern. Di Majelis Perwakilan delapan Teritori French West Africa setelah pemilu tahun 1957, komposisi anggota juga menunjukkan dominasi kaum intelektual dan profesional: 22 persen adalah guru, 27 persen pejabat pemerintah, dan 20 persen berasal dari profesi liberal. Hal ini menegaskan bahwa di banyak negara pascakolonial, elite baru yang berpendidikan memegang peran sentral dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan politik.

Sementara itu, Van Niel (1984:12) menjelaskan bahwa elite di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yakni elite tradisional dan elite modern. Elite tradisional bersifat turun-temurun, di mana status dan kekuasaan diwariskan berdasarkan garis keturunan, biasanya berasal dari keluarga bangsawan atau kelompok sosial yang memiliki legitimasi historis. Sebaliknya, elite modern lebih beragam, karena didasarkan pada pendidikan dan kompetensi individu. Menurut Van Niel, elite modern mencakup administrator, pegawai pemerintah, teknisi, profesional, dan intelektual. Mereka memperoleh status melalui jalur pendidikan dan keterampilan yang mendukung peran mereka dalam pembangunan negara.

Van Niel juga membagi elite modern menjadi dua subkategori: elite fungsional dan elite politik. Elite fungsional terdiri dari mereka yang memiliki keahlian teknis dan

profesional dalam menjalankan administrasi serta pembangunan, seperti birokrat, akademisi, dan pengusaha. Sementara itu, elite politik adalah kelompok yang terlibat langsung dalam aktivitas politik, dengan tujuan yang bervariasi tetapi umumnya berkaitan dengan perubahan dalam struktur kekuasaan.

Dalam perspektif sosiologi, David Jarry dan Julia Jarry (dalam Maysarah Harahap, Ruth Nadya, Winanda Sitanggang, dan Jamaludin, 2023:2156) menyatakan bahwa elite adalah kelompok masyarakat yang paling berbakat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, agama, dan institusi. Elite politik, khususnya, memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan. Teori elite menyatakan bahwa pemisahan antara elite dan masyarakat biasa merupakan karakteristik yang tidak terhindarkan dalam masyarakat modern yang kompleks.

Sejalan dengan itu, Mills (dalam Harahap et al., 2023:2155) menyatakan bahwa elite terdiri dari mereka yang menduduki posisi puncak dalam institusi ekonomi, militer, dan politik. Mereka membentuk kelompok elite kekuasaan yang memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan masyarakat. Kelompok ini sering bersatu dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap struktur sosial dan ekonomi. Namun, menurut Mills, elite kekuasaan bukanlah kelompok yang sepenuhnya tertutup atau statis. Perbedaan kepentingan di antara mereka menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak selalu bersifat terpadu. Pareto juga menambahkan bahwa dalam setiap kelas sosial terdapat individu yang memiliki bakat dan kemampuan berbeda, yang memungkinkan mereka naik ke tingkat elite.

Pasca Perang Dunia II, pemerintahan Belanda di Papua menghadapi kekurangan tenaga pegawai di berbagai sektor. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak guru sekolah kampung diberi kesempatan bekerja di bidang pemerintahan. Mereka diikutsertakan dalam kursus pelatihan di bidang pemerintahan, kesehatan, pertanian, dan militer. Program ini memungkinkan mereka memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung administrasi kolonial Belanda di Papua. Akibatnya, elite politik Papua

yang muncul pada masa itu terdiri dari guru sekolah kampung, polisi, mantri pertanian dan kesehatan, serta pegawai pemerintah tingkat kampung dan distrik. Kelompok ini menempati posisi istimewa karena memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan formal yang lebih baik dibandingkan masyarakat umum.

Dengan demikian, elite politik adalah kelompok yang memiliki peran penting dalam pemerintahan serta berpartisipasi dalam proses legislasi, partai politik, dan pengambilan keputusan yang memengaruhi perubahan sosial dan politik. Dalam konteks Papua pada periode 1949–1961, elite politik terdiri dari guru sekolah kampung, polisi, mantri pertanian dan kesehatan, serta pegawai pemerintah tingkat lokal. Mereka juga mencakup individu-individu yang terlibat langsung dalam aktivitas politik pada masa pemerintahan Belanda. Pemerintah kolonial memberikan kesempatan bagi orang Papua untuk menduduki posisi dalam pemerintahan lokal, yang secara tidak langsung mendorong keterlibatan mereka dalam politik. Beberapa tokoh Papua mulai tampil sebagai pemimpin yang aktif dalam perdebatan mengenai masa depan Papua, baik dalam hubungannya dengan Belanda maupun dengan Indonesia.

PEMBAHASAN

Awal Munculnya Elite Politik Papua

Pembentukan awal elite Papua dimulai ketika Belanda membenahi administrasi pemerintahan di Papua pada awal 1945. Pemerintah Belanda membutuhkan tenaga lokal untuk mendukung pemerintahan, sehingga mereka mulai mendidik masyarakat Papua dalam berbagai bidang. Di bagian utara Papua, guru yang merupakan lulusan pendidikan guru di Miei diberikan kesempatan untuk bekerja di sektor pelayaran, kesehatan, militer, dan kepolisian. Sementara itu, bagi guru yang tidak ingin mengajar, mereka diberikan peluang luas untuk menjadi *bestuur* (pamong praja).

Pada Januari 1945, pemerintah Belanda mendirikan berbagai kursus termasuk kursus pamong praja selama enam bulan di Kota Nica, untuk mencetak generasi pemimpin

Papua yang diharapkan mendukung kebijakan kolonial. Kursus ini menjadi salah satu upaya Belanda dalam membina tenaga administrasi pemerintahan lokal. Salah satu tokoh penting dalam proses ini adalah Soegoro Atmoprasodjo, seorang pendidik asal Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai bekas tawanan Digul. Lahir di Yogyakarta pada 23 Oktober 1923, Soegoro ia kemudian ditunjuk oleh Van Eechoud sebagai pengajar dan direktur asrama pada Kursus Singkat Pamong Praja di Kota Nica, yang kini dikenal sebagai Kampung Harapan. Dalam perannya, Soegoro tidak hanya mengajarkan administrasi pemerintahan, tetapi juga memperkenalkan konsep nasionalisme kepada para siswa Papua.

Soegoro Atmoprasodjo berkontribusi besar dalam pendidikan dan pembinaan calon elite Papua yang akan berperan dalam pemerintahan lokal. Melalui perannya sebagai pengajar di Kursus Singkat Pamong Praja, ia membantu mencetak pemimpin terdidik dengan keterampilan administrasi yang dibutuhkan untuk mengelola daerah mereka. Kebijakan ini menandai munculnya kelompok elite Papua yang memiliki kemampuan dalam bidang pemerintahan. Peserta kursus ini berasal dari putra-putra Papua umumnya mempunyai latar belakang guru, mantri yang diberi kesempatan untuk dapat bekerja di bidang pemerintahan. Orang Papua yang merupakan elit Papua pertama yang terlibat dalam pendidikan di Kota Nica (sekarang Kampung Harapan Jayapura) ini antara lain; Markus Kaisepo, Lukas Rumkorem, Lisias Simbiak, Frans Kaiseppo, Nikolas Youwe, Marten Indey, Cornelis Krey, Silas Papare, B. Mofu, O. Manupapami dan Herman Wayoi (Meteray, 2012:54).

Komite Indonesia Merdeka (KIM) di Jayapura

Perjuangan menentang Belanda di Papua demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia mulai digagas oleh Soegoro Atmoprasodjo. Namun, langkah konkret dalam bentuk organisasi politik baru dimulai pada 16 November 1946, ketika J. Gerungan mendirikan Partai KIM (Kelompok Indonesia Merdeka) di Hollandia

Binnen (kini Abepura, Jayapura). Sebagai partai politik pertama di Papua, KIM menjadi wadah perjuangan bagi masyarakat Papua yang mendukung integrasi dengan Indonesia dan menolak kolonialisme Belanda. Melalui KIM, para aktivis pro-kemerdekaan membangun kesadaran politik serta menggalang dukungan untuk menjadikan Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Riwayat Hidup, Krey, 7 Agustus 1990).

Keanggotaan KIM sangat beragam, terdiri dari berbagai suku dan latar belakang. Anggota pentingnya antara lain Poedjasoebrata, seorang bekas asisten HPB asal Jawa yang bertugas di dinas penerangan (RVD); Corinus Krey, seorang mantri di rumah sakit Hollandia Binnen; Petrus Wettebossy, mantri asal Bintuni; Marthen Indey, pembantu asisten *bestuur* di Arso; Latuperrisa asal Ambon, bekas pengajar di Sekolah Pamong Praja; serta Pani Nasution dan Bastian Tauran (Aditjondro, 1997:116).

Sebagai upaya merespons situasi politik pasca Perjanjian Linggajati, pada 11 Desember 1946, Van Eechoud selaku pejabat Gubernur Papua mengundang sejumlah tokoh Papua untuk menghadiri pertemuan penting. Beberapa tokoh yang hadir antara lain Corinus Krey, Spener Malibella asal Sorong, Alex Beratoboiei asal Japen, dan Petrus Wettebossy. Selain itu, hadir pula Nicolaas Jouwe dan Lucas Jouwe asal Kayu Pulau, Mallo dari Skou, Barnabas Jufuay dari Depapre, Andreas Mano dari Tobati, serta Marthen Indey dari Doromena (Courtouis, 1948:126).

Pertemuan ini bertujuan menjelaskan posisi Papua dalam Perjanjian Linggajati. Van Eechoud menyampaikan dua poin penting: pertama, bahwa Papua akan memiliki status khusus di luar Indonesia; kedua, bahwa Belanda memutuskan untuk tidak mengirim wakil dari Papua dalam Konferensi Denpasar di Bali pada Desember 1946, karena dianggap belum ada tokoh Papua yang layak mewakili. Penjelasan ini sangat menentukan arah masa depan politik Papua.

Namun, hasil pertemuan tersebut sangat mengecewakan para tokoh Papua. Sebagai bentuk perlawanan, pada 13 Desember 1946,

Marthen Indey, Corinus Krey, dan Nicolaas Jouwe mengirim surat protes kepada residen. Dalam surat itu, mereka menyampaikan tiga tuntutan utama: (1) Irian harus menjadi bagian dari federasi Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, sesuai wilayah Hindia Belanda; (2) mereka menolak keputusan Belanda yang tidak mengirim wakil dari Irian ke konferensi di Bali, serta menuntut hak orang Irian untuk berbicara di parlemen Negara Indonesia Serikat; dan (3) mereka mengkritik pemerintah Belanda yang selama ini menolak memberikan hak kepada orang Irian untuk memilih, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam politik (Courtouis, 1948:128).

Surat protes ini menunjukkan ketegasan elite Papua dalam menolak kebijakan pemisahan Papua dari Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Nicolaas Jouwe, Lukas Jouwe, Marthen Indey, dan Corinus Krey semula mendukung gagasan integrasi dengan Indonesia. Mereka bahkan menyerukan rakyat Papua untuk bangkit dan meraih kemerdekaan bersama bangsa Indonesia.

Keinginan kuat elite Papua untuk terlibat dalam proses kemerdekaan tercermin dalam kesaksian Marthen Indey kepada Komisi Nieuw Guinea tahun 1950. Saat ditanya siapa pemimpin pemberontakan, Indey menyatakan bahwa pada 1946, ia adalah pemimpin pertama yang memberontak, dan bahwa saudaranya, Nicolaas Jouwe, telah hadir di konferensi Denpasar untuk memprotes kolonialisme Belanda. Namun, faktanya Jouwe tidak pernah diundang ke konferensi tersebut. Kebingungan dan kekecewaan Indey menggambarkan besarnya harapan rakyat Papua untuk berperan dalam menentukan masa depannya (Report of the Committee Nieuw Guinea, 1950:84).

Dalam perkembangan selanjutnya, baik Nicolaas Jouwe maupun Lukas Jouwe mengubah pendirian dan mendukung usulan residen agar Papua tetap menjadi koloni Belanda. Salah satu faktor yang memengaruhi perubahan sikap Nicolaas Jouwe adalah penolakan keras Van Eechoud terhadap pengiriman wakil Papua ke konferensi Denpasar. Pernyataan Marthen Indey kepada Komisi Nieuw Guinea pada

tahun 1950 kembali menegaskan bahwa Jouwe seharusnya hadir di konferensi tersebut. Namun kenyataannya, tidak ada wakil Papua yang diundang. Hal ini memperjelas ambiguitas sikap pemerintah Belanda terhadap status politik Papua, yang akhirnya berdampak pada perubahan sikap sebagian elite Papua.

Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) di Serui

Pada pertengahan Juni 1946, pemerintah Belanda di Batavia mengasingkan G. S. S. J. Ratulangi ke Serui. Ratulangi, yang sebelumnya diangkat sebagai Gubernur Sulawesi oleh Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945, dianggap oleh NICA di Makassar sebagai ancaman terhadap upaya pemulihan keamanan dan pemerintahan.

Selama masa pengasingannya di Serui, Ratulangi bersama Latumahina aktif berdiskusi dengan elite lokal Papua. Ia menjelaskan situasi politik terkini di Jakarta dan berbagai wilayah Indonesia, sembari menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Melalui komunikasi intensif ini, mereka berhasil memperoleh izin untuk mendirikan partai politik di Serui.

Pada 29 November 1946, Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) resmi didirikan di gedung Sekolah Rakyat di Serui Kota. Ratulangi terpilih sebagai pemimpin umum, dengan tokoh-tokoh seperti Silas Papare, Baldus Dumatubun, Alwi Rahman, Achmad Djalali, A. Wanane, A. Waimuri, Benjamin Kajai, Paulus Pajawa, Barnabas Aninam, dan L. R. Tiwo turut masuk dalam kepengurusan. PKII bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Serui sekaligus mempromosikan perjuangan kemerdekaan Indonesia di Papua. Pada 23 Maret 1948, Ratulangi dan rekan-rekannya dibebaskan dari tahanan dan dipindahkan ke Yogyakarta (Catatan Harian, Stevanus Rumbewas, 1990).

Sepeninggal Ratulangi dari Serui, pemerintah Belanda memperketat pengawasan dan melakukan tindakan represif terhadap para

pegawai pamong praja Papua. Beberapa di antaranya dihukum dan diberhentikan. Untuk mengisi kekosongan administrasi, Belanda mengirimkan asisten bestuur dari Ambon ke kampung Waren dan Wonti. Reorganisasi internal PKII pun dilakukan akibat tekanan ini. Silas Papare terpilih sebagai ketua, dengan Alwi Rahman sebagai wakil ketua.

Pada tahun 1948, Belanda semakin meningkatkan tekanan terhadap PKII dan akhirnya menangkap Silas Papare, yang kemudian dipenjarakan di Hollandia. Namun, karena perannya selama pendudukan Sekutu, ia segera dibebaskan dan kembali ke Serui, di mana ia tetap melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme Belanda (Meteray, 2012: 82).

Meskipun menghadapi tekanan berat dan penahanan, elite Papua yang mendukung integrasi dengan Indonesia tidak menyerah. Tokoh-tokoh seperti Silas Papare, Benjamin Kajai, Stefanus Rumbewas, dan Alwi Rahman terus menjalin komunikasi dengan pejuang di Yogyakarta. Pada 21 Juli 1949, sebuah radiogram dari pusat meminta agar Papua mengirimkan perwakilannya ke Yogyakarta. Menanggapi permintaan ini, PKII mengadakan rapat dan menetapkan Silas Papare serta Stefanus Rumbewas sebagai delegasi. Namun, karena keterbatasan dana, hanya Silas Papare yang dapat berangkat pada 27 Juli 1949, dengan dukungan finansial dari PKII, termasuk sumbangan sebesar 400 gulden dari Yakop Thung Tjing Ek (Riwayat Hidup Yakop Thung Tjing Ek, n.d).

Setibanya di Yogyakarta, Silas Papare bersama Soeparno, J. Latumahina, dan Nottan mendirikan Badan Perjuangan Irian (BPI) dan menerbitkan surat kabar *Suara Irian*. Melalui media ini, mereka menyebarkan gagasan bahwa Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Komunikasi antara para pendukung Republik di Papua dan Papare di Yogyakarta terus terjalin. Salah satunya adalah Inggamer, anggota PIM di Biak, yang melaporkan perkembangan situasi di wilayahnya, terutama terkait dukungan terhadap Belanda.

BPI mendapat dukungan luas dari berbagai partai politik di Jawa, khususnya di Yogyakarta. Pada 12 Oktober 1949, BPI bersama partai-partai politik menghasilkan resolusi yang mendukung integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia. Dalam resolusi tersebut, Silas Papare dan Latumahina ditunjuk untuk mendukung delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Aktivitas Elite Politik Papua Pro-Indonesia Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB)

Pada tahun 1949–1950, setelah KMB berakhir, banyak orang Indonesia kembali ke daerah asal mereka. Namun, perjuangan politik di Papua tetap berlanjut. Kelompok elite Papua yang tergabung dalam partai seperti Komite Indonesia Merdeka (KIM) dan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) tetap aktif melakukan penolakan terhadap pemerintahan Belanda secara bawah tanah. Banyak orang Papua, terutama dari Serui, mendukung Indonesia. Tokoh seperti Silas Papare dari Serui, serta Corinus Krey, Lucas Rumkorem, dan Zeth Rumkorem dari Biak turut ambil bagian dalam perjuangan. Sementara itu, dari Waropen, Stephan Refasi serta tokoh lainnya seperti Petrus Wetebossy, Marthen, Amos Indey, dan Petrus Sembor juga terlibat aktif. Bahkan, pada tahun 1956, Hermanus Wayoi dan Agus Nenepath secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap Indonesia (Meteray, 2012: 85).

Dukungan rakyat Serui terhadap Indonesia tetap teguh meskipun mendapat berbagai tekanan dari pemerintah Belanda. Perjuangan kelompok elite Serui untuk mempertahankan Serui dan Papua sebagai bagian dari Indonesia terus berlanjut. Hal ini tampak dalam kunjungan Komisi Indonesia ke Serui pada 29 Mei 1950, yang dihadiri oleh tokoh nasional seperti Mr. Muhammad Yamin dan Silas Papare. Dalam pertemuan tersebut, 16 tokoh masyarakat, termasuk Stevanus Rumbewas, menegaskan komitmen mereka untuk mendukung integrasi Papua dengan Indonesia. Semangat perjuangan yang ditunjukkan masyarakat Serui ini

mendorong pemerintah Belanda untuk segera melakukan tindakan represif. Pada tahun 1951, pemerintah Belanda di Serui memanggil dan menangkap seluruh badan pengurus PKII serta sejumlah pejuang kemerdekaan Indonesia untuk dimintai keterangan, antara lain Alwi Rahman, Barnabas Animan, Stevanus Rumbewas, Alex Beratobui, Benjamin Kajai, Achmad Djalali, dan Yakop Thung Tjing Ek (Riwayat Hidup Yakop Thung Tjing Ek).

Dukungan terhadap perjuangan Silas Papare dan kemerdekaan Indonesia juga terlihat di berbagai wilayah lain, seperti Hollandia, Biak, Kaimana, dan sejumlah kota di Jawa. Wawancara dengan elite Papua seperti Marthen Indey dan Stevanus Rumbewas mengungkapkan bahwa banyak rakyat Papua menolak pemerintahan kolonial Belanda. Akibatnya, pasca-KMB tahun 1950, banyak elite Papua mengalami penahanan. S.D. Kawab mencatat bahwa sejak tahun 1952, setiap peringatan 17 Agustus kerap disertai dengan penangkapan tokoh-tokoh Papua oleh Belanda. Salah satu yang menjadi target penahanan adalah S.D. Kawab sendiri, yang pernah ditahan di Manokwari dan Hollandia karena aktivitas politiknya, sebelum akhirnya dibebaskan menjelang kedatangan Komisi Indonesia.

Upaya perjuangan terus berlanjut. Pada tahun 1958 di Biak, organisasi *Tentara Tjadangan Tjenderawasih* (TTT) dibentuk oleh Lukas Rumkorem setelah ia kembali dari tahanan di Hollandia. Dengan dukungan pemuda setempat, pertemuan-pertemuan rahasia digelar hingga akhirnya TTT resmi berdiri. Menurut J. Tarumaselly, organisasi ini memiliki cabang di berbagai daerah di Papua. Pengurus cabang Biak antara lain Lukas Rumkorem sebagai penasihat, David Woisiri sebagai ketua, dan J. Tarumaselly sebagai sekretaris. Organisasi ini menghimpun para pemuda yang tidak terlibat dalam peristiwa 14 Maret 1948, termasuk pemuda dari luar Papua. Mereka secara diam-diam mengadakan rapat untuk membahas situasi politik, merancang pemberontakan, serta mengirim pemuda untuk bergabung dengan pasukan gerilya (Departemen Angkatan Darat, Staf Umum Angkatan Darat, 1961: 132).

Namun, aktivitas TTT yang bertujuan mendukung kemerdekaan Republik Indonesia di Papua akhirnya terhenti setelah diketahui oleh pemerintah kolonial Belanda. Pihak Belanda segera melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh penting dalam organisasi tersebut, termasuk David Woisiri, Rafael Maselkosu, J. Tarumaselly, Jonathan Saroy, dan Frits Werluken yang merupakan pengurus cabang TTT di Serui. Mereka dituduh terlibat dalam aktivitas yang dianggap mengancam pemerintahan kolonial. Peristiwa ini menunjukkan upaya sistematis pemerintah Belanda dalam meredam pergerakan nasionalisme Indonesia di Papua (Arsip, J. Tarumaselly, 7 Februari 1961).

Aktivitas Elite Politik Papua Pro Belanda Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB)

Menjelang KMB tahun 1949, elite politik Papua aktif berupaya menentukan masa depan Papua dengan mengikuti perkembangan politik melalui radio dan surat kabar. Mereka berdiskusi secara terbuka mengenai status Papua dan situasi politik Indonesia. Diskusi ini mencerminkan kebebasan dalam menyuarakan pandangan serta kepentingan daerah. Salah satu reaksi awal datang dari Johan Ariks, seorang tokoh kelompok tua Papua di Manokwari. Saat itu, Manokwari menjadi pusat komunitas Indo peranakan di Nugini Belanda setelah Hollandia. Kota ini juga memiliki sejarah penting sebagai pusat misi Kristen sebelum Perang Dunia II.

Pada Januari 1949, Johan Ariks dari Manokwari bersama H.A. Fisher berangkat ke Jakarta. Ariks, seorang guru yang pernah mengunjungi Depok, Tidore, dan Ternate, didampingi Fisher, kepala perwakilan Papua di Indonesia. Mereka membawa surat berisi lima dokumen yang disampaikan kepada Konsulat Jenderal Australia di Batavia (Arsip Nasional Pemerintah Australia [NAA], 1949), yakni:

1. Resolusi para pemimpin adat Papua tertanggal 19 Januari 1949.

2. Ringkasan pembicaraan Johan Ariks dengan P.J. Koets, ketua kabinet Komisi Tinggi Kerajaan di Indonesia.
3. Surat dari Johan Ariks kepada Ketua UNCI beserta tiga lampiran tertanggal 7 Maret 1949.
4. Surat Ariks kepada UNCI yang memuat lampiran terkait masalah Indonesia dan kemungkinan pembentukan Pakta Pasifik.

Kehadiran Johan Ariks di Jakarta bertujuan untuk mencari dukungan dari pejabat Belanda, Australia, dan United Nations Commission for Indonesia (UNCI). Ia mengatasnamakan rakyat Papua dan memohon agar ada wakil dari Papua yang diikutsertakan dalam KMB. Pada hari yang sama, Ariks juga mengirim surat kepada Dr. J. Beel untuk menyampaikan aspirasi rakyat Papua, termasuk usulan susunan delegasi Papua dalam KMB. Dalam suratnya kepada Ketua UNCI pada 7 Maret 1949, Ariks kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana penggabungan Papua ke dalam Republik Indonesia Serikat (RIS), serta harapannya agar orang Papua memiliki perwakilan langsung dalam KMB (NAA, 1949).

Dalam suratnya kepada PBB, Johan Ariks menekankan bahwa Papua berbeda dari Indonesia dalam hal etnis, agama, dan budaya, baik secara fisik maupun mental. Ia menyatakan bahwa hanya orang Papua yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Jika Papua tidak diundang dalam KMB, maka lebih baik tetap berada di bawah pemerintahan Belanda. Ia berulang kali menyampaikan argumen ini dalam surat-menyuratnya dengan pemerintah Belanda, UNCI, dan PBB.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Nicolaas Jouwe dan Marcus Kaisiepo. Pada 28 Juli 1949, mereka mengadakan diskusi dengan rakyat Papua di berbagai wilayah seperti Hollandia, Sarmi, Biak, Teluk Geelvink, dan Manokwari. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperoleh dukungan terhadap pemerintahan yang sepenuhnya dikelola oleh orang Papua, serta menolak penyatuan dengan

Indonesia. Mereka menegaskan bahwa masa depan Papua harus diputuskan oleh rakyat Papua sendiri tanpa intervensi pihak luar.

Pada 26 Oktober 1949, Marcus Kaisiepo dan Nicolaas Jouwe berangkat ke Belanda menggunakan pesawat KLM, singgah di Bandara Kemayoran, dan melanjutkan perjalanan ke Eropa. Mereka melakukan pendekatan dengan pejabat pemerintahan serta berupaya menarik simpati masyarakat Belanda (De Bruijn, 1978: 308). Pada Januari 1950, Jouwe, Ariks, dan Kaisiepo kembali ke Papua dan melakukan kampanye ke Hollandia, Biak, Yapen, Waropen, dan Manokwari untuk menjelaskan hasil KMB dan dampaknya terhadap posisi Papua.

Menurut laporan Komisi Pemerintah Belanda tahun 1950, kampanye kelompok Ariks menunjukkan bahwa masyarakat Papua lebih mendukung Belanda dibanding Indonesia. Hal ini tercermin dalam petisi yang disampaikan di Hollandia pada 20 Mei 1950 oleh Johan Ariks, Marcus Kaisiepo, dan Nicolaas Jouwe (Report of the Committee New Guinea, 1950: 88). Isi petisi tersebut antara lain:

1. Kami, sebagai masyarakat Melanesia, tidak akan membiarkan nasib kami ditentukan oleh orang Indonesia yang secara etnis dan geografis berbeda dari kami.
2. Kami, masyarakat Papua, tidak membutuhkan pendidikan politik dari partai-partai Indonesia, karena kami tidak pernah menjalani perjuangan nasional seperti orang Indonesia.
3. Kami tidak mengakui partai politik PIDRIS, yang dibentuk oleh bekas tawanan perang dan dianggap mengganggu perdamaian di Papua.

Selanjutnya, pada April 1950, Nicolaas Jouwe dan Marcus Kaisiepo menghadiri Konferensi Komisi Negara-Negara Pasifik Selatan (SPC) di Fiji. Di sana, mereka bertemu dengan komunitas Pasifik Selatan yang memiliki kesamaan ras dan budaya dengan orang Papua. Pemerintah Belanda memanfaatkan momen ini untuk memperkuat narasi bahwa Papua lebih dekat secara kultural dengan bangsa Pasifik daripada Indonesia.

Pada Oktober 1950, Jouwe, Kaisiepo, dan Abdullah Arfan kembali ke Belanda untuk memperjuangkan aspirasi politik Papua. Dalam pertemuan dengan Van Maarseven, Johan Ariks menegaskan penolakan terhadap penyatuan Papua dengan RIS atau Uni Belanda-Indonesia. Meskipun Van Maarseven mendukung prinsip penentuan nasib sendiri, ia juga meminta dukungan kelompok Ariks terhadap pemerintah Belanda. Pertemuan ini mencerminkan ketidaktegasan Belanda dalam menentukan masa depan Papua (Meteray, 2012: 178).

Pada tahun 1951, Nicolaas Jouwe mendirikan Gerakan Persatuan New Guinea (GPNG) di Hollandia sebagai wadah perjuangan untuk penentuan nasib sendiri. GPNG secara terbuka menolak klaim Indonesia atas Papua dan memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi ini didirikan oleh kalangan terdidik Papua yang telah lama bekerja dengan Belanda, sehingga memperoleh legitimasi resmi. Jaringan GPNG tersebar di berbagai wilayah seperti Biak, Manokwari, Sorong, dan Merauke, dan menjadi simbol aspirasi politik rakyat Papua dalam menghadapi tekanan dari Indonesia dan tarik-ulur kebijakan Belanda.

Dukungan terhadap GPNG semakin kuat pada 1955 ketika Marcus Kaisiepo memobilisasi ribuan warga Papua di Hollandia untuk menentang Pemerintah Indonesia. Demonstrasi ini dipicu oleh kegagalan Indonesia membawa isu Papua ke PBB (Lagerberg, 1962: 1967). Aksi-aksi massa yang dipimpin GPNG telah berlangsung sejak 1954, dengan tokoh-tokoh seperti Johan Ariks, Marcus Kaisiepo, dan Nicolaas Jouwe. Di Biak, simpatisan GPNG bahkan mengirim telegram kepada Ratu Juliana di Belanda yang menyatakan bahwa sekitar 500 orang Papua menolak kehadiran dan otoritas Pemerintah Indonesia.

Partai Politik Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB)

Pasca KMB, berbagai partai politik mulai bermunculan di Papua sebagai respons terhadap dinamika politik yang semakin mengarah pada kemungkinan perubahan status wilayah. Kemunculan partai-partai ini mencerminkan

beragam aspirasi politik masyarakat Papua—baik yang mendukung kemerdekaan penuh maupun yang condong mempertahankan keterikatan dengan Belanda.

Salah satu partai paling awal yang berdiri adalah Partai Nasional (Parna), yang didirikan di Hollandia pada 10 Agustus 1960 atas gagasan Frits Kirihi, seorang mahasiswa sosiologi non-Barat di Universitas Leiden. Kirihi, yang mengamati perkembangan politik di Papua dari Belanda, menyadari bahwa Belanda sebenarnya meragukan prospek kemerdekaan Papua. Bersama Herman Wajoi dan Amos F. Indey, ia menggagas pembentukan partai politik sebagai wadah perjuangan. Rapat pendirian Parna dilangsungkan pada 10 Agustus 1961 di Hamadi, dengan Herman Wajoi menjabat sebagai ketua, didampingi oleh Amos F. Indey dan S. Malibela dari Sorong. Parna mewakili semangat kaum muda Papua yang menginginkan kemerdekaan lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya.

Kirihi secara tegas menyampaikan visi dan program Parna, yang menekankan pentingnya papuanisasi dalam pemerintahan melalui pelatihan dan kursus bagi orang Papua. Target utamanya adalah agar pada tahun 1970 seluruh fungsi pemerintahan lokal dapat dijalankan oleh orang Papua sendiri. Parna menolak segala bentuk diskriminasi rasial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat Papua dalam politik. Kirihi menyatakan bahwa Papua harus dipimpin oleh orang Papua, bukan oleh orang Eropa, serta menuntut persamaan hak bagi semua kelompok etnis. Ia juga mendorong pendidikan alternatif bagi calon pegawai negeri dan menekankan pentingnya kekuatan politik serta ekonomi sebagai fondasi bagi negara Papua yang merdeka dan berdaulat.

Kehadiran Parna menjadi inspirasi bagi kaum muda lainnya untuk membentuk partai-partai baru. Salah satunya adalah Partai Demokrasi Rakyat (Democratische Volkspartij/DVP), yang dibentuk pada 24 Agustus 1960 di Hollandia oleh Arnold Runtumboy. Sebelumnya, partai ini pernah didirikan oleh L. Jacadewa pada 21 Desember 1957 dengan nama Partai Anti-Revolusioner, namun mengalami reorganisasi hingga menjadi DVP. Meskipun sempat diusulkan untuk bergabung dengan

Parna, usulan tersebut ditolak. DVP didominasi oleh kelompok Indo Belanda dan kurang memperoleh dukungan dari masyarakat Papua, baik di Hollandia maupun di Manokwari. Ketidakpastian politik dan minimnya kepercayaan dari masyarakat Papua menjadi hambatan utama bagi efektivitas gerakan politik DVP, meskipun partai ini tetap melanjutkan program-programnya di tengah tantangan yang ada.

Sementara itu, di wilayah Manokwari, muncul Partai Persatuan Nieuw Guinea (Eenheidspartij Nieuw Guinea/Epang) yang didirikan pada 20 September 1960 oleh Gosewish dengan dukungan kuat dari masyarakat Arfak. Lodewik Mandatjan menjabat sebagai ketua, dan Gosewish sebagai wakil ketua. Seperti halnya DVP di Hollandia, Epang juga didominasi oleh kelompok Indo peranakan dan tidak sepenuhnya merepresentasikan aspirasi murni orang Papua. Menurut J.M. van der Kroef, baik DVP maupun Epang lebih mengakomodasi kepentingan kelompok Indo peranakan dan Belanda, serta turut melibatkan orang Cina. Dalam struktur kepengurusan Epang bahkan terdapat tokoh-tokoh Belanda, yang menegaskan orientasi pro-Belanda partai ini. Dukungan kuat dari suku Hattam, khususnya melalui pengaruh Lodewik dan Barend Mandatjan, menjadi kekuatan utama Epang di Manokwari. Keberadaan partai ini mencerminkan masih kuatnya sisa-sisa pengaruh kolonial dalam politik Papua menjelang masa transisi.

Berbeda dari DVP dan Epang, Partai Kena U Embay yang didirikan oleh Esau Itaar pada 20 November 1960 di Doyo Lama, Sentani (Hollandia), menunjukkan semangat inklusivitas dan persatuan yang lebih kuat. Dalam struktur kepemimpinan partai ini, Agus Kereuta menjabat sebagai wakil ketua dan Willem Assaway sebagai bendahara. Kena U Embay terbuka bagi seluruh penduduk Papua tanpa membedakan latar belakang kebangsaan, wilayah, atau status sosial. Visi utamanya adalah membangun kesatuan dan solidaritas di kalangan masyarakat Papua dalam upaya menuju kemerdekaan dan kesejahteraan bersama. Dengan pendekatan yang non-sektarian dan kolaboratif, partai ini mencerminkan semangat

perjuangan politik yang lebih menyeluruh dan mengakar pada nilai-nilai kolektivitas.

Kemunculan partai-partai ini menggambarkan kompleksitas lanskap politik Papua pada masa pasca-KMB. Di satu sisi, terdapat semangat nasionalisme Papua yang tumbuh kuat di kalangan generasi muda, sementara di sisi lain masih tampak pengaruh kelompok pro-Belanda yang cukup dominan, terutama di kalangan Indo peranakan. Dinamika inilah yang kemudian membentuk fondasi awal perdebatan panjang tentang masa depan politik Papua.

Aktivitas Dewan Papua Menjelang 1961

Pada 1950, pemerintah Belanda merencanakan pembentukan Dewan Papua yang terdiri atas 21 anggota: 10 orang Papua, 9 Belanda, dan 2 non-Belanda. Pemilihnya adalah warga negara Belanda di Papua yang telah tinggal di sana selama tiga tahun dan berusia minimal 21 tahun. Meskipun tanpa mempertimbangkan pendidikan atau penghasilan, pemerintah Belanda berusaha memajukan pendidikan orang Papua agar mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan tersebut.

Dalam *Report on Netherlands New Guinea for the Year* (1960:101) dijelaskan bahwa menjelang awal 1960, berbagai informasi mengenai pemilihan Dewan Papua disebarluaskan melalui selebaran, radio, poster, dan surat kabar. Surat kabar *Pengantara* (2 Juli 1960) membahas hak dan tugas Dewan Papua, sementara *Nieuw Guinea Koerier* (10 November 1960) menginformasikan rencana pembentukan dewan tersebut. Pemerintah Belanda juga menyosialisasikan informasi melalui film, slide, dan media massa lainnya.

Surat kabar yang diterbitkan di Papua pada masa itu menggunakan dua bahasa, yakni Belanda dan Melayu. Format penerbitannya beragam: harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, dan triwulanan. Hingga tahun 1960, tercatat terdapat 10 media massa yang tersebar di berbagai wilayah Papua, antara lain: *Nieuw Guinea Koerier*, *Pengantara*, *De Tifa*, *Triton*,

De Lens, *Fak-Fak Bode*, *Arka*, *Opwaarts* (CWNG), *Mededelingen van de Dienst van Gezondheidszorg*, dan *Madjallah Kita* (Arka).

Melalui media massa tersebut, pemerintah Belanda menginformasikan bahwa pada pertengahan Juni 1960 mereka mengajukan rancangan undang-undang pendirian Dewan Papua sebagai langkah penting menuju pembangunan tata negara dan persiapan kemandirian rakyat Papua. Sosialisasi dilakukan ke berbagai distrik. Di Manokwari, misalnya, diadakan pertemuan di gedung sosial Sanggeng yang dihadiri oleh 150 orang, termasuk penduduk Arfak. Di Hollandia, pemberitahuan pemilihan disebar melalui selebaran pada 13 Oktober 1960 yang memuat sistem pemilihan dan daftar pemilih yang dapat dilihat di setiap distrik.

Dalam Arsip Nasional Pemerintah Australia (NAA, 1961), disebutkan bahwa pemilihan Dewan Papua akhirnya dilaksanakan: secara langsung di Hollandia dan Manokwari, dan secara tidak langsung (melalui tulisan atau bisikan) di wilayah lain. Pemilihan pertama berlangsung pada 11–17 Januari 1961, dengan partisipasi sekitar 260.000 orang dari 14 sub-daerah pemilihan, dari total penduduk sekitar 700.000 jiwa. Di Hollandia, mayoritas yang terpilih adalah orang Papua, bersama enam orang Belanda yang umumnya berprofesi sebagai pastor, guru, polisi, dan pegawai pertanian. Satu-satunya perempuan yang terpilih adalah Herina Pepuho dari Asei Besar, yang saat itu menjabat sebagai kepala keuangan di Hollandia.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, antusiasme masyarakat Papua sangat tinggi. Pada 5 April 1961, Dewan Papua dilantik di Hollandia dengan 28 anggota, terdiri dari 16 orang hasil pemilihan dan 12 orang yang ditunjuk oleh Gubernur. Dari jumlah itu, 22 adalah orang Papua, satu orang berasal dari Kei, dan lima orang Belanda (termasuk Indo-Belanda).

Ketua Dewan adalah J.H.F. Sollewijn Gelpke. Anggota terpilih meliputi: Nicolaas Jouwe (Hollandia), J.O. de Rijke (Hollandia Kota), M. Suway (Nimboran), Marcus Kaisiepo

(Kepulauan Schouten), B. Mofu (Kepulauan Schouten), M.B. Ramandey (Japen-Waropen), E.J. Bonay (Japen-Waropen), H.F.W. Gosewich (Manokwari), Penehas Torey (Ransiki), Abdullah Arfan (Raja Ampat), A.R. van Zeeland (Sorong), A.S. Onin (Teminabuan), D. Deda (Ajamaru), N. Tanggahma (Fak-Fak), Mohamad Achmad (Kaimana), dan A.K. Gebze (Merauke).

Sementara itu, anggota yang ditunjuk meliputi: F.K.T. Poana (Mimika), T. Mezeth (Sarmi), V.P.C. Maturbongs (Mapi), C. Kiriwaib (Muju), A. Samkakai (Kepulauan Frederik), D. Walab (Asmat/Pantai Kasuari), B. Burwos (Manokwari/Steenkool), Dr. F. Chr. Kamma (Kerom), K. Gobai (Paniai), Dr. L.J. van den Berg (Tigi), H. Wonsiwor, dan satu perempuan yaitu D. Tokoro (Nasib Nusa dan Bangsa, 1961:31).

Pada bulan April 1961, menurut *NAA Monthly Report* (1961), Ratu Juliana menyampaikan pernyataan yang memotivasi Dewan Papua untuk mengunjungi Belanda. Delegasi pertama, dipimpin Marcus Kaisiepo, berangkat pada 22 Agustus 1961 dan terdiri atas delapan orang Papua serta dua orang Belanda. Mereka menghadiri pembukaan sidang parlemen Belanda pada 19 September 1961. Delegasi kedua, dipimpin Sollewijn Gelpke, juga melakukan kunjungan serupa.

Tujuan utama kunjungan adalah untuk berdiskusi dengan pemerintah dan parlemen Belanda mengenai perkembangan Papua menuju penentuan nasib sendiri. Marcus Kaisiepo menegaskan bahwa rakyat Papua tidak ingin bergabung dengan Indonesia, dan bahwa isu utama yang akan dibahas Dewan adalah *self-determination*. Pernyataan ini disiarkan secara luas, termasuk oleh Radio Australia.

Setelah kembali ke Hollandia pada 19 Oktober 1961, beberapa anggota Dewan Papua mengadakan pertemuan tertutup dengan 40 tokoh Papua dari berbagai wilayah, tanpa kehadiran orang Belanda maupun wartawan. Pertemuan membahas usulan kepada Ratu Belanda agar menerima proposal Luns tentang konferensi internasional di bawah PBB. Pertemuan ini juga menghasilkan pembentukan

Komite Nasional yang diketuai Willem Inuri, dengan Nicolaas Jouwe sebagai wakil ketua dan Marcus Kaisiepo sebagai sekretaris. Komite ini terdiri dari 18 anggota mewakili seluruh daerah, termasuk pedalaman Papua.

Komite Nasional berwenang memberi masukan kepada Dewan Papua dan pemerintah, serta menentukan kehendak rakyat terkait *self-determination*. Mereka merencanakan pemilihan bendera, lambang, dan lagu kebangsaan pada 1 November 1961. Namun, pembentukan Komite Nasional ditentang oleh sebagian anggota Dewan yang tidak dilibatkan, seperti A.K. Gebze (Merauke), M. Achmad (Kaimana), B. Burwos (Manokwari), dan Penehas Torey (Ransiki). Gebze menyatakan bahwa penduduk selatan tidak mengetahui pendirian Komite Nasional tersebut (Van der Veur, 1962:65).

Wawancara Van der Veur dengan warga pedesaan menunjukkan kekecewaan terhadap Dewan yang dianggap terlalu fokus pada isu internasional dan mengabaikan persoalan lokal. Kritik juga muncul di surat kabar *De Tifa* (29 Juni 1962), yang menyayangkan Dewan lebih memprioritaskan isu politik ketimbang masalah sosial dan ekonomi.

Pada 30 Oktober 1961, Dewan Papua menggelar sidang istimewa untuk membahas isi manifesto. Sidang dibuka pukul 11.00 oleh ketua dewan dan dihadiri 26 anggota: 20 orang Papua dan 6 non-Papua. Pendengar sidang antara lain Boldinggijh, Hoekstra, Lijseen, dan Velkamp (NAA, 1961).

Sidang tersebut menyetujui isi manifesto secara bulat dan rencananya akan diserahkan kepada gubernur keesokan harinya. Pada hari yang sama, pemerintah Belanda menunjuk tiga wakil Dewan Papua—Wonsiwor, Nicolaas Jouwe, dan Tanggahma—untuk menghadiri debat di parlemen Belanda dan PBB di New York.

Pada 31 Oktober 1961, delegasi yang dipimpin Marcus Kaisiepo menyerahkan manifesto kepada Gubernur Platteel. Isi manifesto menyatakan: (1) nama wilayah adalah Papua Barat, (2) penduduk disebut rakyat Papua Barat, (3) bendera yang dipilih diakui sebagai bendera negara, dan (4) lagu kebangsaan yang

diakui adalah “Hai Tanahku Papua” (Griapon, 2007:83).

Pada 1 Desember 1961, diadakan upacara di depan gedung Dewan Papua. Tepat pukul 08.00, nama Nieuw Guinea resmi diganti menjadi Papua Barat, bendera Papua dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan dinyanyikan. Hari itu ditetapkan sebagai hari libur nasional. Perayaan ini berlangsung tertib dan aman.

Menurut *The New York Times* (1961), pengibaran bendera bertujuan menumbuhkan semangat persatuan dan identitas Papua. Drooglever menyebut peristiwa ini sebagai “penyegar semangat dan kesadaran harga diri baru” (2010:582). Namun, laporan wakil pemerintah Australia menyatakan bahwa bendera hanya dikibarkan di tempat umum dan tidak di gedung pemerintah, menunjukkan bahwa pengibaran ini belum menjamin pemberian pemerintahan sendiri.

Setelah rencana Luns gagal pada Desember 1961, Belanda tidak dapat mempertahankan Papua. Di sisi lain, Indonesia meningkatkan diplomasi dan militer, menegaskan bahwa Papua bagian dari wilayah RI (Henderson, 1973:105). Pada Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) untuk menggagalkan pembentukan negara boneka Papua, mengibarkan Merah Putih di seluruh wilayah NNG, dan memobilisasi kekuatan rakyat (Lopa, 1962:87).

KESIMPULAN

Elite politik Papua yang terlibat dalam perjuangan status politik Papua antara 1949-1961 berkembang seiring dengan kebijakan Pemerintah Belanda. Munculnya elite politik ini dimulai setelah J.P.K. Van Eechoud merekrut pegawai Indonesia dan tokoh nasionalis Indonesia yang diasingkan ke Papua pada 1946. Aktivitas politik pada periode ini sangat dipengaruhi oleh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Elite politik Papua berasal dari berbagai latar belakang, seperti guru sekolah, polisi, mantri pertanian, kesehatan, dan pegawai pemerintah tingkat kampung. Tokoh-tokoh yang mendukung Indonesia termasuk

Corinus Krey, Silas Papare, dan Marthin Indey, sementara yang mendukung Belanda antara lain Johan Ariks, Nicolaas Jouwe, dan Lodewik Mandatjan. Pembagian dukungan ini mencerminkan ketegangan politik yang terjadi di Papua.

Antara 1949–1961, elite politik Papua yang jumlahnya sangat terbatas berusaha memperjuangkan status politik Papua melalui strategi diplomasi, pengajuan petisi, serta pendekatan langsung kepada pemerintah Belanda. Meskipun gerakan mereka belum terorganisir secara sistematis, upaya ini mencerminkan kesadaran politik yang mulai tumbuh dan perhitungan yang cukup matang. Mereka mencoba membangun identitas politik Papua secara mandiri dan menegaskan aspirasi kedaulatan, meskipun terbentur pada minimnya dukungan internasional. Mereka mulai dengan mengorganisasi pertemuan rahasia dan diskusi untuk merumuskan langkah-langkah strategis. Elite politik Papua juga berusaha menggali dukungan dari berbagai kelompok etnis dan agama di Papua untuk menciptakan kesatuan suara. Pembentukan organisasi politik menjadi sarana penting dalam perjuangan ini. Selain itu, mereka menghadiri rapat-rapat penting di tingkat lokal dan nasional untuk memperjuangkan aspirasi Papua. Sebagai bagian dari upaya diplomatik, para tokoh politik Papua membuat resolusi, mengirim surat, dan aktif dalam pertemuan-pertemuan di Jakarta, Yogyakarta, bahkan Belanda. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia dan internasional serta menekan Belanda agar memberikan keputusan yang lebih menguntungkan bagi Papua. Melalui strategi-strategi ini, mereka berupaya memastikan bahwa masa depan politik Papua berada di tangan orang Papua, bukan pihak luar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari keterlibatan elite politik Papua dalam memperjuangkan status daerahnya antara 1949 hingga 1961 tidak selalu memberikan pengaruh langsung terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pihak pemerintah Belanda atau pemerintah Indonesia. Namun, perjuangan mereka menunjukkan ketangguhan dan kemampuan mereka dalam menghadapi

tantangan besar. Meski hasilnya belum sepenuhnya menguntungkan pada masa itu, perjuangan politik ini mencerminkan tekad kuat untuk memperjuangkan status wilayah mereka. Upaya ini juga menunjukkan kesadaran dan kematangan politik orang Papua dalam mengartikulasikan aspirasi mereka serta membangun identitas politik yang lebih jelas dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan Papua.

Referensi

Arsip/ Surat Kabar/ Laporan Resmi

De Tifa. (1960, Oktober – 1962, Juni).

Krey, C. (1990, August 7). *Riwayat hidup*.

Ministry of Overseas Territories. (1960). *Report on Netherlands New Guinea for the year 1960, presented to Secretary General of the United Nations pursuant to Article 73(e) of the Charter*.

NAA. (1960, December 2). *Monthly Report: November 1960*. F. A. Bensted. File No. 448/IIC/60.

NAA. (1961, November 6). *Monthly Report: October 1961*. P. J. Mollison. File No. 154/IIC/61.

NAA. (1961, September 1). *Monthly Report: August 1961*. P. J. Mollison. File No. 127/IIC/61.

National Archives of Australia (NAA). (1949, July 30). *Surat Ariks ke Konsulat Jenderal Australia di Batavia dan surat ke PBB di Lake Success, 28 Agustus 1949*. File No. 400/1/ii/1/2.

Netherlands Government. (1949–1960). *Report on Netherlands New Guinea for the years 1949–1960, presented to the Secretary General of the United Nations pursuant to Article 73(e) of the Charter*.

Nieuw Guinea Koerier. (1962, Maret – 1962, September).

Rumbewas, S. (n.d.). *Catatan harian*.

Secretariat of the Netherlands-Indonesian Union. (1950). *Report of the Committee: New Guinea (Irian), Part II: Text and appendixes of the Netherlands main constituent*.

The New York Times. (1961, December 1).

Thung, Y. T. E. (n.d.). *Riwayat hidup*.

Artikel/Jurnal/ Buku

Aditjondro, G. J. (1987). Marthin Indey, pilar perjuangan pembebasan Papua Barat di Jayapura. *Prisma*, (2), 16.

Bottomore, T. B. (2006). *Elite dan masyarakat*. Akbar Yanjung Institute.

Departemen Angkatan Darat, Staf Umum Angkatan Darat. (1961). *Tinjauan situasi Irian Barat*. Jakarta.

Drooglever, P. J. (2009). *An act of free choice: Decolonization and the right to self-determination in West Papua* (T. Stantin, M. van Yperen, & M. de Jager, Trans.). England.

Fiona, S. B., & Kusniati, R. (2020). Status hukum Papua Barat: The right to self-determination atau national integrity? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 1–34.

Griapon, A., & Henderson, W. (Eds.). (1973). *West New Guinea: The dispute and its settlement*. American Asian Educational Exchange, Seton Hall University Press.

Harahap, M., Nadya, R., Sitanggang, W., & Jamaludin. (2023). Elite politik di Indonesia: Akar dan dampak penyalahgunaan hak berdemokrasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(6), 2149–2160.

Kroeft, J. M. van der. (1961). Recent development in West New Guinea. *Pacific Affairs*, 34(3), 46.

Lagerberg, C. I. J. (1962). *Jaren van reconstructie: Nieuw Guinea van 1948 tot 1961*. Zuid Nederlandsche Drukkerij NV.

Lopa, B. (1962). *Djalannya revolusi Indonesia membebaskan Irian Barat*. Perusahaan Pertjetakan Negara Djakarta.

Meteray, B. (2012). *Nasionalisme ganda orang Papua*. Kompas.

Miedema, J., & Stockhof, W. A. L. (Eds.). (1993). *Irian Jaya Source Materials No. 6, Series A: Memorie van overgave No.3 Afdeeling West Nieuw Guinea, Part II*. DSACCUL/IRIS.

Nazala, R. M. (n.d.). A Janus-faced policy: Explaining Indonesian counter diplomacy toward West Papua's quest for nationhood. <https://doi.org/10.7282/t3-pxw4-gx16>

Penyelesaian Persengketaan Irian Barat. (1950). *Rentjana pendirian Komisi-Gabungan Irian Barat bagian Komisi Indonesia*. Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

- Suropati, U. (2019). Solusi komprehensif menuju Papua baru: Penyelesaian konflik Papua secara damai, adil dan bermartabat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, (37), Maret.
- Suryawan, I. N. (2011). Komin Tipu Komin: Elit lokal dalam dinamika otonomi khusus dan pemekaran daerah di Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(2), 140–153.
- Van Niel, R. (1970). *The emergence of the modern Indonesian elite*. W. van Hoeve Publishers Ltd.
- Veur, P. W. van der. (1962). West Papua: A new era. *Asian Survey*, 2(8), Oktober.